

PENERBIT
SUBALTERN

GEOPOLITIK NARASI, KENDALI

Muhammad Suryadi R

Geopolitik, Narasi, Kendali

(Kumpulan Esai-Esai Geopolitik)

Penulis:
Muhammad Suryadi R

PENERBIT SUBALTERN

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Hak cipta pada buku ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dilarang memperbanyak, mereproduksi, menyimpan dalam sistem pengambilan data, mentransmisikan, mendistribusikan, atau mengalihwujudkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman, maupun cara lainnya tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta, kecuali untuk penggunaan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Geopolitik, Narasi, Kendali

(Kumpulan Esai-Esai Geopolitik)

Penulis:
Muhammad Suryadi R

PENERBIT SUBALTERN

Geopolitik, Narasi, Kendali (Kumpulan Esai-Esai Politik)

Penulis: Muhammad Suryadi R
Makassar: © 2026
Layouter: Al Faisa
Desain Cover: Tim Penerbit

Copyright © Subaltern 2026
Hak cipta ada pada Penerbit Subaltern Inti Media
All rights reserved

Cetakan Pertama, Mei 2026
xxxii + 137 Halaman
14 x 20 cm

Diterbitkan oleh Penerbit Subaltern Inti Media
PENERBIT ANGGOTA IKAPI

CV. Subaltern Inti Media
Jalan Mangga 3, Komplek Bumi Batara Mawang Blok B4/21,
Kel. Borongloe, Kec. Bontomarannu, Gowa.

Contact: 082299888879
Email: penerbitsubaltern@gmail.com
Website: penerbitsubaltern.com
ISBN: 978-634-7778-00-0

Dr. H. Saprillah, M.Si

Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar,
Penulis Novel Tahajjud Sang Aktivis

Adi menunjukkan keberanian intelektual yang jarang dimiliki anak muda seusianya. Ia memilih masuk ke wilayah geopolitik global—ruang yang rumit, penuh tarik-menarik kepentingan, dan seringkali hanya diminati kalangan tertentu. Melalui buku ini, ia membaca arah diplomasi bebas aktif Indonesia di tengah dunia yang semakin multipolar: ketika Amerika memainkan tekanan melalui sanksi dan tarif, China bergerak lewat soft power, sementara Rusia mengambil posisi strategis dalam berbagai konflik global. Ia tidak sekadar memotret peristiwa, tetapi mencoba membaca perubahan arah kekuasaan dunia dan dampaknya bagi posisi Indonesia.

Yang menarik, buku ini lahir dari keberanian menantang batas intelektual. Di tengah banyak orang memilih isu yang aman dan populer, ia justru masuk ke medan yang kompleks dan membutuhkan ketekunan berpikir. Perspektif yang dibangun dalam buku ini menunjukkan upaya memahami dunia bukan sebagai ruang hitam-putih, tetapi sebagai arena negosiasi kepentingan yang terus bergerak. Karenanya, buku ini penting dibaca, terutama bagi generasi muda yang ingin melihat diplomasi Indonesia secara lebih kritis, progresif, dan relevan dengan perubahan geopolitik global hari ini.

Dr. Sabaran Nuruddin, S.HI., M.Phil.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pembacaan tajam dan reflektif tentang bagaimana kekuasaan global bekerja melalui ruang, wacana, dan produksi narasi. Buku kedua dari anak muda andalan ini sangat layak untuk dibaca.

Dr. Bustanul Iman RN

Dosen Universitas Islam Negeri Palopo

Buku ini menarik karena membahas geopolitik dengan bahasa yang ringan tapi tetap berisi. Penulis berhasil menggambarkan bagaimana dunia sedang bergerak menuju multipolaritas. Yang paling menarik, buku ini juga mengangkat posisi Indonesia lewat konsep Board of Peace dan politik bebas aktif di era Prabowo Subianto. Di tengah situasi global yang makin rumit, buku ini membuat pembaca berpikir apakah Indonesia masih benar-benar nonblok atau sedang mencari bentuk baru dalam diplomasinya. Simpel, kritis, dan tetap terasa akademis tanpa bikin pusing.

Suaib Prawono, S.Pd

Korwil GUSDURian Sulawesi, Maluku dan Papua

Geopolitik, Narasi, Kendali bukan sekadar buku, melainkan sebuah cermin yang menyingkap arah diplomasi bebas aktif Indonesia di tengah pusaran multipolaritas dunia. Adi dengan cukup tajam menarasikan bagaimana ketidakpastian global di era kepemimpinan Trump, strategi soft power China, hingga kalkulasi aman Rusia, semuanya berkelindan membentuk lanskap geopolitik yang kompleks. Bahkan ketika Perang Iran disinggung, pembaca diajak memahami bahwa setiap konflik regional memiliki resonansi global. Saya semakin yakin bahwa diplomasi bebas aktif bukan sekadar jargon, melainkan strategi bertahan sekaligus berperan dalam percaturan dunia. Sebuah karya yang relevan, kritis, dan layak menjadi referensi bagi siapa pun.

Ilham Iskandar, S.E

Ketua Ikatan Alumni PMII Kabupaten Barru

Buku Genre Geopolitik karya Adi ini menarik disimak, karena mengupas dinamika politik global secara tajam dan relevan. Buku ini mempertanyakan, apakah Amerika Serikat sebagai negara adidaya di bawah kepemimpinan Trump benar-benar memiliki kekuatan "absolut" bertindak sebagai polisi dunia tanpa

batasan regulasi dan kontrol internasional. Penyajian isu geopolitik di dalamnya dikemas dengan bahasa yang lugas. Selain itu, buku ini juga menggambarkan kehadiran Rusia dan China sebagai kekuatan penyeimbang, bahkan kekuatan tandingan terhadap dominasi Amerika selama beberapa dekade. Melalui sudut pandang yang kritis dan argumentatif, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami perkembangan dan dinamika geopolitik global di era modern.

Sambutan-Sambutan

Prof. Nurhayati Rahman, M.Hum

Guru Besar Filologi Universitas Hasanuddin, Penerjemah La Galio

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di tengah perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat, kehadiran buku ini menjadi penting sebagai salah satu ikhtiar intelektual untuk membaca ulang arah peradaban dan dinamika geopolitik global dari sudut pandang Indonesia.

Saya melihat buku yang ditulis oleh nanda Muhammad Suryadi R ini menghadirkan pembacaan geopolitik yang tajam, reflektif, dan berani. Penulis tidak sekadar memandang geopolitik sebagai arena perebutan pengaruh antarnegara besar, tetapi juga sebagai ruang pergulatan sejarah, identitas, budaya, dan kesadaran bangsa. Dengan gaya penulisan yang argumentatif namun tetap komunikatif, penulis berhasil merangkai persoalan-persoalan global dengan akar sejarah dan kebudayaan Nusantara secara menarik dan kritis.

Di tengah dominasi narasi global yang sering kali berpusat pada perspektif negara-negara besar, buku ini menawarkan sudut pandang yang segar dari perspektif Indonesia dan Global South. Pembaca diajak memahami bahwa perubahan tatanan dunia tidak dapat dilepaskan

dari perjalanan sejarah panjang umat manusia, termasuk posisi strategis Indonesia sebagai bangsa yang memiliki warisan peradaban besar. Penulis dengan baik menunjukkan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa ini membaca arah perubahan dunia sekaligus mempertahankan identitas dan kepentingan nasionalnya.

Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya membangun kesadaran intelektual dan kebangsaan. Buku ini tidak hanya menyajikan analisis geopolitik, tetapi juga mengajak pembaca untuk melihat pentingnya sejarah dan kebudayaan sebagai fondasi dalam menghadapi dunia multipolar yang semakin kompleks.

Sebagai seorang yang menaruh perhatian pada kajian sejarah dan kebudayaan Nusantara terutama kebudayaan Bugis, saya mengapresiasi upaya penulis dalam menghadirkan karya yang memadukan refleksi sejarah, analisis geopolitik, dan semangat kebangsaan dalam satu bangunan narasi yang utuh. Buku ini layak dibaca oleh akademisi, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia di tengah percaturan dunia yang terus berubah.

Akhirnya, saya berharap kehadiran buku ini dapat memperkaya khazanah literasi geopolitik di Indonesia serta mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki daya pikir kritis, wawasan global, dan tetap berakar kuat pada identitas kebangsaan.

Makassar, 08 Mei 2026

Prof. Dr. Kamaruddin Hasan, M.Pd.

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar,
Rektor ITBA Al-Gazali Barru

Bismillahirrahmanirrahim.....

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, ilmu, dan kesempatan-Nya, sehingga buku yang berada di tangan pembaca ini dapat hadir sebagai bagian dari ikhtiar intelektual untuk membaca ulang arah peradaban dunia yang tengah bergerak dalam pusaran perubahan geopolitik global. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang pembawa cahaya peradaban, yang mewariskan kepada umat manusia pentingnya ilmu, keadilan, dan keberanian moral dalam menghadapi zaman.

Buku **Geopolitik, Narasi, Kendali: Himpunan Esai-Esai Geopolitik** karya Muhammad Suryadi R atau Adi ini hadir pada momentum ketika dunia sedang mengalami pergeseran besar dalam struktur kekuasaan global. Tatanan dunia yang dahulu tampak mapan kini mulai retak oleh berbagai konflik, rivalitas kekuatan besar, perang narasi, krisis identitas kebangsaan, hingga pertarungan ideologi dan kepentingan ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, geopolitik tidak lagi sekadar percakapan tentang wilayah dan kekuatan militer, melainkan telah menjelma menjadi arena perebutan makna, pengaruh, dan kendali atas masa depan dunia.

Melalui kumpulan esai yang tajam, reflektif, dan provokatif, penulis berusaha menghadirkan pembacaan kritis terhadap dinamika global kontemporer. Pembaca

akan menemukan bagaimana isu multipolaritas dunia, kebangkitan Tiongkok, meredupnya dominasi Amerika Serikat, konflik Timur Tengah, posisi ASEAN, hingga arah politik luar negeri Indonesia dibedah dengan pendekatan historis, ideologis, dan geopolitik yang mendalam. Penulis tidak hanya memotret peristiwa, tetapi juga mencoba menyingkap struktur besar yang bekerja di balik berbagai peristiwa internasional.

Kekuatan utama buku ini terletak pada keberaniannya menghubungkan sejarah dengan realitas masa kini. Penulis menunjukkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami akar peradabannya sendiri. Karena itu, pembacaan terhadap Nusantara, Majapahit, jalur rempah, hingga gagasan bebas aktif ala Soekarno bukanlah romantisme masa lalu, melainkan upaya menemukan kembali orientasi strategis Indonesia di tengah dunia yang terus berubah.

Selain itu, buku ini juga memperlihatkan bagaimana narasi menjadi instrumen kekuasaan. Di era digital dan hiper-konektivitas saat ini, perang tidak selalu berlangsung dengan senjata dan invasi fisik, tetapi juga melalui opini, media, propaganda, ekonomi, teknologi, dan diplomasi global. Dalam konteks itulah, kemampuan membaca narasi geopolitik menjadi sangat penting agar bangsa-bangsa berkembang, termasuk Indonesia, tidak hanya menjadi objek percaturan global, tetapi mampu tampil sebagai subjek sejarah yang menentukan arah masa depannya sendiri.

Sebagai sebuah karya esai geopolitik, buku ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan kesimpulan final. Justru di situlah letak nilai pentingnya. Buku ini membuka ruang dialog, perdebatan, dan refleksi kritis

bagi para pembaca, akademisi, mahasiswa, pengambil kebijakan, maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap masa depan Indonesia dan dunia.

Saya memandang karya ini sebagai ikhtiar intelektual yang patut diapresiasi, terutama karena ditulis dengan keberanian berpikir, keluasan referensi, dan kegelisahan akademik terhadap arah perubahan global dewasa ini. Di tengah arus informasi yang serba cepat dan dangkal, kehadiran buku seperti ini menjadi penting untuk menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis dan kesadaran geopolitik kebangsaan.

Selain mengurai dinamika global, buku ini juga mengajak pembaca menyadari bahwa masa depan suatu bangsa tidak pernah ditentukan semata oleh kekuatan ekonomi atau militer, melainkan oleh kemampuan membangun visi peradaban yang berakar pada identitas nasional dan kesadaran sejarahnya sendiri. Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana menghadapi perubahan geopolitik dunia, tetapi juga bagaimana menjaga kedaulatan berpikir di tengah derasnya arus kepentingan global yang sering kali berupaya membentuk arah kebijakan, budaya, bahkan cara pandang masyarakat. Karena itu, kesadaran geopolitik harus tumbuh bukan hanya di ruang akademik dan pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif bangsa.

Buku ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang konflik antarnegara atau perebutan pengaruh global, tetapi juga tentang pentingnya membangun ketahanan intelektual dan keberanian moral dalam membaca zaman. Penulis mengingatkan bahwa di tengah dunia yang semakin kompleks, bangsa yang mampu bertahan

adalah bangsa yang memiliki kemampuan memahami perubahan, membaca kepentingan, serta menjaga orientasi kebangsaannya secara teguh. Dengan cara pandang seperti itulah, kumpulan esai dalam buku ini menjadi relevan untuk dibaca oleh generasi muda Indonesia sebagai bekal membangun kesadaran kritis terhadap arah masa depan bangsa di tengah percaturan dunia internasional.

Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan kepada penulis atas dedikasi dan keberaniannya menuangkan gagasan-gagasan besar dalam buku ini. Semoga karya ini memberi manfaat, memperluas cakrawala berpikir, dan menjadi sumbangsih penting dalam memperkuat literasi geopolitik Indonesia.

Selamat membaca dan menafsirkan ulang dunia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barru, 08 Mei 2026

Prof. Dr. Hannani, M.Ag

Guru Besar Ilmu Hukum Islam dan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare

Geopolitik tidak lagi dapat dibaca semata-mata sebagai pertarungan militer, perebutan wilayah, atau kompetisi ekonomi antarnegara. Ia telah berubah menjadi pertarungan narasi, perebutan makna, dan upaya mengendalikan arah sejarah. Olehnya itu, buku ini hadir pada saat dunia sedang bergerak dalam ketidak-pastian yang semakin tajam. Dalam konteks itulah buku "**Geopolitik, Narasi, Kendali**" karya Suryadi memperoleh relevansinya. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca melihat peta dunia, tetapi juga membaca retakan-retakan yang tersembunyi di balik peta itu.

Kekuatan utama buku ini terletak pada keberanian penulis memandang geopolitik dari sudut yang luas, historis, dan reflektif. Esai-esai di dalamnya tidak berhenti pada peristiwa aktual, tetapi menelusuri akar sejarah, warisan kolonial, ingatan peradaban, dan posisi bangsa-bangsa dalam struktur kekuasaan global.

Buku ini juga memberi komentar kritis terhadap tatanan dunia kontemporer. Dalam pembahasan tentang kedaulatan di tengah dunia multipolar, penulis memper-lihatkan bahwa kedaulatan negara sering kali hanya tampak kuat di atas kertas, tetapi rapuh di hadapan tekanan ekonomi, sanksi politik, intervensi narasi, dan dominasi kekuatan besar. Penulis mengingatkan bahwa Indonesia memiliki warisan politik luar negeri bebas aktif, pengalaman Konferensi Asia Afrika, kekuatan sejarah

maritim Nusantara, dan posisi geografis yang sangat menentukan dalam percaturan Indo-Pasifik. Karena itu,

Esai-esai tentang Amerika Serikat, Trump, Board of Peace, Iran, serta Asia Tenggara memperlihatkan karakter penulis yang berani, lugas, dan tidak ragu mengambil posisi. Tentu, beberapa pandangan dalam buku ini dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut. Namun justru di sanalah nilainya: buku ini tidak ditulis untuk membuat pembaca tertidur dalam kenyamanan, melainkan untuk menggugah, mengguncang, dan memaksa kita berpikir ulang tentang posisi bangsa, arah dunia, dan makna kedaulatan.

Muhammad Suryadi R patut diapresiasi karena mampu menyajikan tema berat geopolitik dengan bahasa yang hidup dan tidak monoton. Buku ini adalah ajakan untuk kembali berpikir besar, membaca sejarah dengan jernih, dan menatap masa depan dengan keberanian. Bagi pembaca Indonesia, buku ini penting karena mengingatkan satu hal mendasar: bangsa yang kehilangan narasi akan mudah dikendalikan, tetapi bangsa yang memahami sejarahnya akan selalu memiliki jalan untuk kembali berdaulat.

Selamat atas terbitnya buku keduanya.

Parepare, 10 Mei 2026

Kata Pengantar

Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D

Guru Besar Antropologi Agama UIN Ar-Raniry,
Researcher Fellow Universitas Malaya

Ada buku yang hadir sekadar untuk menambah daftar bacaan. Ada pula buku yang hadir karena zaman memang sedang membutuhkan cara baca baru. Buku yang berada di hadapan pembaca ini, menurut hemat saya, termasuk dalam kategori kedua. Ia tidak lahir dari ruang kosong. Ia ditulis ketika dunia sedang bergerak cepat, ketika peta kekuasaan global berubah hampir setiap hari, ketika perang tidak lagi hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di meja perundingan, layar media, jalur dagang, pangkalan militer, jaringan data, dan ruang kesadaran manusia. Dalam situasi seperti itu, membaca geopolitik bukan lagi urusan para diplomat, jenderal, akademisi hubungan internasional, atau pengambil kebijakan semata. Ia telah menjadi kebutuhan intelektual warga dunia, terutama bagi bangsa seperti Indonesia, yang selalu berada di persimpangan sejarah, jalur laut, sumber daya, kebudayaan, dan kepentingan kekuatan besar.

Buku Geopolitik, Narasi, Kendali karya Muhammad Suryadi R ini saya pandang sebagai sebuah ikhtiar penting untuk membaca ulang dunia yang sedang retak. Penulis tidak sekadar menampilkan peristiwa-peristiwa global

sebagai berita yang lewat, tetapi berusaha menangkap pola di balik peristiwa. Ia tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan, melainkan mencoba menghubungkan antara sejarah, kekuasaan, narasi, ekonomi, kebudayaan, dan posisi Indonesia dalam tatanan dunia yang berubah. Inilah kekuatan utama buku ini. Ia tidak menjadikan geopolitik sebagai disiplin yang kering, penuh istilah asing, dan terpisah dari pengalaman bangsa. Sebaliknya, penulis menarik geopolitik ke dalam ruang kesadaran kita sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang, luka kolonial, kekayaan sumber daya, warisan maritim, dan tanggung jawab moral dalam percaturan global.

Saya membaca buku ini dengan satu kesan utama: penulis sedang mengajak kita untuk tidak menjadi penonton. Ini penting. Sebab salah satu penyakit intelektual yang sering menjangkiti bangsa-bangsa pascakolonial adalah kebiasaan membaca dunia dari pinggir. Kita sering merasa bahwa arah sejarah ditentukan oleh Washington, Beijing, Moskow, Brussel, atau Tel Aviv. Kita seakan-akan hanya menunggu dampaknya sampai ke Jakarta, Banda Aceh, Kuala Lumpur, Manila, atau kawasan Asia Tenggara lainnya. Padahal, sejarah Nusantara menunjukkan hal yang sebaliknya. Kita pernah menjadi simpul. Kita pernah menjadi pusat arus. Kita pernah menjadi bagian dari jaringan besar perdagangan, kebudayaan, dan peradaban dunia. Karena itu, pertanyaan besar yang diajukan buku ini bukan semata: apa yang sedang terjadi di dunia? Pertanyaan yang lebih dalam adalah: di mana posisi Indonesia dalam dunia yang sedang berubah itu?

Buku ini timely, sangat tepat waktu, karena ia hadir ketika geopolitik global sedang memasuki fase yang tidak sederhana. Dunia tidak lagi sepenuhnya unipolar

sebagaimana terjadi setelah Perang Dingin. Amerika Serikat masih kuat, tetapi tidak lagi sendirian menentukan irama dunia. China bangkit dengan kepercayaan diri ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan proyek konektivitas globalnya. Rusia kembali menunjukkan bahwa kekuatan lama tidak pernah benar-benar hilang dari panggung sejarah. Timur Tengah tetap menjadi laboratorium konflik, energi, agama, militer, dan diplomasi global. Iran muncul bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai sistem politik-peradaban yang memiliki daya tahan ideologis. ASEAN berada di tengah tekanan Indo-Pasifik. Laut Cina Selatan menjadi ruang rawan yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi panggung benturan besar. Di tengah semua itu, Indonesia harus memilih: menjadi bangsa yang membaca peta atau bangsa yang hanya dibaca oleh kekuatan lain.

Hal penting dalam buku ini adalah keberanian penulis melihat geopolitik sebagai pertarungan narasi. Judul buku ini sendiri sudah memberi petunjuk: geo-politik, narasi, kendali. Tiga kata ini tidak berdiri sendiri. Geopolitik adalah soal ruang, kekuasaan, sumber daya, jalur, kawasan, dan posisi. Narasi adalah soal siapa yang berhak menjelaskan dunia, siapa yang dianggap benar, siapa yang disebut ancaman, siapa yang disebut pembela demokrasi, siapa yang disebut teroris, siapa yang disebut mitra strategis, dan siapa yang disebut pengganggu stabilitas. Kendali adalah hasil dari keduanya. Siapa yang mampu menguasai ruang dan narasi, ia akan mengen-dalikan arah sejarah. Karena itu, perang modern tidak hanya memperebutkan wilayah. Ia memperebutkan makna. Tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga membentuk persepsi. Tidak hanya menekan negara melalui militer, tetapi juga melalui sanksi, lembaga

internasional, pasar, media, teknologi, dan bahasa moral yang sering kali tidak netral.

Di sinilah buku ini menjadi penting. Penulis berusaha memperlihatkan bahwa dunia kontemporer tidak bisa dibaca hanya melalui peta politik formal. Di atas kertas, semua negara tampak berdaulat. Ada bendera, konstitusi, pemerintahan, wilayah, dan pengakuan internasional. Tetapi dalam praktiknya, kedaulatan sering kali dikurangi, ditekan, dinegosiasikan, bahkan dilucuti melalui instrumen yang jauh lebih halus daripada kolonialisme lama. Negara dapat tetap memiliki simbol kedaulatan, tetapi kehilangan kendali atas ekonomi, data, pangan, energi, teknologi, dan arah kebijakan strategisnya. Penulis menangkap gejala ini dengan cukup tajam ketika membahas ilusi kedaulatan di tengah dunia multipolar. Ini adalah salah satu titik tekan penting buku ini: bahwa kedaulatan abad ke-21 tidak cukup dijaga dengan bendera dan lagu kebangsaan. Ia harus dijaga dengan daya pikir, daya produksi, teknologi, diplomasi, kepemimpinan, dan kemampuan membaca arah kekuasaan global.

Buku ini juga menarik karena penulis tidak membahas geopolitik global dengan melepaskan Indonesia dari sejarahnya sendiri. Ia justru mengembalikan Indonesia kepada memori peradabannya. Dalam esai tentang Make Indonesia Great Again, misalnya, penulis mengingatkan bahwa Indonesia bukan bangsa tanpa akar. Kita memiliki warisan kebudayaan, sumber daya alam, sejarah maritim, ingatan Majapahit, Singasari, Cakrawala Mandala, La Galigo, Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, dan pidato Soekarno di PBB. Semua ini bukan sekadar romantisme sejarah. Ini adalah bahan bakar imajinasi geopolitik. Bangsa yang lupa pada sejarahnya akan mudah

menerima posisi rendah dalam sistem dunia. Bangsa yang kehilangan memori akan mudah percaya bahwa masa depannya harus selalu ditentukan oleh pihak luar. Karena itu, penulis menempatkan sejarah bukan sebagai museum, tetapi sebagai alat navigasi.

Saya kira inilah salah satu kontribusi penting Muhammad Suryadi R dalam buku ini. Ia membaca geopolitik bukan hanya dari sudut kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari sudut kesadaran sejarah. Bagi penulis, Indonesia harus memahami dirinya sebelum memahami dunia. Sebab tanpa pengenalan diri, diplomasi akan berubah menjadi reaksi. Tanpa kesadaran sejarah, politik luar negeri hanya menjadi administrasi hubungan internasional. Tanpa visi peradaban, kekayaan alam hanya akan menjadi komoditas yang diperebutkan. Dan tanpa keberanian moral, prinsip bebas aktif hanya akan menjadi kalimat indah yang diulang dalam pidato resmi, tetapi kehilangan tenaga dalam praktik.

Bagian lain yang kuat dalam buku ini adalah pembacaan penulis terhadap dunia pasca-Amerika dan kebangkitan China. Penulis tidak jatuh pada sikap anti-Amerika yang simplistis, juga tidak terpesona secara buta pada China. Ia membaca pergeseran kekuasaan global sebagai proses yang ambivalen. Amerika memang tidak lagi menjadi pusat tunggal. Tetapi melemahnya dominasi Amerika tidak otomatis melahirkan dunia yang lebih adil. China memang menawarkan alternatif konektivitas, infrastruktur, dan pembangunan, terutama bagi negara-negara Global South. Tetapi kebangkitan China juga harus dibaca secara kritis: apakah ia membuka jalan menuju dunia yang lebih seimbang, atau hanya memindahkan pusat ketergantungan dari Barat ke Timur? Pertanyaan ini

penting, karena sejarah menunjukkan bahwa pergantian aktor dominan tidak selalu berarti perubahan struktur ketidakadilan.

Di sini penulis memperlihatkan kedewasaan analitis. Ia tidak membaca dunia secara hitam putih. Ia tidak mengatakan bahwa Barat selalu salah dan Timur selalu benar. Ia tidak menjadikan Amerika sebagai satu-satunya sumber masalah, atau China sebagai jawaban final. Yang ia tekankan adalah perlunya Global South, termasuk Indonesia, membangun daya tawar sendiri. Dunia pasca-Amerika hanya akan bermakna jika bangsa-bangsa yang pernah dijajah tidak sekadar berpindah patron. Jika ketergantungan kepada Washington diganti dengan ketergantungan kepada Beijing, maka dunia baru yang dibayangkan Soekarno tidak pernah lahir. Yang terjadi hanyalah pergeseran pusat dominasi. Karena itu, buku ini mengandung pesan yang sangat jelas: kemandirian adalah syarat dasar martabat geopolitik.

Penulis juga memberi perhatian besar pada ASEAN. Ini patut diapresiasi. Dalam banyak diskusi geopolitik, ASEAN sering dianggap terlalu lamban, terlalu berhati-hati, terlalu normatif, dan kurang memiliki daya paksa. Tetapi penulis melihat ASEAN dari sudut yang lebih strategis. Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China, ASEAN justru memiliki nilai karena ia tidak lahir sebagai blok militer. Ia lahir dari pengalaman kawasan yang rentan, beragam, dan berkali-kali menjadi arena kepentingan kekuatan luar. Prinsip non-intervensi, musyawarah, konsensus, dan keseimbangan yang sering dikritik sebagai kelemahan, dalam konteks tertentu justru menjadi mekanisme bertahan. Bagi Indonesia, ASEAN bukan halaman belakang. ASEAN adalah panggung pertama bagi

kepemimpinan regional. Jika Indonesia gagal membaca ASEAN sebagai ruang strategis, maka Indonesia akan kehilangan pijakan sebelum berbicara di panggung global yang lebih luas.

Dalam konteks ini, gagasan penulis tentang repositioning Indonesia di ASEAN menjadi relevan. Indonesia tidak cukup hanya disebut sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Besar secara demografis dan geografis belum tentu besar secara strategis. Kepemimpinan tidak lahir otomatis dari luas wilayah atau jumlah penduduk. Ia harus dibangun melalui kualitas diplomasi, kekuatan ekonomi, penguasaan teknologi, stabilitas politik, kualitas pendidikan, kemampuan industri, dan kredibilitas moral. Penulis mengingatkan bahwa Indonesia harus bergerak dari sekadar natural leader menuju agenda setter. Ini adalah gagasan yang penting. Sebab dalam dunia multipolar, negara yang tidak memiliki agenda akan menjadi bagian dari agenda orang lain.

Buku ini juga menarik karena menghubungkan geopolitik dengan pendidikan, STEM, teknologi, dan riset. Ini penting karena terlalu sering kita membicarakan geopolitik seolah-olah hanya urusan perbatasan, kapal perang, pidato presiden, atau forum diplomatik. Padahal geopolitik abad ke-21 juga ditentukan oleh laboratorium, universitas, pusat data, semikonduktor, energi baru, kecerdasan buatan, baterai, bioteknologi, dan kemampuan negara menciptakan nilai tambah. Negara yang kaya sumber daya tetapi miskin teknologi akan selalu berada pada posisi rawan. Ia dibutuhkan, tetapi tidak dihormati. Ia diperebutkan, tetapi tidak selalu berdaulat. Ia menjadi sumber bahan mentah, tetapi bukan pengendali rantai nilai. Karena itu, ketika penulis menyinggung hilirisasi,

industri strategis, transisi energi, dan kedaulatan teknologi, ia sebenarnya sedang membawa diskusi geopolitik ke jantung persoalan pembangunan nasional.

Salah satu bagian yang saya anggap paling menarik adalah ketika penulis membahas "arus balik" dan kutukan jalur rempah. Di sini terlihat kemampuan penulis menghubungkan sejarah maritim Nusantara dengan struktur ketergantungan modern. Jalur rempah bukan sekadar kisah romantik tentang pala, cengkeh, lada, kapal, dan pelabuhan. Ia adalah sejarah awal bagaimana kekayaan alam dapat berubah menjadi alasan penaklukan. Nusantara dahulu didatangi karena penting. Tetapi justru karena penting itulah ia kemudian dikuasai. Kekayaan yang semestinya menjadi sumber kedaulatan berubah menjadi magnet kolonialisme. Inilah ironi besar bangsa-bangsa kaya sumber daya: mereka sering kali tidak miskin karena tidak memiliki apa-apa, tetapi karena terlalu lama tidak dibiarkan menguasai apa yang mereka miliki.

Refleksi semacam ini sangat penting bagi Indonesia hari ini. Sebab komoditas telah berubah, tetapi logikanya sering kali tetap sama. Rempah telah berganti menjadi batu bara, minyak, gas, nikel, sawit, mineral kritis, data, jalur laut, dan posisi geostrategis. Dunia kembali membutuhkan Indonesia. Tetapi pertanyaannya: apakah kebutuhan dunia terhadap Indonesia akan memperkuat kedaulatan kita, atau justru memperbarui ketergantungan kita dalam bentuk baru? Jika hilirisasi hanya berarti memindahkan sebagian proses produksi ke dalam negeri tanpa penguasaan teknologi, maka kita belum sepenuhnya keluar dari pola lama. Jika investasi asing hanya menjadikan Indonesia sebagai lokasi produksi murah, sementara kendali pasar, teknologi, dan desain industri

berada di luar, maka kita hanya mengalami kolonialisme yang lebih sopan bahasanya.

Di sinilah buku ini memberi peringatan penting. Indonesia tidak boleh hanya puas menjadi penting. Banyak bangsa penting dalam sejarah, tetapi tetap tidak berkuasa atas dirinya. Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pengakuan bahwa ia strategis, melainkan kemampuan mengubah posisi strategis menjadi daya tawar. Letak geografis harus menjadi kendali atas jalur. Kekayaan alam harus menjadi basis industrialisasi. Kebudayaan harus menjadi soft power. Pendidikan harus menjadi mesin transformasi. Diplomasi harus menjadi alat memperluas ruang gerak, bukan sekadar seni menjaga hubungan baik. Dan sejarah harus menjadi sumber keberanian, bukan sekadar bahan upacara.

Buku ini juga tidak menghindari kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pembahasan mengenai Board of Peace dan politik bebas aktif, penulis berbicara dengan nada yang tegas. Mungkin sebagian pembaca akan menganggapnya keras. Tetapi saya kira, dalam tradisi intelektual yang sehat, kritik semacam ini diperlukan. Politik luar negeri bebas aktif memang tidak boleh diperlakukan sebagai mantra. Ia harus diuji dalam praktik. Bebas aktif bukan berarti bebas tanpa arah, dan aktif tanpa kalkulasi. Bebas aktif adalah keberanian menjaga jarak dari dominasi kekuatan besar, sekaligus kemampuan mengambil peran aktif dalam membangun perdamaian dan keadilan global. Jika prinsip ini hanya diucapkan tetapi tidak diterjemahkan dalam strategi, maka ia akan kehilangan wibawa.

Penulis tampaknya ingin mengingatkan bahwa warisan Soekarno dalam politik luar negeri bukan sekadar

kenangan heroik. Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, dan pidato To Build the World Anew adalah ekspresi dari keberanian bangsa muda yang menolak tunduk pada arsitektur dunia yang timpang. Indonesia ketika itu tidak kaya seperti negara industri, tidak memiliki militer sebesar kekuatan adidaya, tetapi memiliki keberanian moral dan visi sejarah. Hari ini, ketika Indonesia jauh lebih besar secara ekonomi, demografis, dan diplomatik, pertanyaannya justru menjadi lebih tajam: apakah kita masih memiliki keberanian moral itu? Atau kita hanya mewarisi simbolnya tanpa tenaga intelektual dan politiknya?

Buku ini menjadi penting karena menghidupkan kembali pertanyaan tersebut. Ia tidak membiarkan pembaca nyaman dengan jawaban-jawaban normatif. Penulis menempatkan Indonesia dalam situasi yang menuntut kecermatan. Di satu sisi, Indonesia harus menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, China, Rusia, dunia Islam, Eropa, ASEAN, dan Global South. Di sisi lain, Indonesia tidak boleh kehilangan otonomi strategis. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi, pasar, teknologi, dan kerja sama. Di sisi lain, Indonesia tidak boleh menjual kedaulatan kebijakan. Di satu sisi, dunia multipolar memberi peluang manuver. Di sisi lain, multipolaritas juga dapat menyeret negara menengah ke dalam tekanan baru. Inilah dilema yang harus dibaca dengan kepala dingin dan keberanian.

Saya juga melihat bahwa buku ini memberi ruang cukup besar bagi pembacaan terhadap Iran, Amerika Serikat, China, dan Asia Tenggara. Tema-tema ini memperlihatkan bahwa penulis mengikuti denyut peristiwa global yang sedang berlangsung. Namun yang lebih penting, ia mencoba menempatkan peristiwa-peristiwa itu

dalam kerangka yang lebih luas. Iran, misalnya, tidak hanya dibaca sebagai negara yang sedang berkonflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia dibaca sebagai formasi politik-peradaban yang memiliki memori, ideologi, daya tahan, dan struktur sosial tertentu. Amerika Serikat tidak hanya dibaca sebagai negara adidaya, tetapi sebagai kekuatan yang sedang mengalami krisis legitimasi moral. China tidak hanya dibaca sebagai mesin ekonomi, tetapi sebagai proyek peradaban dan kekuasaan yang sedang menguji tatanan dunia. Asia Tenggara tidak hanya dibaca sebagai kawasan kecil di antara kekuatan besar, tetapi sebagai ruang yang memiliki pengalaman panjang dalam merangkul keragaman dan mengelola keseimbangan.

Dengan cara itu, penulis menawarkan semacam peta intelektual. Peta ini tentu tidak sempurna. Tidak ada buku geopolitik yang dapat merangkum seluruh kompleksitas dunia secara tuntas. Tetapi buku ini memiliki keberanian untuk menyusun hubungan antara peristiwa dan gagasan. Ia membantu pembaca awam memahami mengapa perang di Timur Tengah dapat berkaitan dengan masa depan Asia. Mengapa Laut Cina Selatan bukan sekadar soal garis batas laut, tetapi soal tatanan Indo-Pasifik. Mengapa kebangkitan China tidak dapat dilepaskan dari kegelisahan Amerika. Mengapa ASEAN penting bagi Indonesia. Mengapa sejarah Jalur Rempah masih berbicara kepada nikel, energi, dan industri hari ini. Mengapa narasi demokrasi, perdamaian, dan keamanan global sering kali perlu dibaca dengan curiga, sebab di balik bahasa moral kerap bekerja kepentingan kekuasaan.

Saya ingin memberi titik tekan bahwa buku ini penting dibaca terutama oleh generasi muda, mahasiswa, aktivis, dosen, peneliti, jurnalis, pembuat kebijakan, dan

siapa pun yang ingin memahami geopolitik tanpa kehilangan konteks Indonesia. Kita membutuhkan lebih banyak karya yang mampu menjembatani peristiwa global dengan kesadaran lokal. Kita membutuhkan tulisan yang tidak membuat pembaca merasa jauh dari dunia, tetapi justru menyadarkan bahwa dunia selalu hadir dalam kehidupan kita. Harga pangan, energi, teknologi, keamanan data, konflik kawasan, investasi, pendidikan, bahkan arah pembangunan nasional, semuanya terkait dengan dinamika global. Karena itu, ketidaktahuan geopolitik bukan lagi kekurangan intelektual biasa. Ia dapat menjadi kerentanan bangsa.

Kontribusi Muhammad Suryadi R melalui buku ini terletak pada keberaniannya menyederhanakan persoalan besar tanpa meremehkannya. Ia tidak menulis dengan gaya akademik yang kaku, tetapi juga tidak menjadikan isu global sebagai obrolan ringan tanpa kedalaman. Ia memilih bentuk esai, dan pilihan ini tepat. Esai memberi ruang bagi analisis, refleksi, kritik, dan gaya bahasa yang lebih hidup. Melalui esai, penulis dapat bergerak dari Soekarno ke China, dari Pramoedya ke Jalur Rempah, dari Trump ke Iran, dari ASEAN ke masa depan dunia, tanpa kehilangan benang merah. Benang merah itu adalah pencarian atas posisi, martabat, dan kedaulatan dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh narasi dan kekuatan besar.

Tentu, setiap buku adalah undangan untuk berdialog, bukan teks suci yang harus diterima sepenuhnya. Pembaca boleh setuju, boleh berbeda, boleh mempertanyakan data, pendekatan, atau penekanan tertentu. Justru di situlah nilai sebuah buku. Buku yang baik bukan hanya memberi jawaban, tetapi memaksa pembaca mengajukan

pertanyaan yang lebih baik. Saya kira buku ini memiliki kualitas tersebut. Ia membuka ruang debat tentang arah politik luar negeri Indonesia, masa depan ASEAN, makna kedaulatan, posisi Global South, kebangkitan China, krisis Amerika, dan perang narasi dalam tatanan global. Dalam iklim intelektual yang sering kali dangkal dan cepat puas dengan slogan, buku seperti ini perlu disambut.

Pada akhirnya, saya melihat Geopolitik, Narasi, Kendali sebagai karya yang lahir dari kegelisahan. Kegelisahan melihat dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Kegelisahan melihat Indonesia yang memiliki modal besar, tetapi belum selalu mampu mengubah modal itu menjadi kekuatan strategis. Kegelisahan melihat politik luar negeri yang sering mengulang istilah besar, tetapi tidak selalu diikuti ketajaman arah. Kegelisahan melihat generasi muda yang hidup dalam dunia digital global, tetapi belum tentu memiliki peta untuk memahami arus kekuasaan di balik informasi yang mereka konsumsi setiap hari. Dari kegelisahan itulah buku ini memperoleh tenaga.

Saya menyambut baik penerbitan buku ini. Semoga ia menjadi bahan baca, bahan diskusi, dan bahan renungan. Semoga ia mendorong pembaca untuk melihat dunia dengan lebih jernih, tidak mudah terpesona oleh kekuatan besar, tidak mudah takut pada perubahan, dan tidak mudah menerima narasi dominan tanpa pemeriksaan kritis. Lebih dari itu, semoga buku ini mengingatkan kita bahwa Indonesia tidak ditakdirkan menjadi penggiran. Bangsa ini memiliki sejarah, ruang, sumber daya, kebudayaan, dan pengalaman diplomatik untuk memainkan peran yang lebih besar. Tetapi peran besar tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan melalui pengetahuan, keberanian, disiplin, dan visi.

Dunia sedang berubah. Peta lama retak. Hegemoni lama belum sepenuhnya mati. Kekuatan baru belum tentu lebih adil. Perang dapat berpindah kawasan. Narasi dapat mengubah korban menjadi tersangka dan agresor menjadi penyelamat. Kedaulatan dapat dikurangi tanpa invasi. Dalam situasi seperti itu, membaca adalah bentuk kewaspadaan. Berpikir adalah bentuk pertahanan. Dan menulis, sebagaimana dilakukan penulis buku ini, adalah bagian dari usaha kecil tetapi penting untuk merebut kembali cara kita memahami dunia.

Darussalam, Banda Aceh, 13 Mei 2026

Daftar Isi

Testimoni.....v

Sambutan-Sambutan.....ix

Kata Pengantar.....xvii

Daftar Isi.....xxxi

Make Indonesia Great Again 1

Politik Bebas Aktif Yang Main Zig-Zag 9

To Build The World Anew: Pesan Untuk Kegagalan Tatanan Dunia Modern.....15

Peta Dunia Yang Retak: Ilusi Kedaulatan Di Tengah Dunia Multipolar.....23

Membangun Dunia Baru: Proyek Dunia Pasca-Amerika Di Tengah Kebangkitan China 29

Arus Balik Dari Sebuah Negeri Yang Tidak Dibiarkan Berkuasa 37

Trump Dan Matinya Amerika Serikat.....45

Board Of Peace Dan Matinya Politik Bebas Aktif Indonesia.....53

Repositioning Indonesia Di Asean: Dari Kesadaran Sejarah Menuju Kekuatan Dunia 61

Iran Melampaui Dekolonisasi.....69

Kepemimpinan Geokulutural.....77

Iran Dan Bayang-Bayang Armageddon 83
What It Takes Asia Tenggara: Pandangan Seorang Asia Tenggara 91
Bagaimana "Masa Depan Dunia" 103
Memahami Peradaban Yang Lahir Dari Sungai Kuning 117

Referensi……135
Profil Penulis……137


Make Indonesia
Great Again

Sebagai negara besar, Indonesia memiliki potensi dan kekayaan luar biasa. Kekayaan itu bisa kita lihat dari ragam kebudayaan yang ada. Bahkan, beberapa di antaranya telah diakui UNESCO sebagai warisan Kebudayaan Tak Benda. Sebut saja, Wayang, Keris, Batik, Angklung, Tari Saman, Noken, Kapal Pinisi, Pencak Silat, Pantun, Gamelan dan terakhir Jamu Sehat.

Selain kebudayaan, kekayaan Indonesia berasal dari sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Dari sektor batubara, Indonesia berada pada urutan ketiga teratas dari 10 negara produsen batu bara terbesar di dunia. Jumlah pengerukan batu bara tahun 2023 sebanyak 563,73 ton. Sedangkan, dari sektor minyak, Indonesia memproduksi dapat minyak 845 ribu barel per hari.

Sebaran cadangan minyak terbesar Indonesia tersebar di beberapa pulau penghasil terbesar, yakni; Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Begitu pun kekayaan dengan gas alam Indonesia. Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM), jumlah cadangan gas alam Indonesia per Mei tahun 2023 yaitu 54,83 triliun kaki kubik (TCF).

Warisan kebudayaan dan sumber daya alam yang melimpah ruah yang dimiliki seharusnya menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kekayaan-kekayaan yang dimiliki adalah *Brand Ambassador* yang dapat menguatkan posisi Indonesia di mata dunia. Kendati demikian, kekayaan alam dan warisan kebudayaan saja belumlah cukup. Keduanya harus ditajamkan lewat instrumen lain seperti pendidikan sejarah.

Akar Peradaban yang Kokoh

Jika menilik kembali periodisasi Indonesia dalam lintasan sejarah, kita akan temukan betapa kuatnya pondasi kebangsaan kita sejak dulu. Pertama-tama, mau tak mau, mempelajari sejarah adalah koentji. Dalam banyak catatan, nama Indonesia secara antropologi diakui pertama kali dipopulerkan oleh Adolf Sebastian sebagai nama identitas bangsa ini, baik secara geografis dan politik.

Nama Indonesia yang diadopsi Sebastian adalah nama "Indunesian" yang sebelumnya telah disebut oleh George Samuel Windsor Earl dan dipungut kembali oleh James Richardson Logan hingga akhirnya dipopulerkan oleh Adolf Sebastian.

Indonesia secara geografis adalah wilayah yang membentang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kendati, penyatuan secara geografis ini lemah, karenanya seluruh gugusan pulau mesti dipersatukan secara politik ke dalam satu naungan yang bernama negara dan bangsa Indonesia (nasionalisme).

Soekarno dalam bukunya Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, menjelaskan perihal bangsa. Bahwa nasionalisme bukan hanya bahasa, agama, dan batas-batas wilayah, melainkan sebuah itikad bersama, keinginan menjadi satu tanpa mengecilkan satu golongan dan keinginan hidup menjadi satu.

Dalam catatan sejarah pra-modern, terutama dalam catatan Kerajaan Majapahit, kira-kira abad ke-14 M, kepulauan yang kita sebut Indonesia saat ini dulunya merupakan wilayah yang memiliki kekuasaan yang membentang dari semenanjung Malaya hingga ke Asia Tenggara.

Dalam catatan Yudi Latief dalam bukunya Negara Paripurna, menyebutkan bahwa Nusantara yang merupakan nama wilayah kekuasaan era Majapahit ini adalah kerajaan laut terbesar diantara bangsa-bangsa di dunia dan ditakuti oleh pelaut-pelaut asing.

Nusantara kala itu bukan hanya kekuatan darat, tetapi juga kekuatan laut, yang bergerak dari selatan ke utara yang mengikuti naluri atau sistem kerajaan yang bergerak dari bawah ke atas angin bersama cita-cita dan kehidupan masyarakatnya.

Nama Nusantara sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, yang menyebutkan "lawun humus kalah Nusantara isun amukti palapa", artinya "saya tidak akan melepaskan puasa sebelum menaklukkan Nusantara".

Peradaban Nusantara di masa lalu menunjukkan kekokohan peradaban kita. Jauh sebelum peradaban Majapahit, kerajaan Dwipantara pada abad ke-13 yang dipimpin Raja Kertanegara, raja terakhir Singasari, telah lebih dulu memiliki peradaban kuat.

Visi menyatukan wilayah kerajaan Singasari ke dalam satu wilayah kekuasaan maritim yang dikenal dengan sebutan politik Cakrawala Mandala. Kini, visi ini diadopsi menjadi suatu wawasan kebangsaan atau landasan geopolitik Indonesia dengan istilah Cakrawala Mandala Dwipantara.

Selain itu, peradaban bangsa kita tak hanya kuat secara geopolitik, tapi juga besar dengan peradaban literasi. Kita sama-sama mengenal La Galigo, sebuah karya sastra terpanjang di dunia yang mengalahkan Mahabharata, yang berisikan cerita mitologi tentang manusia pertama di muka bumi; To Manurung, yang sekaligus

menandai awal mula peradaban manusia di Tanah Bugis. La Galigo yang ditulis oleh Colliq Pujie ini kini ditetapkan UNESCO sebagai *Memory of The World*.

Kepemimpinan yang Kuat

Gilang gemilang peradaban sejarah di masa lalu adalah wawasan atau alat navigasi kepemimpinan yang kuat untuk masa kini dan di masa mendatang. Warisan peradaban dan sejarah adalah pengetahuan yang sangat berharga untuk dijadikan sebagai fondasi utama dalam mengelola bangsa sebesar Indonesia.

Dokumen sejarah, prasasti, kebudayaan dan warisan lainnya merupakan tiang-tiang penyangga bagi kokohnya sebuah bangsa. Menghadapi problem kebangsaan yang ada di depan mata, faktor kepemimpinan akan sangat mempengaruhi mundur atau majunya sebuah negara.

Karena itu, kepemimpinan sebenarnya bukan hanya tentang keterwakilan di parlemen atau di Dewan Eksekutif, melainkan juga tentang wawasan mendalam, soal kemampuan dan karakter yang kuat. Di masa lalu, Indonesia pernah memiliki pemimpin seperti itu, yakni Soekarno. Di tangannya, Indonesia menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh dunia. Hal itu bermula dari sejumlah pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang diprakarsai oleh Indonesia.

Pada tahun 1955, tepatnya pada 18-24 April, Indonesia menginisiasi pertemuan tingkat tinggi, Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Konferensi ini membicarakan perihal imperialisme dan kolonialisme yang menguat di tengah Perang Dingin yang terjadi antara dua rivalitas ideologi; Blok Barat; Kapitalisme-Liberalisme dan Blok

Timur; Komunisme-Sosialisme, serta mengemukanya Konferensi Gerakan Non-Blok (GNB) yang digagas Soekarno bersama pemimpin negara-negara ketiga.

Selain itu, yang tak kalah penting dan sangat monumental adalah pidato Soekarno pada Sidang Umum PBB di New York tahun 1960, yang dengan lantang dan gagah berani berpidato menyatakan sikap politik Indonesia di hadapan para pemimpin dunia, sistem Polugri (Politik Luar Negeri) dan prinsip Prinsip Bebas-Aktif. Kemudian pidato dengan bertajuk "*To Build The World A New*" Bung Karno ini lantas ditetapkan UNESCO sebagai *Memory of The World* pada tahun 2023.

"*Make Indonesia Great Again*" bukan tidak mungkin. Di bawah langit, semua menjadi mungkin. Di masa lalu, bangsa ini pernah melakukannya. Era kejayaan di masa silam bisa kembali menerangi bumi pertiwi. Sejarah itu bisa berulang dan bisa saja berganti pemain.

Kita kaya dengan sumber daya alam, kita berasal dari gen bangsa yang kuat dan berperadaban tinggi, serta kita memiliki kebudayaan yang tak bisa ditiru oleh bangsa lain. Soal mengapa kita menjadi terkebelakang, jawabannya adalah kita menyisihkan sejarah dan tidak lagi menjadikannya sebagai penghayatan dalam mengarungi arus deras perjalanan bangsa.

Selain itu, sebab mendasar yang dihadapi kepemimpinan bangsa saat ini adalah soal keberanian dan kemandirian. Dua masalah ini adalah prinsip mendasar yang belum mampu diterjemahkan menjadi visi kepemimpinan. Munculnya problem politik, ekonomi, sosial, budaya hingga lingkungan adalah akibat dari kepemimpinan yang belum kuat.

Jargon "*Make Indonesia Great Again*" yang pernah diucapkan Presiden Prabowo pada tahun 2018 adalah optimisme di masa kepemimpinannya saat ini, kendati di masa kepemimpinannya saat ini terdapat gejolak, tapi, kita tentu berharap Presiden Prabowo Subianto bersama visi Astacita-nya bisa melakukannya: Make Indonesia Great Again.



Politik Bebas Aktif Yang Main Zig-Zag

Geopolitik global hari ini bergerak dalam spektrum abu-abu. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok semakin mengeras, Rusia tetap menjadi variabel ketidakpastian, sementara konflik kawasan dan krisis global: energi, pangan, iklim kian saling bertumpuk. Dunia tidak lagi terbagi ke dalam dua blok utama, tetapi terbagi ke dalam lapisan terbelah oleh kepentingan yang saling bertabrakan.

Indonesia tidak berada di luar pusaran ini, Indonesia ada di dalamnya. Sebagai negara dengan posisi geografis yang strategis, ekonomi yang terus tumbuh, dan peran regional yang signifikan, Indonesia dihadapkan pada tekanan geopolitik yang nyata alih-alih menekan kekuatan adidaya. Setiap keputusan politik luar negeri membawa implikasi luas. Dalam konteks inilah politik luar negeri bebas aktif perlu dibaca ulang bukan sebagai doktrin kaku di masa lalu, tetapi sebagai prinsip yang memerlukan seni manuver yang lebih lincah.

Sejarah kebijakan Politik Luar Negeri (Polugri) Bebas aktif Indonesia lahir dari pengalaman historis Indonesia yang menolak dominasi kekuatan besar. Kendati begitu, dunia yang melahirkannya berubah seiring berubahnya dinamika global. Jika dulu bebas aktif berhadapan dengan bipolarisme Perang Dingin, maka hari ini ia harus berhadapan dengan dunia multipolar yang cair dan tidak menentu. Untuk tetap relevan, bebas aktif tidak cukup dijalankan secara lurus. Ia perlu seni zig-zag.

Seni Zig-Zag dan Logika Kucing Deng Xiaoping

Istilah seni main zig-zag sering dianggap peyoratif kalau tidak ingin dikatakan sebagai istilah belaka seolah menggambarkan ketidakkonsistenan. Tetapi dalam geo-

politik modern, zig-zag justru merupakan bentuk seni bermanuver. Dunia hari ini tidak memberi ruang bagi negara *middle* bersikap kaku. Tekanan untuk memilih kubu datang bersamaan dengan kebutuhan menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan strategis nasional.

Pada titik ini, pemikiran Deng Xiaoping menjadi relevan. Ungkapannya tentang kucing hitam atau putih yang penting bisa menangkap tikus mencerminkan pragmatisme yang berorientasi hasil. Dalam kebijakan luar negeri, pertanyaan utamanya bukan siapa kawan ideologis, tetapi apakah kebijakan tersebut memberi manfaat nyata bagi negara.

Politik luar negeri bebas aktif yang main zig-zag bekerja dengan logika ini. Indonesia membuka kerja sama seluas mungkin, tetapi tetap menjaga jarak strategis. Hubungan dijaga, tekanan dikelola, dan kepentingan dinegosiasikan. Zig-zag menjadi cara membaca momentum global, kapan harus mendekat, kapan harus menjaga jarak, kapan harus berbicara lantang, dan kapan memilih diam.

Namun zig-zag bukan tanpa risiko. Pragmatisme yang berlebihan dapat menggerus kredibilitas dan kepercayaan. Sebab itu, zig-zag harus tetap berpijak pada prinsip dasar, yakni kedaulatan, kepentingan nasional jangka panjang, dan stabilitas kawasan. Tanpa kompas yang jelas, zig-zag bisa berubah menjadi prinsip yang tidak jelas.

ASEAN sebagai Arena Uji Bebas Aktif

Peran Indonesia dalam geopolitik dunia hari ini tidak bisa dilepaskan dari ASEAN. Asia Tenggara telah

menjadi salah satu medan utama perebutan pengaruh global. Jalur perdagangan strategis, sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi kawasan menjadikan ASEAN sebagai pusat perhatian kekuatan besar. Dalam situasi ini, ASEAN bisa menjadi kekuatan kolektif sekaligus berubah medan perebutan.

Indonesia memiliki posisi yang relatif kuat di kawasan ASEAN. Secara geografis, Indonesia menguasai jalur maritim vital. Secara ekonomi dan demografis, Indonesia adalah kekuatan terbesar di kawasan. Secara politik, Indonesia dipandang dunia sebagai jangkar stabilitas regional. Modal ini memberi Indonesia ruang untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti.

Politik luar negeri bebas aktif yang main zig-zag menemukan panggungnya yang real di ASEAN. Indonesia tentunya berkepentingan menjaga ASEAN *centrality* agar kawasan tetap menjadi subjek geopolitik, bukan objek geopolitik. Seni zig-zag Indonesia terlihat dalam upaya menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan besar, sambil memastikan ASEAN tidak terjebak dalam rivalitas para adidaya.

Namun kepemimpinan ini tidak otomatis. ASEAN adalah organisasi beragam dengan kepentingan nasional yang berbeda-beda. Tantangan Indonesia adalah menjaga konsistensi di tingkat kawasan, meskipun harus berzig-zag di tingkat global. Poinnya adalah negosiasi dan peran diplomasi yang kuat. Di sinilah keseimbangan itu diuji, bagaimana tetap fleksibel tanpa kehilangan arah kepemimpinan.

Bebas Aktif sebagai Kompas Masa Depan

Di masa depan, dunia tidak akan menjadi lebih sederhana. Fragmentasi ekonomi global, perang teknologi, dan krisis iklim akan semakin memperumit peta geo-politik. Dalam kondisi seperti ini, politik luar negeri Indonesia harus bergerak dari sekadar reaktif menuju proaktif. Bebas aktif perlu dipahami sebagai strategi jangka panjang, bukan respons sesaat.

Zig-zag bukan tujuan akhir, melainkan strategi dan metodologi. Seperti kucing Deng Xiaoping, yang diuji bukan dari warna, tetapi hasilnya. Kebijakan luar negeri Indonesia perlu terus dievaluasi, apakah zig-zag ini memperkuat posisi Indonesia di ASEAN? Apakah ia memberi ruang bagi kepentingan nasional untuk tumbuh? Apakah dengan polugri zig-zag meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat global?

Sebab itu, kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang perlu main zig-zag adalah refleksi kenyataan strategis. Dalam dunia yang tidak lagi hitam-putih, kemampuan berbelok tanpa kehilangan tujuan adalah kekuatan. Indonesia tidak harus memilih satu sisi untuk tetap berdaulat. Yang dibutuhkan adalah manuver terarah, konsistensi nilai, dan visi jauh ke depan. Dunia berubah cepat, dan hanya negara yang mampu membaca arah angin yang akan bertahan dan pada gilirannya akan mempengaruhi arah perjalanan bangsa itu sendiri.

To Build The World Anew: Pesan Untuk Kegagalan Tatanan Dunia Modern

Dunia abad ke-21 sering dipromosikan sebagai dunia paling maju dalam sejarah manusia. Teknologi berkembang pesat, konektivitas lintas benua terjadi dalam hitungan detik, dan pengetahuan seolah tak lagi memiliki batas. Tetapi di balik semua itu, dunia justru terasa semakin terbelah. Perang tidak berhenti, ketimpangan melebar, dan rasa saling percaya antarbangsa semakin menipis. Alih-alih membangun dunia baru, umat manusia justru sibuk membangun dan memperkuat kubu masing-masing.

Pidato Sukarno, To Build the World Anew, 66 tahun yang lalu kembali menemukan relevansinya. Disampaikan di pertengahan abad ke-20, pidato itu bukan sekadar seruan politik, melainkan kritik moral terhadap tatanan dunia yang dibangun di atas dominasi dan ketakutan. Apa yang dikatakan Sukarno benar. Bahwa dunia yang dikritiknya tidak benar-benar pergi, ia hanya berganti bentuk.

Kala Perang Dingin berakhir, dunia seolah dijanjikan masa depan yang lebih damai. Runtuhnya tembok Berlin dianggap sebagai simbol berakhirnya politik blok dan politik aliansi. Faktanya tidak demikian. Sejarah rupanya bergerak dengan cara yang tidak linear. Hari ini kita menyaksikan sama-sama, politik blok kembali hadir bukan lagi dalam bentuk ideologi yang kaku, melainkan dalam aliansi strategis yang cair namun agresif.

The AUKUS, The QUAD, NATO, SCO, hingga BRICS merupakan tanda bahwa dunia kembali diorganisasi berdasarkan logika kawan dan lawan. Perbedaannya adalah, jika dulu dunia terbelah secara bipolar, kini terfragmentasi secara multipolar. Tetapi kemudian fragmentasi ini tidak otomatis menghadirkan keseimbangan.

Justru sebaliknya, ia menciptakan ketidakpastian yang lebih kompleks.

Sukarno sejak awal mengkritik dunia yang dibangun di atas ketakutan. Dalam pidatonya, ia menolak logika bahwa keamanan hanya bisa dicapai melalui kekuatan militer dan aliansi eksklusif. Baginya, dunia lama adalah dunia yang memproduksi konflik dengan dalih stabilitas. Dunia baru yang ia bayangkan justru menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai fondasi.

Aliansi dan Krisis Kepercayaan

Munculnya aliansi-aliansi strategis hari ini sesungguhnya adalah gejala krisis kepercayaan global. AUKUS, misalnya, dibentuk atas nama keamanan Indo-Pasifik. Tetapi di balik retorika stabilitas itu, ia justru mempercepat perlombaan senjata dan meningkatkan kecemasan regional. Negara-negara di Asia Tenggara yang tidak dilibatkan dalam pembentukan aliansi tersebut justru berada di posisi paling rentan terkena dampak.

The QUAD yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia menampilkan wajah lain dari politik aliansi modern. Ia tidak secara formal disebut sebagai pakta militer, tetapi pesan geopolitiknya jelas bahwa keberadaannya menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. Dunia kembali menyerupai papan catur, di mana kekuatan besar mengatur langkah, sementara negara-negara lain harus menyesuaikan diri agar tidak tergilas.

Di sisi lain, Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan BRICS muncul sebagai respons terhadap dominasi Barat. SCO menawarkan kerja sama keamanan dan politik di kawasan Eurasia, sementara BRICS menjanjikan

alternatif ekonomi global yang lebih inklusif. Kendati begitu, pertanyaannya tetap sama; apakah aliansi ini sungguh membangun dunia baru atau hanya memindahkan pusat kekuasaan?

BRICS misalnya, sering dipandang sebagai simbol kebangkitan negara selatan-selatan. Tetapi di dalamnya terdapat perbedaan kepentingan yang tajam. Tanpa fondasi nilai yang kuat, aliansi ini berisiko mereproduksi ketimpangan dalam skala yang berbeda. Dunia baru tidak otomatis lahir hanya karena aktor-aktornya berganti.

Dari Blok Ideologi ke Blok Kepentingan

Jika Perang Dingin adalah pertarungan ideologi, maka geopolitik hari ini adalah pertarungan kepentingan. Aliansi tidak lagi dibangun atas kesamaan nilai universal, melainkan atas persepsi ancaman dan logika jangka pendek. Inilah yang membuat dunia Nampak terlihat cair, tetapi juga sekaligus semakin rapuh.

Dalam konteks inilah, pesan Sukarno menjadi sangat futuristik. Pidatonya tidak sekadar menolak kolonialisme klasik, tetapi juga memperingatkan bahaya dunia yang dikendalikan oleh elite global. To build the world anew berarti membangun tatanan yang tidak menjadikan manusia sebagai korban strategi geopolitik.

Aliansi modern sering kali mengklaim menjaga perdamaian, tetapi justru menciptakan logika yang berbasis ketakutan. Dunia menjadi aman bukan karena saling percaya, melainkan karena saling mengancam. Inilah paradoks keamanan modern yang gagal dipatahkan hingga hari ini.

Negara Berkembang di Tengah Pusaran Blok

Bagi negara selatan-selatan, kebangkitan politik aliansi menciptakan dilema serius. Di satu sisi, mereka membutuhkan kerjasama ekonomi dan keamanan, tetapi lain sisi, keterlibatan dalam blok tertentu berisiko menghancurkan kemandirian politik.

Indonesia, misalnya, berada di persimpangan strategis Indo-Pasifik. Kehadiran AUKUS dan QUAD di kawasan ini menuntut kehati-hatian ekstra. Prinsip politik luar negeri bebas-aktif kembali diuji, apakah ia masih relevan atau justru semakin penting?

Semangat Non-Blok sebagaimana dibayangkan Sukarno perlu dimaknai ulang. Non-Blok bukan sikap pasif, tetapi keberanian untuk tidak tunduk pada logika dominasi. Ia adalah cara menjaga otonomi di tengah tekanan global yang semakin halus, namun kuat.

Kepentingan aliansi abad ke-21 saat ini sudah beroperasi ke ranah yang paling mutakhir, yakni beroperasi di ranah militer dan ekonomi, tetapi juga di ranah teknologi. Perlombaan kecerdasan buatan, kontrol data, dan dominasi platform digital menciptakan bentuk baru kolonialisme-kolonialisme data. Negara yang menguasai teknologi mengendalikan masa depan.

Dalam dunia seperti ini, ketimpangan tidak hanya soal senjata dan uang, tetapi juga soal akses informasi dan kemampuan inovasi. Sukarno mungkin tidak membayangkan dunia digital seperti hari ini, tetapi kritiknya terhadap ketimpangan struktural tetap kuat dan relevan. Dunia baru tidak akan lahir jika teknologi hanya memperkuat hierarki lama.

Membangun Dunia Anew di Tengah Fragmentasi

Terakhir, pertanyaan mendasarnya kini adalah mungkinkah membangun dunia baru di tengah fragmentasi global? Jawabannya bergantung pada keberanian moral kolektif. Dunia baru tidak bisa dibangun di atas paranoia dan eksklusivitas, tetapi membutuhkan multilateralisme sejati, reformasi lembaga global, dan keberpihakan pada keamanan manusia, tidak sekadar keamanan negara.

Menurut penulis, aliansi tetap dibutuhkan, tetapi tidak boleh menjadi tujuan kekuasaan. Aliansi seharusnya menjadi alat sementara untuk mengatasi masalah bersama, bukan sebagai fondasi permanen tatanan dunia. Tanpa perubahan nilai, aliansi hanya akan memperpanjang siklus konflik.

Lebih dari setengah abad setelah Sukarno menyerukan pembangunan dunia baru, umat manusia masih terjebak dalam dilema yang sama, yakni memilih antara kekuasaan dan keadilan. Tatanan dunia modern, dengan segala aliansinya, menunjukkan kegagalan untuk keluar dari logika dunia lama.

To Build the World Anew bukan nostalgia romantik, melainkan peringatan masa depan. Melalui pidatonya, Sukarno mengingatkan bahwa dunia tidak akan berubah hanya karena struktur kekuasaan direorganisasi. Dunia berubah ketika nilai yang menopangnya ikut diperbarui.

Di tengah bangkitnya aliansi global dan fragmentasi geopolitik, pesan Sukarno justru terdengar semakin mendesak bahwa dunia baru hanya mungkin lahir jika manusia, bukan kekuatan, ditempatkan di pusat sejarah. Jika tidak, kita hanya akan membangun ulang dunia lama

dengan alat yang lebih canggih dan kerusakan yang lebih luas.



Peta Dunia Yang Retak: Ilusi Kedaulatan Di Tengah Dunia Multipolar

Peta dunia modern tampak rapi di atas atlas. Garis batas negara jelas, warna-warna wilayah dibedakan dengan jelas, dan nama-nama negara berdiri seolah setara satu sama lain. Tetapi itu di atas kertas. Garis demarkasi itu sesungguhnya tidak nampak dalam konstelasi geopolitik dunia. Dunia yang sesungguhnya tengah mengalami retakan mendalam, dimana retakan tersebut seolah tidak pernah ditambal di masa lalu. Retakan itu bukan semata lahir dari agresi militer, invasi bersenjata, melainkan keretakan konseptual terhadap gagasan paling mendasar dalam hubungan internasional, yakni kedaulatan negara.

Di tengah dunia yang bergerak menuju multi-polaritas mutlak, kedaulatan semakin menyerupai ilusi, dimana kekuasaan dipertahankan dalam wacana, tetapi rapuh dalam praktik. Dalam sejarah, gagasan kedaulatan modern pertama kali lahir dari Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini menandai berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa dan meletakkan fondasi tatanan internasional modern dimana negara berdaulat, setara secara hukum, dan bebas dari intervensi eksternal. Sejak saat itu, dunia internasional dibayangkan sebagai sistem negara-negara yang berdiri sendiri, mengelola urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak lain.

Westphalia bukan sekadar kesepakatan politik, tetapi mitos pendiri dari sistem internasional yang hingga kini masih dijadikan rujukan normatif. *The Westphalia System* lahir dari konteks Eropa abad ke-17: sebuah dunia yang belum mengenal kapitalisme global, teknologi digital, jaringan keuangan lintas negara, dan dominasi kekuatan besar dengan jangkauan global. Ketika prinsip-prinsip itu dipaksakan untuk menjelaskan realitas abad ke-

21, ketegangan tak terhindarkan. Secara formal, setiap negara (masih) berdaulat, tetapi kekuasaan riilnya sering kali dikangkangi oleh pasar global, tekanan geopolitik, sanksi ekonomi, dan intervensi politik terselubung.

Westphalia dan Kerapuhan Kedaulatan Modern

Dalam tatanan internasional kontemporer, prinsip non-intervensi semakin sering ditabrak oleh realitas kekuasaan dan juga arogansi negara adidaya. Negara kuat memiliki kapasitas untuk memengaruhi negara lemah tanpa harus mengerahkan pasukan militer secara langsung. Sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, perang narasi, dan legitimasi internasional menjadi instrumen baru dominasi. Kedaulatan tidak dihancurkan secara frontal, tetapi dikeroposkan secara perlahan. Kasus Venezuela menjadi contoh paling gamblang.

Secara hukum internasional, Venezuela adalah negara berdaulat dengan pemerintahan yang sah. Namun krisis politik dan ekonomi yang melilit negara tersebut menjadikannya sasaran intervensi terbuka dan terselubung dari kekuatan global. Amerika Serikat dan sekutunya, dengan dalih demokrasi dan hak asasi manusia, mengambil posisi aktif dalam menentukan siapa yang layak memerintah Venezuela. Sanksi ekonomi dijatuhkan, akses ke sistem keuangan global dibatasi, dan legitimasi pemerintahan dipersoalkan di forum internasional.

Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok hadir sebagai penyeimbang geopolitik dengan kepentingan strategis dan ekonomi mereka sendiri. Venezuela tidak lagi sepenuhnya menjadi subjek yang menentukan arah politiknya, melainkan objek dalam perebutan pengaruh global. Prinsip Westphalia tentang kedaulatan dan non-intervensi runtuh

di hadapan realpolitik. Negara masih ada, tetapi kehendaknya dibatasi oleh tekanan eksternal yang sistematis.

Hegemoni Lama dan Bayang-Bayang *White Anglo-Saxon Protestant*

Fenomena Venezuela tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan global yang lebih luas, terutama warisan hegemoni Barat. Dalam konteks ini, istilah *White Anglo-Saxon Protestant* (WASP) bukan sekadar penanda identitas etnis atau agama, melainkan simbol dari formasi elite sejarah yang membentuk arah politik, ekonomi, dan budaya Amerika Serikat serta sekutunya. Sejak abad ke-20, nilai-nilai dan kepentingan elite ini terinstitusionalisasi dalam kebijakan luar negeri, lembaga internasional, dan sistem ekonomi global.

Meski dunia kini semakin beragam dan hegemoni tunggal Amerika Serikat mulai terkikis, warisan WASP belum sepenuhnya menghilang. Ia bertahan dalam bentuk standar ganda, narasi universal tentang demokrasi, serta tatanan ekonomi yang menguntungkan pusat-pusat kekuasaan lama. Negara-negara Global South seringkali dipaksa menyesuaikan diri dengan norma global yang tidak lahir dari pengalaman historis mereka sendiri.

Dalam konteks ini, kedaulatan menjadi bersyarat. Negara diakui selama tidak menyimpang dari kepentingan para hegemonik. Ketika menyimpang, legitimasi dipertanyakan dan tekanan diberlakukan. Dunia multipolar memang membuka ruang bagi kekuatan baru, tetapi tidak serta-merta membebaskan negara-negara kecil dan menengah dari bayang-bayang hegemoni lama.

ASEAN, Indonesia, dan Taruhan Dunia Multipolar

Peralihan menuju dunia multipolar menghadirkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, dominasi tunggal melemah. Di sisi lain, persaingan antar-kekuatan besar semakin tajam. Dalam situasi seperti ini, peran kawasan dan negara menengah menjadi kian krusial. ASEAN lahir dari kesadaran historis akan kerentanan negara-negara Asia Tenggara di tengah rivalitas global. Prinsip non-intervensi, konsensus, dan dialog menjadi fondasi utama organisasi ini.

Meski sering dikritik lamban dan normatif, ASEAN justru menawarkan model alternatif dalam mengelola dunia multipolar, yakni menjaga keseimbangan tanpa terjebak dalam blok kekuatan tertentu. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab historis. Politik luar negeri bebas dan aktif bukan sekadar doktrin, melainkan refleksi dari pengalaman terjajah dan kesadaran bahwa kedaulatan hanya dapat dijaga melalui kemandirian sikap.

Tetapi tantangan dunia di masa depan tidak semudah melihat matahari di pagi hari. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, konflik Laut Cina Selatan, serta tekanan ekonomi global menuntut kecermatan dan keberanian diplomasi. Indonesia dan ASEAN harus memastikan diri tidak sekadar menjadi arena perebutan pengaruh, tetapi tampil sebagai aktor yang memiliki agenda dan visi sendiri.

Dalam dunia multipolar, kedaulatan tidak lagi absolut, tetapi juga tidak harus menjadi ilusi. Ia dapat dipertahankan melalui kerja sama regional, diplomasi aktif, dan legitimasi moral. Venezuela menunjukkan bagaimana kedaulatan runtuh ketika negara terisolasi dan

terjebak dalam tekanan global. ASEAN dan Indonesia, sebaliknya, menunjukkan bahwa keseimbangan dan kolektivitas dapat menjadi jalan alternatif.

Peta dunia memang masih digambar dengan garis-garis negara. Hanya saja garis-garis itu semakin kabur maknanya. Kedaulatan tidak benar-benar berdiri sendiri dan hegemoni tidak pernah benar-benar mati, tetapi berganti topeng. Dunia multipolar adalah ruang tarik-menarik antara harapan akan keadilan global dan risiko fragmentasi kekuasaan.

Dunia kini retak karena warisan yang lama. Dunia memang menampilkan wajah baru, tetapi sekaligus merawat kekuatan lama. Retakan ini tidak saja merusak tatanan dunia yang pernah ada, tapi juga mengukuhkan siapa penguasa dunia sesungguhnya. Di tengah retakan itu, Indonesia dan ASEAN dihadapkan pada sebuah pilihan sejarah, apakah menjadi penonton dalam pertarungan besar atau terlibat aktif menulis ulang makna kedaulatan di abad baru tatanan geopolitik kontemporer ini!

Dalam dunia yang semakin multipolaritas ini, dunia mungkin tak lagi utuh, tetapi justru dari sanalah masa depan dunia sedang dipertaruhkan.

Membangun Dunia Baru: Proyek Dunia Pasca-Amerika Dan Kebangkitan China

Dunia di abad ke-21 bergerak kian cepat daripada kemampuan manusia untuk merenungkannya. Inovasi teknologi, kecerdasan buatan, dan konektivitas global menciptakan kesan bahwa umat manusia telah melampaui batas-batas lama sejarah. Di balik kemajuan itu, dunia justru menampakkan kerapuhannya dengan telanjang bulat bahwa perang kembali menjadi bahasa politik, krisis kemanusiaan diperlakukan sebagai gangguan statistik, dan lembaga internasional kehilangan daya moralnya. Kini, kita hidup di zaman ambivalen, dimana dunia semakin terhubung, tetapi empati semakin membelum.

Dalam konteks inilah wacana tentang dunia pasca-amerika menjadi relevan. Amerika Serikat tidak runtuh, tidak pula menghilang dari panggung global. Namun ia tidak lagi menjadi sentral kekuatan tunggal dunia. Meminjam argumen Fareed Zakaria dalam bukunya T*he Post-American World*, yang terjadi adalah perubahan struktur kekuasaan global, yakni bangkitnya aktor-aktor baru, terutama di Asia dan negara Global South, serta melemahnya dominasi tunggal Barat. Dunia tidak lagi unipolar, tetapi multipolar atau bahkan non-polar.

Perubahan ini memunculkan pertanyaan yang lebih fundamental daripada sekadar pertanyaan geopolitik: apakah dunia yang tidak lagi Amerika-sentris akan menjadi dunia yang lebih adil, atau justru lebih kacau? Apakah berakhirnya satu pusat kekuasaan berarti lahirnya tatanan yang lebih manusiawi, atau hanya memunculkan bayang-bayang imperium baru?

Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya bukan hal baru. Lebih dari enam dekade lalu, seorang pemimpin dari negara yang baru merdeka telah mengajukannya di forum

internasional paling bergengsi di dunia. Ia adalah Soekarno.

Soekarno dan Imajinasi Dunia Tanpa Imperium

Pidato Soekarno di Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul *To Build the World Anew* adalah salah satu momen intelektual paling berani dalam sejarah diplomasi Global South. Soekarno tidak datang membawa senjata, modal, atau ancaman. Ia datang membawa gagasan dan keberanian moral untuk menantang fondasi tatanan dunia yang mapan.

Soekarno memahami bahwa kolonialisme tidak berhenti ketika bendera penjajah diturunkan. Dunia pasca-Perang Dunia II, menurut Soekarno, masih diatur oleh logika yang sama, yakni siapa yang paling kuat, ia berhak menentukan. Siapa yang lemah harus menyesuaikan diri. Perserikatan Bangsa-Bangsa memang lahir sebagai simbol perdamaian, tetapi struktur internalnya terutama hak veto menyimpan ketimpangan yang dilembagakan.

Sebab itu, seruan Soekarno untuk membangun dunia baru bukan sebatas romantisme republik muda, melainkan kritik struktural. Dunia tanpa imperium, dalam imajinasinya, bukan dunia tanpa kekuatan, tetapi dunia yang menolak menganggap kekuasaan sebagai sumber kebenaran moral. Bung Karno mengajak dunia untuk membayangkan tatanan global yang dibangun atas dasar kesetaraan bangsa dan martabat manusia, bukan atas hierarki sejarah.

Dalam bahasa hari ini, Soekarno sedang berbicara tentang dekolonisasi tatanan global dan lebih jauh lagi, dekolonisasi cara berpikir. Imajinasi ini terasa semakin

futuristik ketika kita kemudian menyadari bahwa dunia abad ke-21 justru kembali berhadapan dengan problem serupa, dimana dominasi, standar ganda, dan ketimpangan global dilegalkan.

Dunia Pasca-Amerika

Konsep dunia pasca-Amerika sering dipahami secara keliru sebagai dunia anti-Amerika. Padahal sebagaimana Zakaria memahami bahwa Amerika tetap menjadi kekuatan utama. Yang berubah adalah fakta bahwa Amerika tidak lagi mampu dan mungkin tidak lagi bersedia menjadi penentu tunggal arah dunia.

Secara ekonomi, pusat pertumbuhan bergeser ke Asia. Secara politik, legitimasi intervensi sepihak semakin dipertanyakan. Secara kultural, narasi global tidak lagi dimonopoli oleh Barat. Dunia menjadi lebih plural, tetapi juga semakin tidak pasti.

Di sinilah ambivalensi dunia pasca-Amerika muncul. Ketika Amerika terlalu dominan, ia dikritik sebagai imperium modern. Ketika pengaruhnya berkurang, dunia justru menghadapi kekosongan kepemimpinan. Konflik regional berlangsung lama tanpa penyelesaian, krisis kemanusiaan ditangani secara dengan memihak, dan hukum internasional sering kalah oleh kepentingan kekuasaan.

Karena itu, dunia pasca setelah Amerika bukanlah dunia yang otomatis lebih baik. Dunia akan menuntut tanggung jawab kolektif yang lebih besar. Tanpa nilai bersama, multipolaritas bisa berubah menjadi fragmentasi global. Dunia kehilangan bukan hanya pemimpin, tetapi

juga kompas moral. Kekosongan inilah yang kemudian diisi atau setidaknya dicoba diisi oleh China.

Menatap Dunia di Tengah Kebangkitan China

Kebangkitan China adalah fakta geopolitik paling menentukan di abad ke-21. Dalam waktu relatif singkat, China bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia, pemain utama dalam teknologi strategis, serta aktor geopolitik yang semakin nyata. Dunia tidak bisa membicarakan masa depan tanpa membicarakan China. Sejarah dunia sedang menyaksikan China menjadi arsitek baru dunia.

Melalui inisiatif seperti BRI *(Belt and Road Initiative)*, China menawarkan visi dunia yang terhubung melalui infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Bagi banyak negara *Global South*, pendekatan China terasa berbeda dari Barat. Ia datang tanpa prasyarat demokrasi, tanpa retorika hak asasi manusia yang sangat standar ganda, dan dengan fokus pada pembangunan konkret.

Kendati begitu, di sinilah ujian etis terbesar muncul. Apakah kebangkitan China mewakili lahirnya dunia tanpa imperium, atau justru membuka babak baru imperialisme dengan wajah yang lebih halus? Apakah dunia sedang menyaksikan alternatif sejati terhadap dominasi Barat, atau sekadar pergeseran pusat hegemoni?

Soekarno telah lama mengingatkan bahwa dunia baru tidak lahir dari pergantian aktor dominan. Jika ketergantungan global hanya berpindah dari Washington ke Beijing, maka struktur ketidakadilan tetap bertahan. Dunia pasca-Amerika yang jatuh ke dalam ketergantu-

ngan baru pada China bukanlah dunia tanpa imperium, melainkan dunia dengan imperium yang berbeda.

Kebangkitan China seharusnya dipahami bukan sebagai jawaban final, melainkan sebagai ujian bagi kedewasaan dunia. Apakah dunia mampu belajar dari sejarahnya sendiri, atau kembali mengulangi pola lama dengan narasi baru?

Global South, Indonesia, dan Peluang Sejarah

Di tengah dinamika Amerika dan China, negara-negara Global South berada dalam posisi yang jauh lebih strategis dibanding masa lalu. Mereka tidak lagi sekadar objek perebutan pengaruh, tetapi aktor dengan daya tawar nyata. Namun daya tawar ini bisa menjadi kekuatan pembebasan atau jebakan baru.

Bahaya terbesar *Global South* adalah berpindah ketergantungan tanpa membangun kemandirian. Ketika Negara Selatan-Selatan hanya mengganti patron lama dengan patron baru, mereka tidak membangun dunia baru, mereka hanya menyesuaikan diri dengan tatanan lama.

Di sinilah kerja sama Selatan-Selatan menemukan makna yang melampaui kepentingan ekonomi. Kerjasama ini adalah sebentuk upaya membangun solidaritas politik, kemandirian teknologi, dan visi moral bersama. Kerja sama ini adalah eksperimen historis, yakni apakah bangsa-bangsa yang pernah dijajah mampu menciptakan tatanan global yang lebih adil ketika mereka memiliki kekuatan!

Indonesia memiliki posisi unik dalam percakapan global. Sebagai negara besar di *Global South*, dengan sejarah kolonialisme dan warisan pemikiran dan jejak

Soekarno, Indonesia tidak hanya memiliki kepentingan nasional, tetapi juga tanggung jawab moral. Politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar strategi bertahan, melainkan visi dunia tanpa imperium.

Indonesia tidak harus memilih antara Amerika atau China. Justru relevansi Indonesia terletak pada kemampuannya menolak dikotomi tersebut. Indonesia dapat -dan bahkan seharusnya menjadi jembatan di dunia multipolar, yakni menyuarakan keadilan global, mendorong reformasi lembaga internasional, dan memperkuat kerjasama Selatan-Selatan yang setara.

Tetapi peran ini menuntut keberanian politik dan konsistensi etik. Dunia pasca-Amerika membutuhkan negara-negara yang berani mengatakan bahwa kekuasaan lama maupun baru harus tunduk pada kemanusiaan. Tanpa keberanian itu, *Global South* hanya akan menjadi arena perebutan pengaruh, bukan perancang masa depan.

Abad ke-21 bisa digambarkan sebagai abad pasca-Amerika atau abad kebangkitan China. Tetapi sejarah tidak akan mengingat abad ini berdasarkan siapa yang paling kuat. Tetapi diingat berdasarkan apakah umat manusia berhasil meninggalkan logika imperium atau justru mengulanginya dalam bentuk baru.

Soekarno telah lama mengingatkan bahwa membangun dunia baru adalah proyek moral, bukan semata geopolitik. Fareed Zakaria memberi kita peta tentang perubahan kekuasaan global. Kebangkitan China menguji apakah dunia mampu belajar dari masa lalunya.

Dengan demikian, pertanyaannya selanjutnya adalah bukan siapa yang akan memimpin dunia, tetapi nilai apa yang akan memimpin umat manusia. Dunia pasca-Amerika di tengah kebangkitan China hanya akan

menjadi dunia yang lebih manusiawi jika *Global South* termasuk Indonesia berani mengambil peran sebagai penjaga nurani global.

Jika tidak, dunia hanya akan bergerak dari satu pusat dominasi ke pusat dominasi lain tanpa pernah benar-benar membangun dunia baru.

Arus Balik
Dari Sebuah Negeri
Yang Tidak
Dibiarkan Berkuasa

“Biar aku ceritai kalian. Dahulu, di jaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin.” Kalimat ini ditulis Pramoedya Ananta Toer dalam Arus Baliknya. Ia seakan memberi tahu dengan seksama bahwa kalimat itu tak hanya sekadar nostalgia sejarah. Tetapi merupakan sebuah pernyataan geopolitik yang tajam.

Kalimat itu seolah menantang asumsi modern bahwa pusat dunia selalu berada di utara, bahwa kemajuan selalu datang dari Barat, dan bahwa bangsa-bangsa di selatan hanyalah objek sejarah. Pramoedya mengingatkan kita bahwa pernah ada masa ketika Nusantara menjadi poros pergerakan dunia, bukan pinggiran, bukan pelengkap, melainkan pusat arus.

Di masa itu, arus bergerak keluar dari kepulauan Nusantara. Kapal-kapal berangkat dari pelabuhan membawa komoditas, gagasan, dan bergerak ke India, Timur Tengah, hingga Eropa membawa pengaruh. Jalur rempah bukan hanya rute perdagangan, tetapi jaringan peradaban. Nusantara adalah simpul yang menghubungkan dunia Timur dan Barat, Selatan dan Utara.

Tetapi sejarah tidak statis. Arus itu berbalik arah. Nusantara yang semula menjadi pengendali arus, berubah menjadi wilayah yang dialiri kekuatan asing. Dari subjek sejarah, Nusantara menjelma objek perebutan. Dari pusat dunia menjadi wilayah perebutan kekuatan besar penjajah.

Arus balik inilah yang membentuk wajah Indonesia modern. Di dalamnya tersimpan apa yang kita disebut sebagai kutukan jalur rempah, yakni ironi panjang, di

mana kekayaan justru mengundang penaklukan, dan posisi strategis justru menghabisi kedaulatan penuh.

Jalur Rempah dan Awal Mula Takdir Geopolitik

Jalur rempah sering dibingkai sebagai cerita ekonomi masa lalu. Tentang cengkeh, pala, lada, dan kayu manis yang harganya melambung di pasar Eropa. Namun, pembacaan semacam ini terlalu sempit. Jalur rempah sejatinya adalah fondasi geopolitik dunia pra-modern.

Rempah-rempah pada masanya setara dengan teknologi strategis hari ini. Rempah-rempah bukan sekadar bumbu, tetapi pengawet makanan, obat-obatan, simbol status sosial, bahkan alat kekuasaan itu sendiri bahkan "siapa yang menguasai rempah-rempah akan menguasai dunia" sebagaimana jargon kolonialisme kuno.

Dalam konteks inilah, Nusantara berada pada posisi yang hampir mustahil diabaikan. Letaknya yang berada di antara dua samudra besar, di persilangan jalur dagang dunia lalu menjadikannya wilayah yang secara alamiah ditakdirkan sebagai poros maritim. Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Banda, dan jalur kepulauan Indonesia bukan hanya perairan, melainkan nadi pergerakan laut dunia.

Kerajaan-kerajaan maritim Nusantara memahami logika ini. Sriwijaya membangun kekuasaan bukan melalui ekspansi teritorial darat, melainkan melalui pengendalian simpul-simpul laut. Majapahit menegaskan hegemoni bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi melalui jaringan loyalitas dan perdagangan. Ternate dan Tidore menguasai dunia karena menguasai sumber rempah.

Kekuasaan pada masa itu bersifat cair dan adaptif. Tidak ada batas negara seperti hari ini, tetapi memiliki pengaruh, aliansi, dan pengakuan. Nusantara hidup dalam sistem dunia yang relatif seimbang, sebelum datangnya gangguan besar dari luar.

Gold, Glory, Gospel: Ideologi yang Mengubah Arus

Tetapi kemudian keseimbangan ini runtuh ketika Eropa membuka babak ekspedisi benua. Kekalahannya di Konstantinopel mendorong pelayaran ke benua baru menemukan sumber baru rempah-rempah. Dalih rempah-rempah berubah menjadi akumulasi kekayaan dan penaklukan wilayah. Era Portugis dan Spanyol yang memulai ekspansi ke dunia Barat dan Timur menjadi titik awal kelahiran ideologi *Gold, Gold, Gospel*.

Gold adalah motif utama. Kapitalisme awal membutuhkan sumber daya baru untuk menopang pertumbuhan. Rempah-rempah Nusantara menawarkan keuntungan luar biasa. Namun keuntungan itu hanya bisa dimaksimalkan melalui monopoli dan kekerasan. Penguasaan atas rempah-rempah ini menjadi titik balik bagi Eropa menjadi kekuatan yang berpengaruh di abad 21 sebagaimana catatan Henry Kissinger.

Glory menyusul sebagai supremasi politik. Legitimasi yang diawali dengan penaklukkan menjadi simbol kejayaan negara dan menjadi panglima. Koloni bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga alat supremasi geopolitik.

Gospel selanjutnya menjadi klaim pembenaran moral. Kristenisasi di wilayah jajahan dibingkai sebagai

misi peradaban dan pemberadaban. Kekerasan dihaluskan dengan narasi keimanan.

Dalam kerangka ini, Nusantara tidak dilihat sebagai peradaban setara, tetapi sebagai ruang kosong yang sah untuk dikuasai. Struktur politik lokal dilemahkan. Elite tradisional dipecah dan dimanfaatkan. Jalur rempah yang semula menjadi sarana interaksi setara, berubah menjadi jalur penaklukan.

Kolonialisme tidak berhenti pada penguasaan fisik, tetapi sekaligus membangun sistem. Ekonomi dikonfigurasi agar berorientasi keluar, pendidikan didesain untuk mencetak tenaga administratif, bukan pemikir kritis, dan hukum disusun untuk melindungi kepentingan kolonial. Inilah awal dari struktur ketergantungan yang panjang.

Dari sinilah kutukan jalur rempah bermula. Kekayaan melimpah ruah Nusantara menjadi alasan utama penjajahan yang menghancurkan kemampuan Nusantara mengelola kekayaannya sendiri.

Dari sisi perekonomian, industri ekstraktif meninggalkan jejak ketimpangan. Infrastruktur dibangun bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk memperlancar arus komoditas ke luar meninggalkan negeri. Negara kolonial tidak membutuhkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, tetapi masyarakat yang stabil dan patuh.

Lebih jauh lagi, kolonialisme meninggalkan warisan mentalitas. Ketergantungan pada kekuatan luar menjadi hal yang dinormalisasi. Keputusan strategis dipandang sebagai sesuatu yang datang dari luar. Elit lokal lebih sering menjadi perantara daripada pemimpin.

Ketika bangsa ini merdeka, Indonesia tidak dibangun dari nol, tetapi dari struktur yang sudah timpang.

Negara baru ini harus bernegosiasi dengan sistem dunia yang sudah mapan, di mana posisi Indonesia telah lama ditetapkan sebagai pemasok bahan mentah dan pasar.

Perubahan zaman terjadi, komoditas berubah, tetapi pola tetap sama. Hari ini, rempah telah digantikan oleh minyak, gas, batu bara, nikel, sawit, dan mineral strategis lainnya. Bahkan data dan lokasi geografis Indonesia kini menjadi komoditas geopolitik.

Transisi energi global menjadikan nikel Indonesia sangat penting. Ketegangan geopolitik menjadikan jalur laut Indonesia semakin strategis. Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia.

Namun perhatian tidak selalu berarti kedaulatan. Tanpa penguasaan teknologi, modal, dan pasar, Indonesia berisiko kembali menjadi objek. Hilirisasi tanpa inovasi bisa menjadi bentuk baru ekstraksi. Pabrik berdiri, tetapi kendali tetap berada di luar. Sejarah seolah berulang, dengan aktor berbeda dan bahasa yang lebih soft.

Membalik Arus sebagai Agenda Masa Depan

Secara geopolitik, Indonesia sebetulnya adalah negara kunci. Ia berada di persilangan kepentingan global. Tetapi kunci tidak selalu membuka pintu. Kadang hanya menjadi alat bagi orang lain.

Politik luar negeri bebas aktif memberi ruang manuver, tetapi juga menuntut kejelasan visi. Tanpa strategi jangka panjang, kebebasan bisa berubah menjadi reaksi semata. Indonesia seringkali sibuk menjaga keseimbangan, tetapi kurang berani dan tegas dalam langkah.

Di dalam negeri, tantangan struktural masih besar. Ketimpangannya adalah lemahnya riset, dan ketergantu-

ngan ekonomi mengurangi daya tawar. Indonesia penting, tetapi belum sepenuhnya berkuasa atas posisinya sendiri. Membalik kutukan jalur rempah bukan tugas generasi yang jadi semalaman, tetapi menuntut perubahan rancang-bangun.

Pertama, Indonesia harus menggeser orientasi dari ekstraksi ke penciptaan nilai. Kekayaan alam harus menjadi basis industrialisasi dan inovasi, bukan tujuan akhir.

Kedua, Indonesia harus membangun kedaulatan pengetahuan. Tanpa penguasaan sains dan teknologi, posisi strategis hanya akan diambil alih oleh kekuatan lain.

Ketiga, Indonesia perlu merumuskan ulang peran-nya di panggung dunia. Bukan sebatas penyeimbang, tetapi pengarah. Jalur rempah dapat diimajinasikan ulang sebagai jalur kerjasama Selatan-Selatan, bukan nostalgia kosong.

Pramoedya mengingatkan kita bahwa arus pernah mengalir dari selatan ke utara. Artinya, dunia pernah mendatangi Nusantara dengan hormat, bukan dengan meriam. Kendati arus sejarah tidak pernah netral, kadang dibentuk oleh kekuasaan. Jika Indonesia ingin mengakhiri kutukan jalur rempah, Indonesia harus berani menjadi subjek sejarahnya sendiri.

Negeri ini tidak miskin. Negara hanya terlalu lama tidak dibiarkan berkuasa. Dan masa depan Indonesia akan ditentukan oleh keberaniannya untuk membalik arus, bukan dengan retorika dan memukul-mukul podium, tetapi dengan strategi, kesadaran, dan kedaulatan.



Trump Dan Matinya Amerika Serikat

Kakek berusia 79 tahun itu datang dengan slogan yang terdengar seperti mantra kebangkitan: Make America Great Again. Di podium-podium, dari panggung ke panggung, ia kerap tampil dengan gaya komedian yang angkuh. Ia adalah Donald Trump. Ia sesumbar menjanjikan restorasi kejayaan dan kebesarannya; Amerika akan kembali disegani. Dunia akan kembali tunduk. Pabrik-pabrik akan hidup. Perbatasan akan ditutup rapat. Musuh-musuh akan gemetar. Begitu kira-kira pernyataannya.

Tetapi lihatlah, sejarah memiliki caranya sendiri menertawakan penguasa yang terlampau keji dan arogan. Megalomaniak dan paranoid. Amerika Serikat di tangan Trump justru memperlihatkan sesuatu yang telanjang bulat: Amerika tidak sedang bangkit, melainkan menggali liang kubur kematian kedigdayaannya.

Matinya Amerika Serikat bukan tentang bangkrutnya *Wall Street* atau runtuhnya Pentagon. Frasa ini tentang matinya wibawa, matinya otoritas moral, dan matinya ilusi bahwa Amerika masih menjadi pusat gravitasi dunia yang tak tergantikan. Dan Donald Trump dengan segala keberanian dan gaya ekspansionisnya menjadi akselerator dari kematian itu.

Mahkamah Agung Melawan Donald Trump

Trump memulai perang dagang dengan modal kepercayaan diri sebagai seorang petarung. Tarif dinaikkan. Bea masuk dinaikkan. Dunia dipaksa bermain dalam aturan baru yang ditekan sepihak. Ia menjual kebijakan itu sebagai patriotisme ekonomi internal dengan tujuan Amerika tak akan lagi dirugikan.

Tetapi di negeri yang dibangun di atas konstitusi, presiden bukanlah raja. Ketika kebijakan tarifnya digugat dan dibatasi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, dunia menyaksikan bagaimana Trump dilawan oleh konstitusinya sendiri dan tentu saja mempermalukan diri sendiri. Presiden paling keras dalam retorika kedaulatan justru ditampar oleh sistem hukumnya sendiri.

Insiden ini bukan sekadar soal prosedur legal, tetapi merupakan pesan geopolitik. Bahwa negara yang ingin mendikte perdagangan global ternyata tak sepenuhnya solid di dalam. Kebijakan yang diumumkan dengan gagah berani bisa dipatahkan melalui meja hijau. Lalu pasar global mencium aroma-aroma ketidakpastian. Bagi sekutu, ini jelas pesan ketidakjelasan. Bagi lawan, ini adalah celah lebar.

Trump sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat bisa bertindak sepihak tanpa kompromi. Tetapi pembatasan oleh Mahkamah Agung menegaskan realitas bahwa bahkan di dalam negeri, konsensus atas arah Amerika telah roboh. Dan negara yang terbelah sulit menjadi kompas dunia.

Amerika Serikat selalu menggaungkan *checks and balances*. Tetapi di era Trump, hal itu terbaca sebagai konflik terbuka. Ia menjadi mekanisme yang menegaskan pesan penting bahwa sebuah negara adidaya yang sibuk berperang dengan dirinya sendiri akan sulit dipercaya sebagai penjaga stabilitas global.

Board of Peace dan Ilusi Perdamaian

Trump gemar menyebut dirinya pembuat kesepakatan. Ia bahkan sesumbar mengatakan dirinya tidak pernah

memulai perang. Ia juga mengklaim diri mampu menyelesaikan konflik yang tak terselesaikan. Berbagai gagasan dan forum perdamaian yang dibentuknya: Board of Peace, ia bayangkan sebagai ruang negosiasi baru.

Tetapi perdamaian bukan sekadar panggung foto dan konferensi pers. Ia membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan legitimasi. Di bawah Trump, diplomasi sering berubah menjadi alat transaksi. Sekutu lama ditekan untuk membayar lebih. Perjanjian multilateral dikonversi menjadi alat *pressure*. Retorika damai berdampingan dengan ancaman sanksi dan embargo.

Bagaimana mungkin dunia percaya pada arsitektur perdamaian yang dibangun di atas fondasi oleh keputusan dan tekanan sepihak? Alih-alih menciptakan stabilitas, pendekatan itu justru memperdalam ketidakpercayaan. Sekutu dekatnya: Prancis, Italia, Inggris, Jerman justru menolak bergabung. Dunia mulai membaca Amerika bukan sebagai mediator, melainkan sebagai pihak yang punya agenda domestik sempit. Board of Peace justru kehilangan bobot moralnya karena berdiri di atas kebijakan yang inkonsisten.

Hasilnya tentu saja membuat Amerika Serikat tak lagi otomatis duduk di kursi kepala meja. Dalam banyak konflik, negara-negara lain justru mencari alternatif: jalur regional, koalisi baru, bahkan mencari kekuatan lain sebagai penyeimbang.

Di saat dunia tak lagi menunggu Washington untuk memulai atau mengakhiri konflik, di situlah sinyal ketidakpercayaan menjadi nyata.

Iran dan Ambisi yang Tersandung

Konfrontasi dengan Iran menjadi salah satu panggung utama Trump untuk tampil unjuk kekuatan. Ia menarik Amerika Serikat keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action, dengan menyebutnya sebagai kesepakatan buruk, lalu menerapkan kebijakan tekanan maksimum.

Sanksi ekonomi diperketat. Isolasi finansial diperluas. Ancaman militer menggantung di udara. Logikanya sederhana, yakni tekan sampai musuh menyerah. Tetapi, Iran tak sesederhana slogan perang. Iran tidak runtuh. Rezimnya tidak tumbang. Pengaruh regionalnya tidak lenyap. Bahkan dalam beberapa aspek, tekanan eksternal justru memperkuat solidaritas internal dan memperdalam jejaring aliansinya.

Trump mungkin lupa bahwa pendahulu Iran adalah Persia, yang punya sejarah peperangan panjang. Mustahil meruntuhkannya hanya dengan ancaman bahkan embargo. Pada titik ini, Amerika Serikat menunjukkan kegagalan taktis. Trump sesungguhnya telah gagal secara simbolik.

Selama puluhan tahun, wibawa Amerika dibangun di atas asumsi bahwa ketika Washington serius menekan, hasilnya tinggal menunggu waktu. Tetapi di bawah Trump, asumsi itu hancur. Dunia menyaksikan bahwa tekanan maksimum tidak selalu melahirkan kemenangan maksimum. Dan ketika negara regional mampu menahan gempuran ekonomi dari adidaya terbesar, mitos itu hancur. Amerika mungkin saja masih kuat, tetapi sudah terbantahkan. Dan Iran bertahan. Dunia melihatnya.

Pasca Perang Dingin, Amerika menikmati momen unipolarnya. Ia menjadi pemimpin tunggal. Standar demokrasi, perdagangan, dan keamanan global banyak ditentukan di Washington. Tetapi, zaman berubah.

Konstalasi berubah. Di era Trump, perubahan itu terasa lebih tajam.

Retorika America First terdengar seperti penarikan diri dari tanggung jawab global. Dunia menangkap pesan bahwa kepentingan kolektif bisa dikorbankan demi keuntungan jangka pendek domestik. Persepsi terhadap Washington memudar bahkan kian hancur. Sementara, China melangkah tenang memperluas pengaruh ekonominya. Eropa berbicara tentang aliansi strategis baru. Negara-negara berkembang makin percaya diri memainkan manuver politik bebas dan tidak terlalu takut pada tekanan Amerika.

Kini, yang berubah bukan hanya peta kekuatan, tetapi psikologi global. Amerika tak lagi dipandang sebagai kekuatan netral. Ia terlihat sebagai pemain yang emosional, labil, dan over proteksionis. Di dalam negeri, polarisasi politik yang tajam menjadi konsumsi media dunia. Demonstrasi, sengketa pemilu, perpecahan sosial dan semuanya memperlihatkan bahwa demokrasi Amerika pun kian rapuh.

Bagaimana mungkin negara yang terjebak dalam konflik internal akut masih ingin mengajari dunia tentang stabilitas dan tata kelola dunia?

Amerika dan Matinya Kedigdayaan

Kematian Amerika sesungguhnya bukan pada ekonominya. Bukan militernya. Bukan pula institusi hukumnya karena terbukti Mahkamah Agung masih bisa membatasi presidennya. Yang mati adalah mitos tentang kedigdayaannya yang tanpa batas. Mitos bahwa Amerika selalu benar. Mitos bahwa setiap tekanan dari Washington

pasti efektif. Mitos bahwa dunia tak punya pilihan selain mengikuti Amerika Serikat.

Trump sebenarnya ingin membangkitkan kebesaran Amerika dengan pendekatan proteksionis dan agresif. Tetapi berkat pendekatan itu justru mempercepat kesadaran global bahwa dunia telah berubah. Amerika bukan lagi satu-satunya poros besar. Ia hanyalah salah satu dari banyak kekuatan yang juga harus mengedepankan negosiasi, bukan agresi dan mendikte.

Matinya Amerika adalah kematian asumsi. Kematian aura tak tersentuh. Matinya keyakinan bahwa sejarah selalu berpihak pada Washington. Semua itu terjadi ketika seorang presiden berteriak paling keras tentang kebesaran.

Trump mungkin saja masih percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah menyelamatkan Amerika. Tetapi di mata dunia, ia membuka tabir yang selama ini menutupi kenyataan bahwa hegemoni tunggal telah lenyap. Amerika tetap berdiri, tetapi tidak lagi sendirian di puncak, dan tidak lagi tak tergoyahkan.

Board Of Peace Dan Matinya Politik Bebas Aktif Indonesia

Selama puluhan tahun, Indonesia membanggakan satu prinsip yang menjadi basis politik luar negerinya, yaitu bebas dan aktif. Prinsip ini berulang kali didengungkan dalam pidato diplomasi, dokumen kebijakan, dan di forum internasional sebagai bukti bahwa Indonesia menolak tunduk pada blok geopolitik manapun, tetapi berperan aktif memperjuangkan perdamaian dunia.

Di era kepemimpinan Soekarno, prinsip ini tidak berhenti sebagai retorika moral geopolitik. Tetapi terartikulasikan menjadi strategi geopolitik yang konkret. Dibersamai para pemimpin negara selatan-selatan saat itu, Indonesia tampil sebagai salah satu pelopor lahirnya *New Emerging Force* (Gerakan Non-Blok), sebuah gerakan yang tumbuh di atas kesadaran anti imperialisme-kolonialisme global.

Gerakan Non-Blok pada dasarnya adalah pernyataan politik yang tegas bahwa negara-negara berkembang tidak bisa didikte oleh kekuatan besar. Di tengah pertarungan dua kutub ideologi besar: Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia bersama negara ketiga lainnya berupaya membuka peta baru kekuatan dunia: jalan ketiga, yaitu sebuah ruang diplomasi lain yang memberi otonomi politik tersendiri dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Tetapi hari ini, dunia berubah cepat. Polarisasi yang sedemikian tak tertebak ini, dunia terkotak-kotak ke dalam puzzle yang berhamburan. Dunia bergerak menuju konfigurasi yang jauh lebih kompleks, dimana multipolaritas baru ditandai dengan kehadiran lompatan jauh Tiongkok di berbagai sektor yang di saat bersamaan sedang memotong supremasi Amerika Serikat, belum lagi

keberadaan pemain lama yang juga mengancam keadidayaan Gedung Putih, yakni Moskow Rusia.

Dalam lanskap geopolitik yang semakin cair itulah, kompetensi membaca arah dunia menjadi sangat krusial. Ironisnya, saat dunia bergerak ke arah ketidakpastian, Indonesia tampaknya kehilangan ketajaman strategisnya. Keputusan pemerintahan Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam *Board of Peace* membuka sebuah kegamangan yang sulit disembunyikan.

Bagaimana tidak, negara yang dulu mengajarkan dunia kemandirian diplomasi, kini terlihat bergerak tanpa kompas geopolitik. Dalam situasi seperti ini, yang dipertaruhkan bukan lagi nama besar, tetapi marwah suatu negara. Sebagai sebuah bangsa, kita seolah ditelanjangi akibat manuver grasa-grusu oleh kepemimpinan bangsa saat ini.

Petaka dan Kegamangan Membaca Arah

Hal ini terasa ketika Indonesia bergabung di *Board of Peace* (BoP). Sejak awal dibentuk, BoP hadir dengan narasi perdamaian dunia yang terlalu disederhanakan. Ia hadir bersama kontradiksi-kontradiksi internal yang sulit diterima akal sehat. Terlebih, sejarah diplomasi Pentagon kerap tampil dengan standar ganda: slogan perdamaian untuk ambisi kekuasaan. Zhou Enlai telah terlebih dahulu mengingatkan bahwa "diplomasi terkadang menjadi kelanjutan perang dalam bentuk lain."

Di titik inilah keputusan Indonesia terlihat problematis, gamang dan berbahaya. Langkah seperti ini tidak mencerminkan kehati-hatian geopolitik -kalau tidak ingin dikatakan lebih menyerupai trial and error

diplomatik yang miskin kalkulasi strategis. Keanggotaan Indonesia BoP memiliki sejumlah masalah berat terutama terkait klausul penandatanganan perjanjian kesepakatan dagang ART *(Agreement of Reciprocal Trade)* di KTT BoP bulan lalu. Demi menurunkan tarif resiprokal 19 persen, Indonesia dijebak ke dalam kesepakatan yang merugikan dan mengancam kedaulatan.

Beberapa poin yang merugikan Indonesia diantaranya: kewajiban impor migas dari AS sebesar US$15 miliar atau sekitar 253,3 triliun rupiah. Klausul yang membatasi bahkan melarang kerja sama Indonesia dengan negara lain yang membahayakan kepentingan AS. Keharusan pembelian 50 unit pesawat Boeing di tengah kondisi keuangan Garuda Indonesia. Kewajiban mengizinkan transfer data pribadi warga Indonesia ke AS. Penghapusan aturan TKDN bagi sebagian besar barang impor dari perusahaan AS, hingga kewajiban impor migas senilai US Dolar 15 miliar dan komoditas pangan: kedelai 200.000 ton, jagung 100.000 ton, daging sapi 50.000 ton, dan lain-lain dari AS.

Kedua, keikutsertaan Indonesia di BoP adalah manuver yang merusak semangat perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketiadaan Palestina dalam struktur otoritas dewan BoP seharusnya dibaca sebagai topeng bagi Israel memperkuat legitimasi atas pendudukan Palestina. Ketiga, semangat menggebu-gebu bergabung di BoP atas nama perdamaian tidak terlihat ketika AS-Israel mengagresi Iran. Tidak ada kecaman, tidak ada kutukan kepada negara agresor, yang jelas-jelas telanjang bulat telah mengganggu kedaulatan suatu negara dan melanggar hukum internasional. Yang nampak justru *gimmick* keinginan berperan mediator/penengah konflik, namun sebenarnya tidak menghitung seberapa kuat dan

dipercaya kepemimpinan Indonesia saat ini ketika negosiasi tarif 19 persen tidak mampu ditekan.

Inilah wajah kepemimpinan bangsa kita saat ini. Kita konsisten dalam isu bersama: Palestina, tetapi gamang melihat agresi di depan mata. Negara dengan sejarah panjang sebagai pelopor Non-Blok, kini keropos, pelan-pelan. Warisan politik bebas aktif dilucuti oleh kepemimpinan yang gagap dan kehilangan arah melihat realitas dunia saat ini. Atau kita wajib bertanya, apakah prinsip bebas aktif masih benar-benar memandu arah diplomasi Indonesia, atau kini hanya bertahan sebagai retorika simbolik masa lalu yang terus diulang tanpa pemahaman presisi dan kedalaman strategi?

ASEAN dan Panggung yang Terabaikan

Kegamangan Indonesia semakin terasa ketika melihat fakta historis bahwa Indonesia adalah ASEAN, yang sebenarnya memiliki peran yang tidak kalah strategis dalam hubungan internasional. Selama lebih dari setengah abad, ASEAN telah menjadi salah satu pilar stabilitas kawasan Asia Tenggara. Di ASEAN, keberadaan Indonesia tidak sekadar menjadi anggota. Profesor Wang Gungwu menyebut Indonesia sebagai *Natural Leader*. Peran pemimpin alami ini muncul bersama kekuatan ekonomi, kapasitas diplomasi, serta legitimasi historis.

Di tengah meningkatnya rivalitas global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu pusat kompetisi geopolitik dunia. Asia Tenggara berada tepat di jantung persaingan itu. Dalam konteks inilah, ASEAN memiliki fungsi strategis, yakni menjaga kawasan agar tidak terseret ke dalam kubu salah satu kekuatan besar yang saling berbenturan. Meski

begitu, peran tersebut tentu membutuhkan kepemimpinan regional yang kuat. Tanpa itu, ASEAN beresiko kehilangan kemampuannya sebagai penyeimbang geopolitik kawasan.

Ironisnya, disaat kawasan membutuhkan kepemimpinan tersebut, perhatian dan fokus diplomasi Indonesia tampak dialihkan ke forum global yang orientasi strategisnya belum jelas. Terkesan bahwa Indonesia sedang meninggalkan panggung strategisnya sendiri. Mengabaikan kepemimpinan regional berarti kesalahan pembacaan arah geopolitik yang sekaligus berpotensi menarik konsekuensi geopolitik yang jauh lebih besar.

Apalagi saat ini salah satu titik paling rawan di kawasan adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan Tiongkok dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, terutama Vietnam, terus meningkat. Militerisasi pulau-pulau kecil, patroli kapal penjaga pantai, serta konfrontasi antara kapal nelayan telah menjadi pemandangan yang semakin sering terjadi.

Banyak analis memandang bahwa kawasan ini akan menjadi salah satu potensi konflik geopolitik terbesar berikutnya setelah Timur Tengah, baik Iran memenangkan peperangan atau setelah Amerika Serikat kalah. Profesor Jiang bahkan memprediksi bahwa Asia adalah wilayah yang akan menjadi panggung ketegangan geopolitik yang jauh lebih besar. Timur Tengah adalah *pivot to Asia*.

Dan faktanya, dinamika geopolitik global seringkali memperlihatkan pola yang berulang, dimana konflik dan perang internasional sering berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Dinamika ini menurut Henry Kissinger adalah cara negara-negara maju berdiri di atas kawasan

tertentu sebelum mencapai puncak pemilik tatanan dunia *(world order)*. Dalam skenario seperti ini, Laut Cina Selatan akan menjadi titik eskalasi berikutnya. Jika ketegangan antara China dan Vietnam terus meningkat, kawasan Asia Tenggara bisa berubah menjadi medan konfrontasi baru dalam percaturan geopolitik global.

Peran Indonesia sebagai natural leader ASEAN menjadi sangat penting. Indonesia memiliki posisi unik dan strategis, dimana Indonesia bukan hanya sebagai pihak utama dalam sengketa, tetapi berkepentingan besar terhadap stabilitas kawasan. Posisi ini memberi Indonesia legitimasi memainkan peran sebagai penyeimbang diplomatik yang mampu menjaga solidaritas kawasan sekaligus mencegah eskalasi konflik.

Tetapi, kepemimpinan seperti itu hanya bisa dijalankan apabila diplomasi Indonesia fokus pada penguatan kemitraan kawasan. Indonesia sebaiknya mencurahkan fokus dan energi diplomatiknya ke forum global yang orientasinya jelas agar Indonesia punya momentum memainkan peran strategis di kawasan.

Kendati demikian, rangkaian keputusan diplomatik yang telah diambil dalam forum-forum global -terutama keputusan bergabung di BoP- memperlihatkan fakta yang sulit disangkal bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia tampak kehilangan perlindungan strategisnya. Hari ini dan hari berikutnya, politik bebas aktif tetap disebut dalam pidato resmi dan tetap akan tercantum dalam dokumen kebijakan luar negeri, tetapi rapuh dalam praktik diplomasi.

Sebab itu, mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara Non-Blok adalah pertanggungjawaban kepemimpinan yang ada saat ini. Pertama, Indonesia

dengan tegas keluar dari BoP dan membatalkan kesepakatan dagang yang merugikan bangsa. Kedua, memperbaharui paradigma diplomasi luar negeri Indonesia menjadi diplomasi bebas aktif 2.0, yaitu pendekatan independensi geopolitik yang memaksimalkan pengaruh strategis melalui panggung yang benar-benar relevan. Diplomasi bebas aktif 2.0 tidak hanya mendayung diantara dua karang, tetapi melewati sungai sambil merasakan batu.

Tanpa upaya itu, menurut penulis, sejarah bangsa ini akan tercatat sebagai ironi besar di mata dunia. Bahwa negara yang pernah mengajarkan dunia tentang jalan tengah diplomasi justru menjadi pihak pertama yang meninggalkan jalannya sendiri. Itu.

Repositioning Indonesia Di Asean: Dari Kesadaran Sejarah Menuju Kekuatan Dunia

"Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Soekarno)"

Dunia saat ini sedang bergerak dalam ketegangan yang telanjang bulat. Di depan mata, konflik Iran dan AS-Israel bukan sekedar perang regional di Timur Tengah, tetapi sebagai simbol retaknya keseimbangan global yang selama ini dibangun dan dijaga lewat negosiasi dan diplomasi tingkat tinggi di kancah global. Tatanan dunia multipolar memang telah lama runtuh. Kini, kita menyaksikan tatanan multipolar yang sarat faksi politik dan friksi. Dalam lanskap geopolitik yang terpolarisasi seperti ini, setiap negara dipaksa menentukan posisinya, tak terkecuali Indonesia.

Bagi Indonesia, persimpangan ini adalah pesan jelas dalam merumuskan ulang rancang-bangun diplomasi dan arah geopolitiknya. Apalagi saat ini, keanggotaannya dalam berbagai forum Internasional, terbaru *Board of Peace* (BoP) dan forum kerjasama internasional lainnya menharuskannya aktif dalam dinamika *balance of power* kawasan terutama di wilayah Indo-Pasifik. Dengan cara itu, Jakarta tidak lagi sepenuhnya berada di wilayah *peripheral* percaturan global, tetapi bermain di wilayah sentrifugal.

Meski demikian, di sini lain, kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat mencerminkan pragmatisme ekonomi yang tak terelakkan. Tetapi, hal ini harus dibaca sebagai bagian dari upaya memeluk pasar bebas tanpa kehilangan relasi politik global. Pertanyaan kini, apakah dengan langkah-langkah itu, positioning Indonesia strategis? Atau sekedar respon adaptif tanpa arah jangka panjang?

Vektor ASEAN: Peluang dan Harapan

Dalam bukunya What It Takes Asia Tenggara: Dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global, Gita Wirjawan, menjelaskan analisis panjangnya. Bahwa Asia Tenggara bukan lagi halaman belakang kekuatan besar di dunia. Asia Tenggara selama dua millennium terakhir telah belajar merangkul multipolaritas. Posisinya bisa menjadi simpul penting kontestasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan populasi lebih dari 650 juta jiwa dengan jalur laut paling strategis di dunia, kawasan ini adalah titik temu ekonomi, teknologi, dan keamanan global.

Indonesia dalam kontes ini, menurut Gita, tidak otomatis menjadi kekuatan hanya karena bekal keunggulan demografi. Tanpa penguasaan STEM *(Science, Technology, Engineering, dan Mathematics)*, Indonesia akan terus menjadi eksportir komoditas mentah dan negara importir teknologi tinggi. Penguasaan STEM bagi Giita bukan pilihan kebijakan, melainkan keharusan sejarah. Sebab, untuk mempengaruhi dunia, STEM adalah alat. Jika Indonesia gagal membangun basis ini, maka Indonesia selamanya akan menjadi pasar bagi produk global. Karena itu, keunggulan tidak hanya berupa kekuatan militer dan kepiawaian diplomasi, tetapi juga laboratorium, ruang kelas, dan lembaga riset. Yuval Noah Harari dalam Homo Deus, memberi pesan jelas bahwa negara modern terkuat dalam sejarah adalah mereka yang meriset tiada henti.

Wang Gungwu, Sejarawan Tiongkok dan Asia Tenggara, dalam podcastnya bersama Gita Wirjawan, memberi catatan penting bagi Asia Tenggara. Bahwa ASEAN adalah jangkar utama stabilitas regional. Tetapi tantangannya adalah solidaritas antar anggota di kawasan terutama yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan.

Tantangan ini muncul karena perbedaan kepentingan antar negara anggota. Tapi bagi Indonesia, Prof. Wu membeberkan alasan strategis. Indonesia dengan populasi dan wilayah yang besar harus memperkuat diplomasi dan ekonominya. Tradisi politik luar negeri bebas aktif adalah jembatan di antara kekuatan besar.

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN penting menjaga stabilitas kawasan. Indonesia tidak memerlukan kekuatan militer dominan, melainkan basis institusi dan ekonomi yang kuat. Fondasi penting lainnya tentu adalah tanpa mengabaikan diplomasi dan perspektif geopolitik. Dengan begitu, Indonesia akan keluar sebagai *Natural Leader*.

Repositioning Indonesia di ASEAN

Di ASEAN, Indonesia sering disebut sebagai *primus inter pares*, yakni pertama di antara yang setara. Indonesia perlu mengubah perannya dari sekadar Pemimpin Natural menjadi penentu arah dan agenda. Indonesia dapat memimpin ASEAN dalam empat isu strategis, yakni transisi energi hijau, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan stabilitas Laut Cina Selatan.

Di tengah perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global, kepemimpinan regional tak lagi soal retorika solidaritas, tetapi kemampuan menghadirkan jawaban konkret. Sebagai ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia memiliki daya tawar untuk mengarahkan integrasi industri kawasan. Hilirisasi sumber daya alam, jika dikelola dengan semangat teknologi, maka itu dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dengan daya tawar tinggi. Tapi, tanpa peningkatan kualitas SDM dan inovasi, hilirisasi hanya akan menjadi slogan politik.

Repositioning Indonesia di ASEAN juga berarti memperkuat diplomasi moral. Politik luar negeri bebas-aktif yang diwariskan para pendiri bangsa adalah ruang bagi Indonesia menjadi jembatan antara negara selatan-selatan dan negara maju. Di tengah dunia yang terpolarisasi, dunia kekuatan penyeimbang, bukan hanya blok-blok yang saling berhadapan.

Warisan Sejarah dan Doktrin Geopolitik Nusantara

Gagasan repositioning Indonesia sesungguhnya bukan gagasan baru. Hal ini tertanam dalam memori panjang Nusantara. Di era Majapahit, doktrin kemaritiman tertanam kuat. Gajah Mada telah menempatkan kepulauan ini sebagai satu kesatuan geopolitik berbasis laut. Laut bukanlah pemisah, melainkan simpul yang menghubungkan jalur perdagangan menjadi sumber kekuatan dan pengaruh.

Doktrin ini digambarkan Pramoedya Ananta Toer dalam Arus Balik-nya. Bahwa kekuatan Nusantara di masa silam bergerak vertikal, dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin. Pesan ini memberi pesan geopolitik yang tajam. Pram sekaligus menantang asumsi modern yang menyatakan bahwa pusat kemajuan tidak selalu datang dari Barat. Majapahit membuktikannya. Gajah Mada memimpin armada menggerakkan perahu merebut pengaruh dunia dari selatan ke utara.

Jauh sebelum Majapahit, Kerajaan Singasari pada abad ke-13 di masa pemerintahan Raja Kertanegara menggagas paradigma kekuasaan maritim yang disebut sebagai Cakrawala Mandala. Di era Indonesia modern, doktrin ini diadopsi menjadi visi bangsa dengan sebutan Cakrawala Mandala Dwipantara. Warisan maritim itu

kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan politik luar negeri non-blok pada era Soekarno. Konferensi Asia-Afrika 1955 menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan moral yang menolak tunduk pada bipolaritas blok kapitalisme-liberalisme AS dan komunisme-sosialisme Uni Soviet. Prinsip bebas-aktif bukan sikap netral pasif, tetapi strategi keseimbangan aktif dalam percaturan geopolitik global.

Kini, dalam konteks Indo-Pasifik, warisan tersebut menemukan relevansi baru. Indonesia berada di jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Selat Malaka, Laut Jawa, hingga perairan timur Nusantara adalah simpul logistik global. Jalur ini mendesak agar dikelola dengan visi maritim yang kuat melalui penguatan armada laut, industri galangan kapal, dan pertahanan dan keamanan maritim. Sudah terlalu lama bangsa ini memunggungi laut. Saatnya Indonesia menjadi poros stabilitas kawasan.

Dari Kesadaran Sejarah Menuju Kekuatan Dunia

Repositioning Indonesia bukan lagi sekadar strategi kebijakan luar negeri. Tetapi transformasi cara berpikir. Dunia multipolar menuntut kecerdasan membaca arah mata angin tanpa kehilangan jangkar. Dalam pandangan penulis, ada empat pilar yang harus berdiri bersamaan, yakni (1) STEM sebagai fondasi teknologi, (2) kepemimpinan substantif di ASEAN, (3) diplomasi bebas aktif, dan (4) revitalisasi visi maritim Nusantara. Tanpa itu, Indonesia akan terus berada di antara dua kutub kekuatan tanpa pernah benar-benar menentukan arah.

Kendati demikian, kesadaran saja belum cukup. Bangsa ini membutuhkan langkah tegas dan terukur. Pertama, revolusi pendidikan nasional berbasis STEM

harus menjadi prioritas anggaran dan kebijakan politik. Minimal 5-6 persen PDB dialokasikan untuk pendidikan dengan fokus riset, politeknik teknologi, kecerdasan buatan, dan industri strategis. Kemitraan global perlu diperluas dengan transfer teknologi sebagai syarat utama.

Kedua, membangun kedaulatan strategis industri berbasis hilirisasi cerdas. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi bergerak ke manufaktur berteknologi tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, semikonduktor, industri modernisasi alutsista pertahanan maritim, dan *renewable energy*. Negara harus hadir sebagai orkestrator industrialisasi, bukan sekadar regulator.

Ketiga, memperkuat doktrin poros maritim dengan pendekatan keamanan dan ekonomi sekaligus. Modernisasi armada laut, penguatan penjagaan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), serta membangun pusat logistik terpadu akan memastikan Indonesia tidak hanya menjadi jalur lewat, tetapi pengendali arus perdagangan global.

Keempat, merebut peran sebagai pengatur agenda di ASEAN dengan menawarkan inisiatif konkret, misal dana transisi energi kawasan, pusat riset kolaborasi ASEAN untuk teknologi digital, dan memperkuat mekanisme diplomasi preventif atas Laut Cina Selatan.

Kelima, mengupgrade politik bebas aktif menjadi politik bebas aktif 2.0, yakni diplomasi yang tidak hanya netral secara gerbong politik, tetapi proaktif membangun koalisi isu terutama di negara selatan-selatan. Indonesia punya modal memimpin negara berkembang dalam isu pangan, perubahan iklim, dan reformasi tata Kelola ekonomi global.

Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, repositioning Indonesia bukan lagi retorika geopolitik, melainkan realitas struktural. Dari Dwipantara ke Indo-Pasifik, dari non-blok ke multipolar, perjalanan sejarah memberi pesan yang jelas bahwa kekuatan lahir dari keberanian mengubah diri. Dan Indonesia memiliki memori peradaban yang membentuk konsepsi dan cita-cita. Dan Indonesia kaya sumber daya alam dan kekuatan demografi. Yang dibutuhkan saat ini adalah disiplin dan konsistensi kebijakan dan visi jangka panjang, dan keberanian bermanuver dalam percaturan geopolitik. Dari kesadaran sejarah menuju kekuatan dunia bukanlah mimpi romantik, tetapi proyek nasional masa depan yang harus dimulai dari sekarang.

Iran Melampaui Dekolonisasi

Iran saat ini *onfire*. AS-Israel tengah merasakan kedigdayaan Iran. Di balik kesuksesannya mengontrol perang, ada harga yang seringkali harus dibayar mahal, yakni gugurnya para pemimpin tertinggi dan martir di medan laga. Bagi Iran, gugurnya tokoh-tokoh kunci: Ali Khamenei, Ali Larijani dan pemimpin lainnya tidak sekadar dipahami sebagai kehilangan, tetapi sebagai energi ideologis. Dalam tradisi politik-religius Iran, kematian para pemimpin bukan duka, tetapi instrumen balas dendam suci yang sah.

Dalam konteks ini, balas dendam tidak hadir dalam bentuk emosi, tetapi sebagai agresi yang terlegitimasi. Para pemimpin yang berguguran justru menguatkan fondasi ideologis rakyat Iran. Bahwa perlawanan bukan pilihan, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai mandat historis dan spiritual. Iran menjadikan kesyahidan para pemimpinnya sebagai bahan bakar yang mengubah duka menjadi doktrin lalu meledakkan perlawanan. Gugurnya para pemimpin, tidak menjadikan Iran lemah, justru kian kuat.

Berbeda dengan Venezuela, sesaat setelah Nicolas Maduro ditangkap, negara lumpuh dengan segera. Iran jauh berbeda. Mereka diikat oleh sistem kepemimpinan yang tidak berbasis kultus individu/patronase, tetapi diikat oleh simpul-simpul fondasi besar, yakni karbala, jaringan ideologis, struktur lembaga, serta organisasi yang saling mengunci. Sistem seperti ini terbentuk secara alami yang lahir dari relasi antara kultur dan teladan kepemimpinan merakyat, integritas lembaga dan loyalitas rakyat.

Bgai negara pascakolonial yang ada, sebagian besar mereka merdeka secara politik, tetapi terjajah secara imajinasi. Mereka mendeklarasikan negara, tetapi tidak

mengganti cara pandang. Tetapi, Iran melampaui semua itu. Negara pewaris sah bangsa Arya ini tidak sekedar memperagakan dekolonisasi, tetapi jauh lebih radikal, yakni doktrin martir. Kemartiran bagi bangsa Iran adalah bentuk peragaan rasa bangga terhadap bangsa dan peradabannya, sehingga mengangkat senjata adalah harga mati.

Pengalaman panjang ribuan tahun, hidup dalam embargo, sanksi, intervensi global, dan invasi berkali-kali menjadikan mereka sanggup bertempur habis-habisan. Bahkan diprediksi mampu *survive* bahkan jika digempur puluhan tahun.

Pergeseran Peta Geopolitik Timur Tengah

Perbedaan Iran dari banyak negara berkembang lainnya dan ini menarik, yaitu kebanggaan atas peradabannya. Sebagai pewaris Persia, Iran tidak pernah benar-benar merasa sebagai negara pinggiran secara politik. Mereka sejatinya adalah negara *core* sekalipun para pemimpinnya tidak mengumumkan deklarasi. Dalam teori yang dikembangkan Immanuel Wallerstein, ekonom terkemuka Amerika Serikat, dunia dibagi menjadi tiga hirarki utama: negara core (pusat), negara *periphery* (pinggiran), dan negara *semi-periphery* (tengah-tengah). Negara semacam Amerika Serikat berperan sebagai negara core, yang mengendalikan ekonomi dan tatanan dunia.

Sementara, sebagian besar negara lainnya diposisikan sebagai negara periphery dan semi-periphery, yang menjadi pelengkap sistem hegemonik yang timpang. Faktanya, mereka menolak hirarki semacam itu. Mereka tidak setuju berada dalam *circle* kekuasaan yang berat sebelah. Sebab itu, Iran membuat definisinya sendiri dan

menjauh dari batasan-batasan yang mengekang kemerdekaan dan kedaulatan. Menyetujui hirarki tersebut sama halnya mengafirmasi dominasi Barat atas kedaulatan negara lain. Kesadaran ini yang kemudian membawa Iran menjadi negara kuat, mandiri, dan memiliki mental *resiliences* baja.

Ketika banyak negara selatan-selatan menitikberatkan perjuangan dekolonisasi atas politik dan wilayah, maka Iran sesungguhnya melangkah lebih maju. Mereka bahkan mengkonstruksi ulang peta kekuasaan. Bersama Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman, hadir sebagai aktor penting yang menggeser peta Timur Tengah. Pengalaman ribuan tahun bersama prajurit revolusionernya menjadi modal utama mereka mendesain ulang strategi perang jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

Sekarang, kita bisa lihat, dalam perangnya melawan AS-Israel, *Mosaic Defence Strategy* diturunkan. Stepi Anriani, Direktur Eksekutif INSS (Intelligence, and National Security Studies), menjelaskan bahwa strategi ini pada dasarnya bertujuan memecah kekuatan militer menjadi unit-unit kecil dan tersebar. Dalam konteks ini, Iran menguras kekuatan lawan dan cukup bertahan/ *defense*. Dengan begitu, Iran tidak akan mudah dilumpuhkan, karena kekuatan militer menyebar ke berbagai titik.

Strategi ini secara langsung menantang model perang konvensional yang selama ini menjadi andalan kekuatan besar. Dalam posisi seperti ini, AS dan Israel tidak akan menang dan minimal membuat Iran tidak kalah. Lebih jauh, Iran mengembangkan pendekatan asimetris melalui penggunaan rudal dan drone berbiaya murah dan bisa diproduksi berulang kali dalam waktu relatif singkat. Strategi ini bertujuan menguras amunisi

lawan dengan tujuan melemahkan kekuatan musuh lewat serangan terus-menerus.

Ini yang dialami Israel. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang canggih dan kuat menurut klaimnya, dipaksa bekerja tanpa henti dan menghadapi gelombang serangan berulang kali. Saat ini, Iran bahkan mengklaim armada perang USS Gerald Ford simbol supremasi militer global- dipukul menjauh dari zona perang. Begitu juga dengan armada Abraham Lincoln, yang berhasil dirudal oleh Iran di awal-awal perang dimulai. Dan terbaru, pesawat F-35 yang diklaim AS sebagai jet siluman tercanggih yang bernilai triliunan rupiah itu terdampak rudal.

Kendati dibantah Amerika, tetapi dunia mengerti bagaimana media Barat bekerja. Tetapi, satu hal yang pasti, Iran menyelipkan pesan tegas bahwa tidak ada teknologi yang benar-benar kuat. Ia sangat bisa dihancurkan oleh teknologi perang berbiaya murah tapi efektif. Di sinilah, Iran telah mengubah aturan main perang dan menggeser peta geopolitik Timur Tengah serta memaksa dunia mendefinisikan ulang siapa yang pantas dijuluki sebagai negara super power.

Koreksi Standar Feminisme Barat

Selain peradaban, perempuan Iran menunjukkan keagungannya. Dalam kacamata Barat, perempuan Iran seringkali diframming sebagai simbol keterbatasan. Seringkali kritik Barat atas perempuan Iran tertuju pada pakaian bukan pada kompetensinya. Fakta kemudian menunjukkan kebenaran yang sangat mengagumkan. Pertama, eksistensi Sekolah Kunoichi (Ninja Wanita). Sejak tahun 1989, puluhan ribu perempuan Iran mengikuti

pelatihan bela diri di sekolah ini. Para perempuan ini ditempa agar memiliki pertahanan diri, ketahanan, dan kemandirian. Hal ini menegaskan bahwa Iran tidak bias genre. Perempuan justru menjadi subjek aktif dalam ruang publik dan sosial di Iran.

Kedua, perempuan Iran kebanyakan adalah lulusan STEM *(Science, Technology, Engineering, Mathematic)*. Data UNESCO menunjukkan, 35% perempuan Iran adalah lulusan STEM. Perempuan Iran yang berpendidikan menempati peringkat pertama. Di bidang sains, menempati urutan kedua secara global. Di tingkat doktoral profesional, 58% mahasiswa di Iran adalah perempuan. Fakta ini sangat berbeda sebelum revolusi 1979, dimana 60% perempuan Iran buta huruf.

Data ini sekaligus menunjukkan bahwa emansipasi di Iran berjalan sangat konkret. Feminisme tidak sekadar menjadi wacana pembebasan, tetapi aksi dan kompetensi. Perempuan Iran secara tidak langsung mengkritik pandangan Simone de Beaviour dalam bukunya *The Second Sex*, yang memposisikan perempuan sebagai The Other (yang lain), dimana kebebasan bagi perempuan menurutnya hanya bisa dicapai dengan keluar dari pakem dan kultur-sosial yang ada.

Hal ini menjadi sangat masuk akal. Apalagi memang feminisme sejatinya adalah ideologi gerakan yang lahir dari rahim Eropa, yang secara kultur dan struktur berbeda secara diametral dengan Iran. Logika fatal Simon berikutnya ketika mengandaikan pembebasan berarti harus mengambil jarak dari tradisi dan struktur yang ada. Dalam konteks ini, perempuan Iran menampilkan feminisme lain. Perempuan Iran tidak selalu membebaskan diri dari struktur, tapi menegosiasikannya. Mereka masuk ke

universitas, menguasai sains, bahkan membangun kekuatan fisik tanpa mengadopsi individualisme Barat.

Feminisme Iran bukan hanya alternatif, tapi juga kritik. Bahwa menjadi perempuan di ruang publik-sosial tidak harus melalui satu cara yang seragam dan dengan satu jalan tunggal.

Melampaui Dekolonisasi

Dalam kajian pascakolonial, kita akrab dengan nama-nama sekaliber Edward Said, Gayatri Spivak, hingga Ania Loomba. Mereka-mereka ini pemain lama yang menggaungkan kemendesakan kolonialisme itu diakhiri. Saya melihatnya, dari teori-teori yang ada, sebagian besarnya adalah narasi kritik. Teori-teori para pascakolonialis ini kuat membongkar dominasi di banyak tulisan-tulisannya, tetapi tidak selalu menawarkan jalan pengganti.

Hari ini, detik ini juga, Iran melampaui teori itu. Iran membongkar kolonialisme tidak melalui tulisan, tapi membangun struktur kekuasaan alternatif dan itu diperagakan sejak lama. Mereka tidak memposisikan diri sebagai objek, tetapi bertindak sebagai subjek aktif. Jika Edward Said berani mengangkat Orientalisme sebagai kajian ketimuran, maka Iran membangun realitas tandingannya. Jika Gayatri Spivak masih bertanya apakah subaltern bisa berbicara, Iran menjawabnya dengan tindakan, bukan hanya argumentasi, tapi mengatur permainan.

Dekolonisasi bagi Iran tidak lagi sebagai proyek pembebasan, tetapi proyek pemihakan. Hari ini, Iran adalah narasi yang bisa unjuk diri sebagai ancaman atau

simbol perlawanan, tergantung siapa yang berbicara apa dan kepada siapa. Hanya saja, satu hal yang sulit diingkari, bahwa Iran telah keluar dari objek sejarah. Iran saat ini adalah subjek yang sedang menata arah dunia.

Bagi banyak negara Global South, Iran adalah bukti bahwa dominasi global bukan takdir. Sebuah bangsa bisa menolak, melawan, dan membangun sistem alternatifnya sendiri. Iran menitip satu adagium penting bahwa dekolonisasi bukanlah tujuan akhir. Dekolonisasi hanyalah babak awal. Banyak bangsa setelah merdeka, tapi tidak menuju kedaulatan penuh.

Dengan kebanggaan atas warisan peradabannya, Iran berdiri tegak dan menentang setiap bentuk hegemoni. Iran telah menunjukkan kepada dunia tentang dekolonisasi tidak hanya tentang visi dan misi, tetapi melampauinya. Dan perangnya melawan AS-Israel saat ini tidak hanya tentang perlawanan terhadap arogansi dan kebiadaban, tapi mengajarkan cara bernegara yang ideal dan bijaksana serta meneladankan pengamalan ajaran Islam yang benar kepada para pemimpin Arab yang mengklaim diri sangat Islami itu.



Kepemimpinan Geokultural

Dunia saat ini tidak cukup dipahami hanya sebagai peta kontestasi kekuatan militer dan ekonomi. Mapping dunia tidak lagi sesederhana itu. Apa yang yang terjadi di Venezuela dan di Iran tidak semata tentang geopolitik, minyak, dan nuklir. Di balik eskalasi besar, terdapat dimensi lain yang lebih halus namun berpengaruh besar, yakni kebudayaan. Jika geopolitik berbicara tentang bagaimana ruang dikelola dan dikuasai, maka kebudayaan menjelaskan bagaimana makna dibentuk dan dipertahankan.

Dalam perspektif klasik hubungan internasional, dunia seringkali dilihat sebagai ajang pertarungan kekuatan-kekuatan di dunia. John Mearsheimer dalam *The Tragedy of Great Power Politics*, menjelaskan bahwa negara-negara besar cenderung berupaya memperbesar kekuatannya demi menjamin keamanan. Dalam sistem global yang hampir dipastikan tidak memiliki otoritas tertinggi, setiap negara pada akhirnya harus bergantung pada kekuatannya sendiri. Terkadang konflik lebih sering menjadi konsekuensi logis daripada sebuah pengecualian.

Pandangan ini telah diamini oleh Henry Kissinger dalam *World Order*. Henry menunjukkan bahwa tatanan dunia terbentuk melalui keseimbangan kepentingan dan pengalaman historis masing-masing negara. Stabilitas tidak lahir dari kesamaan nilai, tetapi dari kemampuan negara-negara dalam menjaga keseimbangan kekuatan secara realistis.

Geokultural dan Soft Power

Dinamika global termutakhir memperlihatkan bahwa kekuatan tidak selalu tampil dalam bentuk yang kasat mata. Pengaruh kini bergerak melalui jalur yang

lebih subtil, yakni melalui ide, identitas, dan narasi. Dalam konteks ini, publikasi Zhou Ya yang bertajuk *Geoculture and Its Social Construction: A Political-Sociological Study of Religion and Ethnicity in Southeast Asia*, menemukan relevansinya. Zhou membentangkan satu perspektif penyempurna geopolitik dan geoekonomi dalam memahami konsep hubungan internasional.

Menurut Zhou, kontestasi global tidak hanya terjadi dalam ranah fisik, tetapi juga ranah simbolik. Kebudayaan, khususnya agama dan etnisitas, membentuk identitas kolektif yang mempengaruhi pola interaksi antarnegara dan masyarakat. Sebab itu, kepentingan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tetap, melainkan merupakan konstruk dari proses sosial yang terus berkembang dan mengalami dinamika.

Perbedaan utama antara pendekatan realisme dan geokultural, kata Zhou, terletak pada cara memandang sumber kekuatan itu sendiri. Realisme menekankan aspek material seperti militer dan ekonomi, sedangkan pendekatan geokultural melihat kekuatan juga berakar pada cara manusia memahami dunia. Dengan demikian, perebutan pengaruh tidak hanya terjadi melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui ruang pembentukan makna seperti media, pendidikan, dan praktik keagamaan.

Fenomena ini begitu terasa dalam praktik hubungan internasional dewasa ini. Negara-negara tidak hanya memperkuat aliansi militer, tetapi juga aktif menyebarkan pengaruh budaya melalui diplomasi publik, kerjasama pendidikan, pelestarian warisan budaya, serta industri kreatif. Apa yang disebut sebagai soft power menjadi instrumen yang kian penting dalam menentukan posisi suatu negara di panggung global, sekaligus menegaskan

bahwa kontestasi internasional kini berlangsung tidak hanya di wilayah teritorial, tetapi juga di ranah kultural dan simbolik.

Penelitian Tim Winter yang berjudul *Geocultural Diplomacy* menjelaskan bagaimana hubungan internasional kontemporer semakin ditentukan oleh mobilisasi budaya, warisan sejarah, dan identitas. Winter menunjukkan bahwa negara-negara tidak lagi hanya mengandalkan instrumen politik dan ekonomi, tetapi juga secara aktif memanfaatkan *cultural heritage* sebagai sarana diplomasi membangun pengaruh global. Dalam kerangka ini, situs sejarah, tradisi, dan memori kolektif menjadi medium strategis untuk menciptakan kedekatan emosional dan hubungan antarbangsa.

Lebih jauh, Winter menandaskan bahwa narasi sejarah yang dihidupkan kembali seperti jalur perdagangan kuno sebagaimana yang dihidupkan Tiongkok-kerap digunakan untuk membangun solidaritas lintas negara di masa kini. Dengan demikian, pendekatan geokultural tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperluas pemahaman tentang dinamika kekuasaan global.

Indonesia dan Fondasi Geokultur

Dalam konteks Asia Tenggara, dinamika ini memiliki bentuknya sendiri. Wang Gungwu telah menegaskan bahwa kawasan ini sejak lama merupakan titik temu berbagai peradaban besar. Identitasnya terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan interaksi lintas budaya yang intens. Ke depan, Asia Tenggara tidak hanya akan menjadi arena persaingan geopolitik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas budaya.

Gita Wirjawan dalam What It Takes Asia Tenggara, memaknai kebudayaan sebagai entitas tak terpisah dalam lalu lintas masa depan bangsa. Kebudayaan adalah dimensi penting bagi masa depan kepemimpinan negara. Menurut Gita, kekuatan ekonomi saja tidak cukup. Pengarusutamaan kebudayaan berkontribusi bukan hanya sebagai identitas, tetapi kompetensi yang akan membangun kepercayaan di mata dunia.

Indonesia, sesungguhnya memiliki peluang besar. Keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya adalah modal penting yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan strategis. Nilai-nilai seperti moderasi beragama dan kebhinekaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan sebagai potensi yang memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Hanya saja, potensi tersebut perlu dikelola serius. Tanpa upaya terarah, Indonesia berisiko menjadi objek dalam dinamika global. Sebaliknya, memanfaatkan kebudayaan sebagai fondasi strategi, akan membawa Indonesia tampil sebagai aktor penting yang berperan aktif membentuk arah dan makna hubungan internasional. Apalagi memang, Indonesia adalah The Natural Leader di kawasan. Kuncinya adalah ASEAN.

Dalam dunia yang terfragmentasi, kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan memengaruhi cara pandang dunia. Geopolitik mungkin mengatur batas-batas kekuasaan. Geoekonomi mendefinisikan siapa negara kaya. Tetapi geokultural memberi kedalaman makna pada batas dan definisi tersebut.

Di era multipolaritas kiwari, strategi pertahanan bukan lagi misil, drone, ataupun nuklir, tetapi kebuda-

yaan. Geostrategi yang tidak bertumpu pada budaya akan rapuh. Sebaliknya, kebudayaan yang tidak diarahkan secara strategis akan kehilangan relevansinya. Sebab itu, keduanya perlu berjalan beriringan, geopolitik sebagai strategi, geokultural sebagai fondasi. Dengan cara itu, kepemimpinan bukan hanya memperkuat bobot legitimasi, tapi juga memperjelas navigasi kepemimpinan.

Iran Dan Bayang-Bayang Armageddon

Konflik antara Iran, Amerika Serikat-Israel yang kembali memanas saat ini sering dikaitkan dengan istilah yang kerap muncul dalam media internasional, yakni Armageddon. Setiap eskalasi serangan rudal, konflik di Teluk, ataupun ancaman perang regional tidak selalu dibaca sebagai konflik geopolitik, juga kerapkali di bingkai sebagai tanda menuju perang akhir zaman. Tidak sedikit media Barat menempatkan Iran bukan sekadar rival geopolitik, tetapi ancaman apokaliptik terhadap dunia modern.

Pertanyaan tentang apakah perang Iran dengan Amerika-Israel memang benar merupakan jalan menuju Armageddon? Atau hanya narasi tersebut hanyalah konstruksi politik untuk membentuk persepsi global terhadap Iran?

Mula-mula, tulisan ini berangkat dari pandangan bahwa narasi Armageddon terhadap Iran selama ini lebih merupakan produk tafsir teologis-politik Barat daripada kenyataan sesungguhnya. Artinya, Barat dengan tujuan tertentu memanipulasi teks suci Kristen demi ambisi politik hegemoniknya. Karena itu, perang Iran melawan AS-Israel tidak bisa dibaca begitu saja sebagai konflik agama.

Sejak meletus di akhir Februari lalu, terbukti simbol dan nilai agama itu dilanggar. Misalnya, Israel terbukti menyerang sinagong orang Yahudi di Iran. Trump dengan sengaja membuat gambar dirinya menyerupai Yesus sebelum akhirnya ia hapus. Trump bahkan menghina Paus Leo XIV dan menolak berdamai.

Menyematkan istilah nubuat akhir zaman pada perang ini sangat tidak beralasan. Lagi-lagi, perang ini

murni kepentingan geopolitik, dominasi media, dan produksi ketakutan global oleh Barat.

Istilah Armageddon berasal dari tradisi Kristen Evangelikal, yang menggambarkan pertempuran akhir antara kekuatan baik dan jahat sebelum datangnya hari penghakiman. Dalam perkembangannya, sebagian kelompok Evangelikal Amerika menafsirkan konflik Timur Tengah terutama yang melibatkan Israel sebagai bagian dari nubuat akhir zaman. Israel dipandang sebagai pusat pembuktian janji ilahi, sedangkan musuh-musuh Israel sering diposisikan sebagai kekuatan anti-Tuhan.

Di sinilah Iran mulai ditempatkan dalam imajinasi apokaliptik Barat. Meletusnya Revolusi Iran 1979, sikap anti-Israel Teheran, program nuklir, dan dukungan terhadap kelompok perlawanan di Timur Tengah membuat Iran dipersepsikan sedemikian rupa sebagai ancaman eksistensial. Dalam retorika sebagian media dan elite politik Barat, Iran bukan hanya negara rival kuat, tetapi juga simbol kegelapan yang harus dihancurkan.

Masalahnya adalah tafsir tersebut bukanlah representasi universal seluruh agama. Bahkan dalam tradisi Kristen sendiri, tidak semua gereja setuju pembacaan literal tentang Armageddon itu. Banyak kalangan Kristen memandang Al Kitab sebagai simbol moral dan spiritual, bukan kita yang berisi peta geopolitik. Sedangkan dalam Islam, konsep akhir zaman memiliki struktur berbeda dan tidak identik dengan narasi perang global ala Evangelikalisme Amerika.

Karena itu, menautkan perang Iran dengan AS-Israel sebagai keniscayaan teologis sebenarnya merupakan bentuk generalisasi tafsir oleh Barat. Tafsir tertentu sengaja diproyeksikan menjadi kebenaran global. Dalam praktik

politik internasional, hal ini tentu saja berbahaya, karena agama berubah menjadi legitimasi konflik yang tadinya merupakan ruang spiritualitas.

Iran sebagai Musuh Imajinatif Geopolitik Barat

Fenomena ini semakin terlihat saat perang dan serangan militer mulai dibingkai dengan bahasa religius. Dalam kondisi demikian, perang tidak lagi dipahami sebagai persoalan diplomasi dan kepentingan negara, tetapi sebagai mandat ilahi yang dldianggap suci. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh ke belakangan, konflik Iran dengan AS-Israel memiliki akar geopolitik yang sangat nyata.

Masalahnya utamanya berkaitan dengan perebutan pengaruh regional, keamanan Israel, program nuklir Iran, jalur energi, serta dominasi strategis di Timur Tengah. Ketegangan tersebut lebih dekat dengan politik kekuasaan daripada nubuat agama. Amerika Serikat sejak lama melihat Iran sebagai ancaman terhadap hegemoni Barat di Timur Tengah. Sebaliknya, Iran memandang kehadiran militer AS dan dukungan Washington terhadap Israel sebagai bentuk imperialisme modern.

Konflik kemudian berkembang menjadi perang pengaruh yang melibatkan milisi regional, sanksi ekonomi, propaganda media, dan operasi militer terbatas. Dalam banyak pemberitaan Barat, konflik itu sering disederhanakan menjadi pertarungan yang baik versus yang jahat. Iran dibingkai sebagai ancaman permanen terhadap stabilitas dunia. Inilah yang oleh banyak pemikir disebut sebagai produksi musuh imajinatif. Sebuah negara dibentuk citranya sedemikian rupa, dan pada gilirannya

publik dunia melihatnya bukan sebagai aktor politik biasa, tetapi ancaman peradaban manusia itu sendiri.

Ketika framming itu terbentuk, maka agresi dan perang militer menjadi lebih mudah dinormalisasi dan diterima sebagai sesuatu yang sah. Sehingga, Invasi, embargo, dan serangan dapat dibenarkan atas nama penyelamatan dunia. Iran tidak tinggal diam. Iran membangun counter narasi. Pemerintah Iran menggambarkan dirinya sebagai kekuatan perlawanan terhadap dominasi Barat dan Zionisme.

Dalam konteks ini, konflik dengan AS-Israel dipahami sebagai perjuangan mempertahankan martabat dan kedaulatan dunia Muslim. Akibatnya, kedua pihak sama-sama terjebak pada simbol agama dan di saat bersamaan memperkuat legitimasi mereka masing-masing.

Situasi menjadi semakin rumit ketika media sosial mempercepat penyebaran narasi apokaliptik. Video ceramah, potongan ayat, teori konspirasi, dan propaganda perang beredar secara masif, lalu membentuk opini global. Konflik geopolitik akhirnya berubah menjadi perang narasi, dimana orang tidak lagi sekadar membicarakan rudal dan diplomasi, tetapi juga narasi tentang nubuat, akhir zaman, dan perang suci.

Bantahan Iran atas Narasi Armageddon

Dalam sejarah perang dunia yang pernah terjadi menunjukkan bahwa setiap zaman selalu memiliki Armageddon-nya sendiri. Perang Dunia, Perang Dingin, Invasi Irak, hingga konflik Suriah pernah dianggap sebagai awal mula kiamat. Namun, semua itu pada

akhirnya lebih banyak memperlihatkan dinamika politik dan ambisi kekuasaan manusia daripada kepastian metafisik tentang akhir dunia.

Sebab itu, membaca perang Iran melawan AS-Israel semata sebagai jalan menuju Armageddon justru berisiko menutup ruang penerungan. Ketika perang dianggap bagian dari takdir ilahi, diplomasi menjadi lemah dan perdamaian kehilangan legitimasi moralnya. Konflik akan berubah menjadi sesuatu yang dianggap sebagai keniscayaan.

Di titik inilah kritik terhadap narasi Armageddon ala Barat menjadi penting. Konflik Iran dengan AS-Israel harus dibaca dari kacamata historis, pendekatan politik, dan neraca yang adil. Bahwa di balik semua retorika agama, politik yang dicampur agama akan melahirkan kepentingan ekonomi, dominasi wilayah, keamanan nasional, dan perebutan pengaruh global. Agama memang digunakan sebagai simbol, tetapi politik tetap menjadi penggerak utamanya.

Armageddon, dengan demikian, bukan sekadar nubuat. Ia telah menjadi bahasa kekuasaan itu sendiri. Sebuah istilah religius yang dipakai untuk membangun ketakutan, memperkuat identitas politik, dan membenarkan konflik internasional. Dalam konteks Iran, narasi itu memperlihatkan bagaimana tafsir agama dapat berubah menjadi instrumen geopolitik modern.

Maka, membantah klaim Armageddon ala Barat tidak serta menolak agama, tetapi menolak penggunaan agama sebagai alat legitimasi perang. Konsep Armageddon harus dibaca secara utuh dan harus melihat konteksnya. Dunia tidak membutuhkan perang suci baru di Timur Tengah. Pertama, era Perang Agama sudah lama berakhir.

Kedua, tidak ada satu agama pun yang melegitimasi perang. Dan dalam konteks ini, Iran sedang membantah tafsir sepihak Barat terhadap Armageddon. Bagi Iran, perang ini adalah soal kedaulatan, harga diri, dan martabat bangsanya. Demikianlah.



What It Takes Asia Tenggara: Pandangan Seorang Asia Tenggara

Pada tahun 2025, Gita Wirjawan menulis sebuah buku penting. Titik berangkat buku ini adalah kegelisahan seorang Gita Wirjawan dalam melihat Asia Tenggara. Buku ini adalah buah dari pengalaman, hasil diskusi panjang bersama para akademisi, pemikir cum intelektual Asia Tenggara, Asia hingga Eropa, bersama praktisi, serta berbagai narasumber di podcast Endgame yang dibinanya. Ulasan buku sebagian besarnya adalah hasil dari diskusi di Precourt Institute for Energy, Doer School of Sustainability di Universitas Stanford tempat Gita menjadi visiting scholar; di Harvard University, dan di School of Government and Public Policy (SGPP) di Indonesia tempat dimana ia menjadi penasehat sejak 2014.

Telaah bersama David Cohen, Thomas Fingar, Scot Marciel, serta Natalie Longmire-Kulis membantu Gita menjadikan tiga publikasi kunci yang menjadi kerangka dasar penulisan buku ini. Menariknya, buku ini mengcapture permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi negara-negara ASEAN di kawasan yang kemudian dinarasikan dari sudut pandang seorang Asia Tenggara. Secara garis besar buku ini membahas delapan tema penting; sejarah, modal ekonomi, pendidikan, keberlanjutan (*sustainability*), internet, kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence)*, BRICS+ dan BRI, Vektor Asia Tenggara.

Delapan topik dalam buku ini merangkum penelitian dan pengamatannya selama delapan tahun terakhir dan memberi penulis kerangka epistemik dalam mendedahkan analisisnya sekaligus menggambarkan peta jalan yang harus dilakukan para pemimpin Asia Tenggara untuk keluar sebagai pemain penting di kancah global. Tetapi bagi saya, secara garis besar, topik yang cukup menonjol yang dilengkapi data dan gagasan bernas dari

Gita dalam buku ini ada tiga, yakni ekonomi, pendidikan, dan geopolitik. Ketiga topik ini menurut saya -setelah membaca buku ini- adalah pembahasan-pembahasan krusial yang dihadapi Asia Tenggara.

Vektor Asia Tenggara

Untuk membahas buku ini, mula-mula penting mengetengahkan fakta Asia Tenggara sebagai kawasan yang unik dan strategis. Jika melihat sejarah panjang, faktor geografis-demografis, dan budaya yang beragam, maka tidak ada alasan bagi pemimpin Asia Tenggara berkutat di tepi kesadaran global. Kawasan yang didominasi 60-70% laut ini menyimpan potensi besar yang dapat menopangnya menjadi kekuatan inti dunia. Dalam buku ini, Gita menarasikan cukup baik beberapa problem mendasar yang menghambat kemajuan Asia Tenggara.

Pertama, mengapa kawasan sebesar Asia Tenggara dengan populasi terbesar ketiga setelah India, Tiongkok dan ekonomi terbesar keenam setelah AS, Tiongkok, Uni Eropa, Jerman, dan Jepang belum mendapatkan pengakuan signifikan di mata dunia. Bagi Gita, jawabannya adalah oleh karena penduduknya belum mampu secara kolektif memproyeksikan hard power dan soft power cukup kuat.

Jawaban ini masuk akal. Pasalnya, kawasan ini belum mampu memproduksi ponsel kelas atas yang digunakan oleh miliaran orang di dunia. Fakta ini salah satunya terjadi di Indonesia. Di pasar domestik, ponsel buatan lokal: Advance, Evercross, Polytron sepi peminat. Faktor segmentasi dan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang merakit ponsel asing di dalam negeri cenderung menjadi penghambat pasaran

ponsel buatan lokal lesu di dalam negeri sendiri. Tetapi bukan itu poinnya.

Saya ingin menjelaskan secara sederhana bahwa produksi perangkat canggih lokal berpengaruh besar terhadap posisi suatu negara di panggung global. Negara dengan ekosistem inovasi tinggi, pemrograman, teknologi canggih, dan industri manufaktur yang kuat adalah daya tawar menarik modal moneter finansial ke dalam negeri yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih tinggi.

Ini penting dijawab, sebab permasalahan utama Asia Tenggara adalah pertumbuhan ekonomi. Buku ini menjelaskan bagaimana kegagalan akumulasi modal asing masuk ke Asia Tenggara. Perekonomian Asia Tenggara yang memiliki rasio pajak yang relatif rendah yang hanya berkisar 10 sampai 16 persen jauh tertinggal oleh negara maju yang melampaui 30 persen. Sementara, pendapatan per kapita sebagian besar negara Asia Tenggara di bawah 5.500 dolar AS.

Kondisi ini menyebabkan rasio PDB negara-negara tersebut rendah. Sebagai perbandingan, PDB per kapita negara-negara Asia Tenggara tercatat sebesar 15.156 dolar AS di luar Singapura dengan 84.734 dolar as per kapita. Menurut Gita, faktor ini disebabkan karena minimnya arus pergerakan modal asing kecuali Singapura. Singapura dalam konteks ini adalah negara maju di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar 214 miliar dolar AS.

Permasalahan ini kelihatan sangat sederhana. Tetapi bagi Gita, Singapura sejak lama menjadi negara penerima utama PMA dalam jumlah besar bukan karena jumlah populasi, melainkan berkat reputasinya mengadopsi

sistem dan institusi demokrasi liberal. Kemampuan menarik investor modal asing ke dalam suatu negara tidak selalu ditentukan oleh jumlah populasi, letak geografis, ideologi, atau melimpahnya sumber daya alam. Keberhasilan Singapura ditentukan oleh metode dan pendekatan. Dalam hal ini, Singapura menerapkan sistem *Easy of Doing Business* (kemudahan berbisnis). Sebab itu, Singapura dipercaya sebagai negara utama mitra investor asing di Asia Tenggara. Struktur yang sehat, bersih, akuntabel dan transparan adalah sebab citra yang baik untuk menarik para investor dunia.

Berbanding terbalik dari Singapura, negara Asia Tenggara lainnya menghadapi kesulitan menarik modal asing. Kesulitan sebagian besar negara Asia Tenggara terletak pada kegagalan strategis, yakni kompetisi bisnis yang kurang sehat, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan infrastruktur yang macet. Selain itu, masalah korupsi yang merajalela dan nepotisme akut menjadi hambatan spesifik tak terkecuali Indonesia. Wabil khusus Indonesia. Rapor korupsi kita mendapat nilai merah.

Di banyak lembaga riset dan survei independen menyebut angka korupsi di Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara setara Laos dan di atas Singapura, Malaysia, Vietnam dan Timor Leste. Ditambah lagi fakta bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia bersifat sentripetal, dimana pembangunan yang berpusat di kota-kota seperti Jawa mengakibatkan gap pembangunan ekonomi di daerah-daerah dan di kota. Oleh karena itu, para pemimpin Asia Tenggara harus menunjukkan pergeseran yang nyata menuju kepemimpinan meritokratis agar hambatan-hambatan tersebut hilang perlahan demi perlahan demi tujuan menarik modal asing.

Permasalahan kedua, pendidikan. Semua orang bersepakat bahwa dalam pendidikan, pengajaran berkualitas akan membantu mengembangkan satu aset penting dari seorang siswa: kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis mencakup daya adaptasi dan daya saing terutama di tengah zaman yang melaju sangat cepat. Faktor perubahan ini didorong oleh kecanggihan teknologi, ekonomi, dan geopolitik. Untuk itu, mengajari seni berpikir kritis bagi siswa adalah *sine qua non* (syarat mutlak). Guru cakap, kompeten, dan berkualitas sangat dibutuhkan.

Dalam buku ini, Gita menunjukkan satu argumen menarik. Bahwa pendidikan sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan imajinasi ketimbang formulasi. Seorang guru dengan bekal pengetahuan fisika yang kuat yang diimbangi dengan kepiawaian bercerita jauh lebih bisa memantik kreativitas dan imajinasi siswa dari pada guru yang hanya memiliki pengetahuan fisika yang kuat tapi tidak mampu bercerita.

Faktanya, sebagian besar siswa di Asia Tenggara tidak dididik oleh guru yang berkualitas. Penyebabnya beragam. Penyebab utama adalah tidak terbukanya peluang kolaborasi pendidik dan pelajar dalam negeri dari luar negeri, sehingga peluang berbagi perspektif dan insight lintas negara nyaris tidak ada. Padahal, pendanaan pertukaran pendidik atau pelajar berguna untuk memberi peluang kepada mereka mengakses pengetahuan dari sumber terbaik, kemudian memberi mereka peluang berkontribusi dalam negeri setelah menyelesaikan studi. Selain itu, keterbukaan pikiran dalam pengalaman Gita, adalah masalah berikutnya, kendati investasi di bidang pendidikan memang masalah pokok. Hal ini terlihat dari

skor PISA IQ orang Asia Tenggara yang berada di bawah rata-rata, Singapura sebagai pengecualian.

Padahal peningkatan jumlah mahasiswa internasional yang kuliah di dalam negeri tidak hanya memperkaya keberagaman wacana di ruang kuliah, tetapi mendorong kolaborasi yang lebih luas. Tidak bisa dinafikkan, keterbukaan pikiran yang diperoleh dari keterpaduan keberagaman gagasan dengan keterbukaan terhadap pengalaman baru adalah resep lahirnya peradaban besar. Hal lain yang lebih krusial di sektor pendidikan adalah perguruan tinggi. Kawasan Asia Tenggara memiliki sepuluh ribu perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswanya sekitar sembilan belas juta orang yang tersebar di seluruh kawasan.

Universitas bukan hanya tempat pendidikan bagi mahasiswa menjadi praktisi sekaligus peneliti, tetapi tempat memproyeksikan soft power bagi suatu negara. Menurut Gita, kampus-kampus yang ada di Asia Tenggara harus memperhatikan pendidikan vokasional dengan cara yang lebih baik dan tak kalah penting dan mendesak adalah memberikan akses lebih luas kepada mahasiswa dalam disiplin ilmu sains, teknologi, engineering, dan matematika. Cermin kemajuan STEM terutama di Asia itu adalah Tiongkok. Melalui STEM, Tiongkok memproyeksikan soft powernya melalui penciptaan dan manufaktur berbagai barang dan jasa dengan kualitas yang sangat kompetitif dengan harga murah.

Fokus tunggal Tiongkok pada STEM menjadikannya negara sebagai pusat utama manufaktur dunia dengan persentase 35 persen barang dan jasa di dunia dengan produktivitas marginal yang sulit tertandingi dalam waktu dekat. Bandingkan dengan Asia Tenggara dengan

jumlah lulus STEM sekitar 20 persen dari total seluruh negara kawasan yang kalah jauh dari Tiongkok dengan angka 41 persen. Pencapaian pada bidang STEM membawa Tiongkok pada supremasi teknologi di industri elektronik, energi terbarukan, kendaraan listrik, dan drone melampaui Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang dulu dikenal sebagai pemimpin inovasi di bidang teknologi.

Jika Amerika Serikat dan negara-negara Barat dikenal berhasil melakukan lompatan teknologi dari titik nol ke satu angka sebagaimana peluncuran Apollo di bulan serta penemuan iPhone sebagai brand ambassador yang mendefinisikan ulang teknologi seluler. Maka, saat ini Tiongkok melesat dua langkah. Tiongkok tidak menggeser angka nol ke satu, melainkan dari satu angka ke angka berikutnya.

Fakta ini tidak terbantahkan. Terbukti bahwa dominasi afiliasi perusahaan AS; FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google) dirobohkan oleh BAT (Baidu, Alibaba, dan Tencen), milik Tiongkok. Dua negara ini tidak salah jika disebut sebagai musuh abadi. Di bidang AI, kecerdasan buatan, kontestasi keduanya berlanjut. ChatGPT yang diproyeksikan sebagai AI paling akurat, kini terpental dengan munculnya DeepSeek-R1, sebuah model bahasa LLM (Large Language Model) berbasis open sources milik perusahaan Tiongkok yang diklaim mampu menyaingi ChatGPT milik OpenAI dengan biaya murah beberapa kali lipat serta lebih akurat.

Tak pelak lagi. Penguasaan pada STEM adalah modal negara mana pun sangat penting untuk memajukan inovasi teknologi yang pada gilirannya menciptakan titik temu penawaran dan permintaan barang jasa. Untuk itu,

mendorong kualitas pendidikan terutama di bidang STEM adalah tanggung jawab kepemimpinan nasional merumuskan ulang format masing-masing negara untuk memastikan alokasi kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan lainnya secara optimal demi mendorong inovasi teknologi yang kuat.

Permasalah ketiga yang jauh lebih menentukan, geopolitik. ASEAN sejatinya merupakan representasi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi Asia Tenggara di kawasan. Sepuluh negara di dalamnya; Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Singapura, adalah organisasi antar pemerintah yang berdiri dengan tiga pilar utama, yakni keamanan politik dan perdamaian regional, komunitas ekonomi, dan komunitas budaya. Di kawasan, ASEAN berpegang pada prinsip subsidiaritas yang kerap disebut prinsip nonintervensi, dimana negara-negara anggota tidak diperbolehkan mengintervensi urusan yurisdiksi dalam negeri negara-negara anggota, kecuali jika menyangkut isu kawasan atau global.

Dalam kajian geopolitik, posisi Asia Tenggara dalam kaitannya terhadap kontestasi AS-Tiongkok relatif netral. Menjaga hubungan baik terhadap kedua negara adidaya tersebut adalah keniscayaan. Amerika Serikat tengah mendorong tatanan dunia dengan prinsip multipolaritas dengan sistem aliansi dengan gaya baru. Saat Donald Trump kembali terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, kebijakan ekonomi proteksionis diumumkan. Pemberlakukan kebijakan tarif dagang segera diberlakukan demi ambisi Make America Great Again.

Sementara, Tiongkok dengan kebijakan Belt Road Initiativenya tetap berfokus pada peningkatan konekti-

vitas perdagangan dengan tujuan pembangunan infrastruktur; jalan, pelabuhan, kereta cepat, yang menghubungkan Asia hingga Amerika dengan tujuan mengamankan suplai energi dan meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi di dunia. Di tengah persaingan geopolitik yang terjadi di depan mata terutama yang terjadi di Timur Tengah, Asia Tenggara harus memainkan peran proaktif untuk memajukan sekaligus melindungi kawasan. Asia Tenggara telah beradaptasi dari pengalaman kolonial di masa lalu, sehingga cukup mahir merangkul multipolaritas.

Hal ini terlihat dari kemampuan Asia Tenggara menerima multikultural, multiekonomi, dan multiagama tanpa mengalami banyak pertumpahan darah. Sebab itu, kerangka kerja multilateral perlu didorong untuk meningkatkan partisipasi aktifnya di kancah global. Menurut Gita, pemimpin Asia Tenggara perlu mempertimbangkan keanggotaan mereka di OECD dan BRICS serta organisasi multilateral dunia lainnya. Keanggotaan ini adalah nilai strategis demi memperkuat posisi dan pengaruh dalam tatanan geopolitik.

Dalam konteks ekonomi misalnya, BRICS memiliki PDB 29 persen dari total PDB dunia, yaitu 30 triliun dolar AS, sementara negara G7 sebesar 39 persen atau setara 45 triliun dolar AS. Kehadiran BRICS dan G7 menjadi faktor penting untuk pembangunan Asia Tenggara. ASEAN dalam hal ini, harus melihat BRICS dan G7 sebagai keuntungan strategis. Menjalin kerjasama erat terhadap AS dan Tiongkok akan memperbesar peluang memperoleh modal teknologi dan ekonomi. Apalagi memang, hambatan finansial menjadi sebab lesunya pembangunan industri teknologi bagi negara-negara Asia Tenggara.

Terlepas dari pertanyaan apakah pendekatan itu berhasil atau tidak, pada akhirnya pendekatan ini bertujuan menghilangkan asimetri perdagangan dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Partisipasi aktif dalam berbagai organisasi kerjasama internasional lainnya seharusnya dipandang sebagai konsekuensi alami dari perjalanan panjang kawasan ini.

Untuk Indonesia, posisinya sebagai primus inter pares, yakni pertama diantara yang setara, perlu memainkan perannya bukan hanya sebagai natural leader (pemimpin alami) ASEAN, tetapi menjadi penentu arah dan agenda. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia adalah negara yang mungkin unggul dalam beberapa bidang. Karena itu, posisinya sebagai pemimpin natural, harus bisa memimpin ASEAN setidaknya dalam empat isu strategis; transisi energi hijau, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan stabilitas Laut Cina Selatan. Selain itu, Indonesia bisa menjadi pemimpin moral ASEAN untuk memperkuat soft diplomasi melalui kebudayaan, keanekaragaman, keberagaman, dan nilai strategis kawasan.

Jalan Ke Depan

Pertanyaan tentang, lalu apa yang bisa dilakukan Asia Tenggara untuk mencapai inti kekuatan global? Dalam buku ini, Gita Wirjawan menjawabnya dengan beberapa rekomendasi penting. Langkah awal yang sangat krusial, yakni bagaimanapun menghargai sejarah kawasan dengan kisah luar biasa tentang kolonialisme dan perdamaian sangat penting. Kawasan ini relatif lebih kuat menciptakan stabilitas di tengah keberagaman selama ribuan tahun dibanding negara-negara lain di dunia.

Saatnya pemimpin ASEAN menyadari peluang unik yang mereka miliki lalu memusatkan perhatian pada bidang-bidang prioritas utama.

Kedua, pemerintah harus menunjukkan pergeseran kepemimpinan strategis ke arah meritokratis, tidak lagi patronase. Dan memperagakan praktek kepemimpinan yang transparan dan akuntabel guna mengatasi hambatan-hambatan spesifik yang menghalangi kemajuan Asia Tenggara.

Ketiga, negara-negara di Asia Tenggara perlu proaktif berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, dan ekonomi berkelanjutan. Sebab, pendidikan memainkan peran penting membentuk relevansi individu maupun negara. Investasi dan fokus pembangunan di bidang STEM dengan sendirinya akan melahirkan kompetensi berharga yang dibutuhkan Asia Tenggara untuk memperkuat posisinya terutama di bidang inovasi, teknologi, dan ekonomi.

Terakhir, penguatan multipolaritas. Asia Tenggara harus bisa beradaptasi dengan tatanan multipolar dengan langkah terukur dan tetap menjaga keseimbangan strategis. Mengadopsi strategi ini berarti menguatkan peran dari berbagai arah. Para pemimpin Asia Tenggara harus melihat strategi ini sebagai cara memperluas ruang gerak untuk tetap terhubung dengan berbagai blok ekonomi dan aliansi geopolitik yang ada. Itu.

Bagaimana "Masa Depan Dunia"



Masa Depan Dunia adalah salah satu buku rekomended untuk memahami mengapa realitas geopolitik dunia bisa terjadi seperti saat sekarang ini. Di dalam buku ini, Kamaruzzaman menyajikan tujuh argumennya yang terangkum dalam tujuh bab. Penulisan buku ini adalah kelanjutan dari buku Satu Dasawarsa the Clash of Civilization: Membongkar Politik Amerika di Pentas Dunia, yang telah ia tulis pada tahun 2003. Buku Masa Depan Dunia ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukannya selama puluhan tahun. Ketika menulisnya, ia berumur 25 tahun dan baru benar-benar selesai ketika usianya menginjak 39 tahun.

Berbeda penulis-penulis buku-buku berat lainnya, Kamaruzzaman menyajikan buku ini dengan bahasa sederhana, lugas, dan cukup sistematis. Penulisan buku ini berangkat dari korespondensi panjang, diskusi, silaturahmi intelektual, dan perjumpaan-perjumpaannya dengan pemikir-pemikir seperti, Stephen Roche, Christoper Joll, Ken Miichi, Tatsuya Tanami, Michiko Taki, Michiko Yoshida, Azyumardi Azra, Taufik Abdullah, Eman Hermawan, dan pemikir-pemikir lainnya.

Secara pribadi, buku ini tidak hanya penting, melainkan bacaan yang melegitimasi keyakinan-keyakinan saya selama ini bahwa tatanan global dunia saat ini adalah by design oleh satu kekuatan tunggal. Buku ini sekaligus mengafirmasi beberapa analisis-analisis saya terkait prediksi-prediksi yang akan terjadi kedepan.

Dalam buku ini juga, Kamaruzzaman sangat kuat menyajikan hipotesisnya. Ia menjelaskan dengan sangat baik bagaimana Barat membangun Order lalu disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kamaruzzaman tidak menafikkan bahwa karya Samuel Huntington: The Clash

of Civilizations and Remaking of World Order dan buku-buku murid Huntington: Francis Fukuyama: The Great Disruption, The Last Man and The Last History, The Origins of Political Order, memberinya petunjuk dalam membedah tatanan dunia dengan tajam dan kritis. Selain itu, karya fenomenal Henry Kissinger: World Order dan Diplomacy, membentuk keyakinan geopolitiknya dan selanjutnya ia paparkan di bab akhir dalam buku ini.

Bermula dan Sementara Itu

Order dalam buku ini adalah kata kunci untuk memahami bagaimana dunia terbentuk seperti sekarang. Mula-mula, istilah order diambil dari konsep Alexis de Tocqueville. Alexis mengartikan order sebagai way things are arranged. Order dalam konsep ini adalah segitiga yang saling berhubungan yang dinyatakan melalui persaingan antar negara-negara di dunia. Negara-negara regional order (negara-negara berkembang) agar bisa merangsek ke jajaran international order harus melalui persaingan kekuasaan dan konflik.

Persaingan mencapai puncak tertinggi order harus dijalani melalui peperangan. Itu sebabnya, setiap kemunculan negara maju pasti membawa perangkat order baru dan selamanya pasti dimulai dengan peperangan. Siapa yang memenangkan peperangan, dialah yang berhak menciptakan tatanan international. Pasca perang dingin, dunia berubah menjadi unipolar dengan Barat sebagai ordernya dan dipimpin Amerika Serikat.

Terkait ini, sarjana-sarjana Barat telah menulisnya dengan sangat provokatif. Francis Fukuyama misalnya dalam bukunya The Last Man and The Last History. Bahwa kapitalisme-liberalisme Barat terbukti lebih kuat

ketimbang komunisme-sosialisme Timur: Uni Soviet. Ada Samuel Huntington dalam The Clash of Civilization, menggagas desain order kontemporer Barat. Ia mengupas perjalanan order-order yang pernah ada.

Kelemahan Eropa, China, Buddhisme, Hinduisme, dan Islamisme dipetakan. Bahwa pengalaman perang di masa lampau adalah dasar yang menjadi keberanian bagi Barat untuk mengatakan bahwa Barat yang terbaik hari ini. Di masa depan, Barat menjadi pemain utama, dimana masa depan Barat adalah kapitalisme pada sistem ekonominya dan demokrasi liberal sebagai sistem politiknya.

Untuk itu, Barat memunculkan konflik 10 tahun sekali dengan peradaban lainnya. Hal ini dilakukan semata-mata demi menghilangkan pengaruh Non-Barat. Apalagi memang dalam sejarahnya, Barat memulai peradaban mereka dengan militer, invasi, dan penyebaran agama. Dalam sejarah, peradaban Barat sesungguhnya adalah peradaban Eropa yang berasal dari Euro-Amerika dan Atlantik Utara.

Secara kebudayaan, Eropa mewarisi Yunani dan Romawi. Kebudayaan Eropa banyak dipengaruhi oleh pemikiran, seni, musik, bahasa, etnik, dan agama dari Yunani dan Romawi. Secara bahasa, Barat menggunakan bahasa Inggris. Sebelum berbahasa Inggris, di masa-masa awal, bahasa Latin adalah bahasa kerajaan yang lebih populer. Baru di tahun 1362 bahasa Inggris menjadi bahasa supremasi ketika raja pada saat itu menggunakannya dalam pidato resmi kerajaan.

Dalam sistem agama, masyarakat Barat sesungguhnya tidak dihuni oleh agama dari tradisi Abrahamik. Pengaruh ajaran dari filsuf Yunani dan Romawi sangat

membekas di Eropa kala itu. Sementara, agama Kristen baru menyebar ke Eropa sekitar abad keempat masehi. Meski demikian, Barat tidak bisa selalu identik dengan Kristen. Sebab, pasca Haskalah -gerakan intelektual Yahudi abad 18-19 yang mengadopsi modernitas, rasionalisme, dan pendidikan sekuler-, kaum Yahudi berupaya mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Non-Yahudi.

Kaum Yahudi meyakini mereka adalah manusia pilihan Tuhan yang harus menyampaikan kebenaran kitab Talmud, sehingga mereka menyebarkan pengaruh Judaisme ke seantero dunia. Dalam sejarahnya, kaum Yahudi mengalami berbagai peristiwa kelam. Yang paling berdarah adalah pembantaian yang dilakukan Hitler.

Ketika Hitler melakukan proses genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa, mereka tidak membalas membantai bangsa Eropa, melainkan melakukan pencerahan Yahudi. Faktor ini pada gilirannya sukses menginfiltrasi Barat, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan kemerdekaan sebagai negara Israel, tetapi menjadi kekuatan utama yang menguasai sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Baik Yahudi dan Kristen, agama dalam kepercayaan Barat memainkan peran cukup signifikan.

Hanya saja, peran agama dipisahkan dari ruang publik dan kegiatan sosial politik. Eropa muncul sebagai kekuatan besar ketika kolonialisme disebarkan di wilayah Barat dan Timur pada abad ke-15 dan 17. Abad ini disebut Huntingtion sebagai era politik global. Era ini terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1540-1690 disebut era konsolidasi sebagai bangsa modern. Tahap kedua, pada tahun 1792-1870 disebut dengan era nation-state.

Salah satu temuan berharga Eropa adalah Amerika. Berawal dari pelayaran yang dilakukan oleh Amerigo Vespucci dari Florentine yang melakukan pelayaran ke Brazil. Amerigo kemudian mempublikasikan hasil temuannya. Sebagai balas jasa atas sumbangsih Amerigo, namanya kemudian menjadi nama wilayah tersebut (America). Saat itu, Eropa yang datang ke benua tersebut lebih tertarik mendiami Amerika bagian utara, yang nantinya akan menjadi Amerika Serikat dan Kanada. Maka tak heran, Amerika Serikat dan Kanada adalah Eropa itu sendiri.

Kendati belakangan kolonialisme Inggris menguat di sana, tetapi Amerika berhasil merdeka dari Inggris dan mendirikan Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam konteks geopolitik modern, faktor Amerika Serikat didaulat sebagai pemimpin negara Barat karena sumbangsihnya terhadap tiga perang besar pada abad 20, yakni Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin.

Setelah Itu dan Ternyata

Pasca perang dingin, Amerika Serikat mendesain tatanan (order) lebih massif dari sebelumnya dan diberlakukan di seluruh dunia. Memasuki abad 21, Amerika Serikat menemukan batu sandungan yang akan membahayakan mereka. Mereka adalah China. AS menganggap China telah melakukan lompatan signifikan beberapa dasawarsa belakangan. Bahkan para ahli strategi AS dalam banyak karya-karyanya memfokuskan penelitiannya untuk mempelajari China.

Selain China, pasca revolusi 1979, Iran masuk sebagai daftar negara berbahaya bagi kepentingan AS di Timur Tengah. Dalam mempersiapkan diri menghadapi

tahun-tahun mendatang, AS mendesain satu draft besar yang disebut Mapping Global Future. Draft ini berisi skenario yang akan dihadapi AS setiap lima tahun ke depan, yang dinyatakan dalam Laporan Global Trends. Dalam skenario Global Trends 2025 dan 2030, China dan BRICS adalah ancaman nyata.

Bahkan, lembaga Think Tank di Amerika Serikat telah menganalisis China dan Iran secara khusus. Militer AS menilai kekuatan intelijen dan kemampuan militer China telah berkembang sangat kuat. Sebelum sampai ke China, menyelesaikan Islam terlebih dahulu adalah fokus Barat. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Barat melirik Islam sebagai order yang mengancam kepentingan mereka. Kita lihat pada tahun 2001, bagaimana persoalan terorisme mengguncang dunia.

Labelisasi terorisme demikian mudahnya disematkan kepada negara, organisasi dan individu tertentu hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan Washington. Islamphobia merajalela, Osama bin Laden dibunuh, dan Amerika Serikat menyerang membabi buta di Timur Tengah. Sepuluh tahun berikutnya: 2011, dunia Timur Tengah kembali digoncang. Diawali dengan Arab Spring, beberapa negara Timur Tengah tumbang. Presiden Libya, Muammar Qaddafi, bahkan harus dibunuh dan dipertontonkan di hadapan media seluruh dunia.

Salah satu alasan mereka harus dibunuh karena tidak ingin menuruti kemauan Amerika Serikat kala itu. Apa yang dilakukan Barat di Timur Tengah dan kepada negara-negara Islam lainnya adalah cara Barat agar hegemoninya tetap menancap. Sebab, salah satu syarat terpenuhinya tatanan dunia menurut Barat adalah menghapus dan menghilangkan peran Islam. Para penulis,

peneliti, pengambil kebijakan strategis bahkan mengarahkan kajian dan rekomendasinya kepada upaya destruksi Islam.

Selain itu, pemikir-pemikir Barat sampai rela mengeluarkan daya upayanya sekuat tenaga mengkotak-kotak Islam ke dalam istilah akademis. Pengkotakan ini dilakukan dengan membagi Islam ke dalam "gerakan yang sesuai" dan "yang tidak sesuai". "Gerakan yang sesuai" dimaksud di sini tentunya adalah kelompok-kelompok Islam yang sejalan dengan ideologi dan kepentingan Barat, seperti sekularisme, negara-bangsa, dan modernisme. Sementara yang dikotakkan ke dalam "yang tidak sesuai" disebut fundamentalisme, radikalisme, dan puritanisme.

Dengan fragmentasi seperti itu kekuatan Islam akan sulit terkonsolidasikan. Kendati demikian, banyak studi yang mengungkap banyak hal lain terkait fragmentasi Islam. Bahwa pengkotakan Islam ke dalam istilah-istilah semacam itu sebenarnya kabur. Sebab, kelompok Islam fundamentalisme-puritanisme seperti Wahabi, justru menjadi alat Barat untuk memproteksi kepentingan politiknya di Arab Saudi.

Dokumen Epstein bahkan mengungkap, ekstrimisme Islam yang diwakili Al-Qaeda dan ISIS adalah peliharaan Amerika Serikat. Hal yang sama terjadi dengan kelompok modernisme, yang dipakai untuk menyerang *local wisdom*, yang selama ini dijaga oleh kelompok Islam tradisional. Dalam konteks ideologi, isu Sunni-Syi'ah dimainkan sebagai propaganda Barat untuk memprovokasi pemimpin Islam Sunni agar tidak berada dalam satu barisan mendukung perjuangan Iran melawan AS-Zionisme Israel seperti yang terjadi saat ini.

Akhirnya

Ke depan, Barat mengendalikan dunia tetap akan menggunakan skenario konflik. Dalih yang digunakan akan selalu sama: kestabilan, isu nuklir, hak asasi manusia, dan perdamaian. Selain cara militer, Barat sejak lama menggunakan sains sebagai hegemoni agar bisa menanamkan pengaruhnya di dunia. Hal ini bisa kita lihat pada standar publikasi dan penerbitan. Scopus dijadikan standar internasional untuk menilai kualitas akademik seseorang.

Karir seseorang dianggap mentereng di dunia akademik apabila jurnalnya tembus ke jurnal Scopus. Sehingga, mereka yang tidak mampu menerbitkan artikelnya di jurnal bergengsi di level internasional, tidak akan dianggap sebagai bagian dari kontribusi dalam dunia akademik. Dengan demikian, produksi artikel ilmiah bergeser menjadi sistem kapitalisasi ilmu pengetahuan.

Di sektor teknologi, Barat merekayasa ilmu pengetahuan untuk mendukung proyek global governance. Sebelum kesana, teknologi mula-mula dihadirkan untuk membantu manusia. Selama ini manusia menganggap teknologi sebagai teman bagi manusia. Tetapi, Neil Postman mengatakan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri, ia selamanya hadir bersama ideologi, salah satu efeknya adalah ketergantungan. Di hadapan teknologi, manusia tidak akan menjadi subjek otonom, melainkan subjek yang dipengaruhi.

Dengan menciptakan ketergantungan terhadap teknologi, manusia akan mudah dikendalikan. Sederhananya, tujuan Barat menciptakan teknologi untuk keseragaman. Keberagaman manusia ingin diseragamkan oleh Barat melalui teknologi, baik sistem berpikirnya,

sistem pemerintahannya, kebudayaannya. Fenomena ini disebut dengan Uniformity in Diversity (keseragaman dalam keberagaman).

Proyek global governances adalah tatanan dunia tunggal yang akan melalui tahapan rekayasa sedemikian rupa. Di dalam proyek ini, sistem tata kelola dunia akan dioperatori oleh global citizen. Global citizen adalah tahap perkembangan masyarakat modern yang telah melampaui masyarakat tradisional yang masih percaya agama dan mitos. Kosmologi dalam konsep ini adalah masyarakat yang menjadikan sains dan teknologi sebagai raja yang dapat mengatasi masalah eksistensial. Apa yang kita sebut sebagai masyarakat kosmopolitan sesungguhnya adalah bentuk masyarakat yang diinginkan Barat, dimana semua masyarakat akan terhubung tanpa batas dan sekat primordial.

Hampir separuh perjalanan telah dilalui. Ketika era pencerahan memunculkan revolusi industri, manusia mulai memetik perjuangannya selama berabad-abad sebelumnya. Manusia telah memasuki tahapan industrialisasi dan selanjutnya mengusung modernisme sebagai jalan pembaratan masyarakat di seluruh dunia.

Ambisi Barat sebenarnya tidak berhenti di sini. Mereka terus mengupayakan penciptaan satu desain besar yang berbeda dengan pengalaman hidup manusia yang pernah dilalui selama ini. Mereka menyebutnya dengan istilah Planetary Civilization. Hari ini, pra-kondisinya sudah tercapai. Kecerdasan buatan hadir dan memenuhi seluruh hajat hidup banyak manusia. Sebagai bayangan, Kamaruzzaman menjelaskan planetary civilization erat kaitannya dengan Higher Intelligence. Dalam skenario ini, sains dan teknologi telah membuktikan apapun yang gaib.

Jika sains sebelumnya hanya membuktikan gejala empiris, maka ke depan sains akan membuktikan semuanya.

Keberhasilan ini akan diikuti oleh masyarakat seluruh dunia lalu manusia di dunia ini akan mengabdikan dirinya pada sains dan teknologi. Tetapi, kemajuan peradaban ini sekaligus akan menggerus kemanusiaan dan akan membawa manusia pada kehancuran. Saat ini, Barat berupaya keras melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa. Tujuannya adalah eksploitasi energi yang akan digunakan untuk menghubungkan manusia dengan galaksi dan bimasakti.

Untuk mencapainya, proyek SETI *(Search for Extraterrestial Intelligence)* dilakukan. Manusia mencari jalan keluar untuk mengatasi kekurangan energi di bumi di masa mendatang. Barat meyakini terdapat potensi energi jauh lebih besar yang tersimpan di planet-planet selain di bumi. Energi yang besar ini akan digunakan untuk mendukung proyek ketahanan hidup manusia di masa mendatang. Sederhananya, proyek ini adalah proyek keabadiaan. Sebab, berita tentang kiamat merupakan perhatian utama pemikir dan ilmuwan Barat sebagaimana yang selalu mereka tampilkan di film-film Hollywood. Di titik inilah, energi luar angkasa sangat mereka butuhkan untuk mendukung kelangsungan hidup dalam keabadian.

Pada titik dimana Barat memimpikan kemajuan peradaban, di saat bersamaan nantinya prediksi-prediksi yang dinyatakan dalam al-Qur'an akan terbukti. Di masa ini, kebangkitan Islam benar-benar terwujud. Dalam konteks ini, hanya Islam yang memiliki perangkat yang paling siap dalam menyambut planetary civilization. Hanya saja, hal mendasar dari kebangkitan Islam di masa mendatang adalah kesadaran generasi baru Islam untuk

mampu berkompetisi secara global dan ini belum terjadi sekarang.

Meski begitu, Kamaruzzaman dalam buku ini mengajak kita semua untuk merenungi skenario lorong waktu yang telah didesain. Sejarah yang akan dihadapi oleh umat manusia ke depan adalah satu episode yang akan menjadi pertanda bahwa hasil ciptaan manusia akan berakhir sebagaimana takdir bumi yang akan berakhir pada waktunya.

Apa Kabar Indonesia

Di masa yang akan datang, sejarah akan berulang. Kepungan demi kepungan kekuatan luar akan menjadi sebab Indonesia berjibaku keras. Karena itu, takdir Indonesia adalah sejarah, alam, dan manusia. Maksudnya, Indonesia punya memiliki segalanya untuk sekedar survive dari tekanan eksternal. Indonesia ini adalah DNA kerajaan kuat di masa lalu. Kekuatan sumber daya alam yang melimpah adalah modal alamiah yang hanya perlu dioptimalkan guna mendukung pembangunan bangsa. Namun demikian, sejarah Indonesia adalah sejarah jatuh bangun sebagaimana sejarah pendahulu sebelum Indonesia. Untuk menghadapi skenario masa depan, Indonesia harus mempelajari kembali spirit Majapahit.

Hal ini pernah diungkap Pramoedya Ananta Toer, dalam bukunya Arus Balik. Bahwa di masa kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara. Pernyataan ini adalah pesan geopolitik yang sangat kuat. Betapa Majapahit sanggup mengubah definisi kekuasaan dunia yang berpusat di Barat. Artinya, jika masa lalu, para leluhur memiliki ilmu-ilmu yang digdaya, mengapa pada masa kini, sepertinya ilmu tersebut belum terwariskan

kepada generasi kekinian. Hal ini sepertinya disebabkan oleh karena adanya pembelokan spirit bangsa yang bukan mengantarkan pada kemajuan, tetapi lebih kepada posisi bertahan di dalam kepungan peradaban-peradaban besar lainnya.

Pasca Majapahit, arus kembali bergerak dari utara ke selatan lalu dan pada gilirannya menggerogoti kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di era nation-state, Indonesia adalah pewaris Majapahit yang kehilangan Master Plan. Sementara, tahun 2045 akan menjadi seratus tahun Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, Amerika Serikatlah yang paling dominan melakukan proses modernisasi Indonesia. Karena itu, tidak ada sedikitpun reproduksi intelektual di Indonesia yang tidak melibatkan Amerika Serikat. Meskipun dalam perjalanannya China melakukan infiltrasi pelan-pelan dan kini menjadi kuat. Bahkan, Indonesia adalah negara dengan penduduk China yang cukup signifikan setelah Singapura.

Singkatnya, Indonesia adalah surga dunia yang dapat terjadi apa saja demi amannya kepentingan negara-negara asing. Beberapa ramalan menyebutkan Indonesia bisa bangkit di masa yang akan datang. Salah satu indikasinya adalah kedudukan Indonesia sebagai "as a friend, but not as ally". Indonesia bisa menjadi teman kepada siapapun, tapi tidak bisa diajak sebagai aliansi.

Memahami Peradaban Yang Lahir Dari Sungai Kuning

Michael Wicaksono menulis buku yang sangat penting. Buku itu adalah "Memahami China". Wicaksono memulai bukunya dengan sebuah dongeng. Selama berapa abad, dongeng ini pernah menjadi sejarah resmi China. Dongeng itu menceritakan, konon alam semesta bermula dari sebuah telur, yang di dalamnya hidup seorang raksasa yang bernama Pangu.

Pangu yang keluar dari telur itu harus menopang pecahan telur tersebut agar bisa bertahan. Pecahan telur atas kelak akan menjadi langit dan pecahan telur bawah akan menjadi bumi. Dua pecahan yang dijaga Pangu itulah yang menjadi bibit keteraturan. Pangu lalu wafat dengan meninggalkan warisan, yakni dunia yang damai.

Selang ratusan abad berikutnya, agama dan ilmu pengetahuan bergerak menyisir China. Kebenaran sejarah terkuak lembaran demi lembaran, hingga kesepakatan tentang sejarah China diakui secara luas. Tetapi, bagaimana China yang sesungguhnya? Siapakah orang China yang asli? Bagaimana peradaban mereka terbentuk?

Untuk menjawabnya, kita penting memulainya dari sudut pandang etnisitas. Berdasarkan Sensus Nasional China tahun 2010, mereka yang menyebut diri sebagai orang China adalah mereka yang berasal dari suku Han. Sebanyak 90 persen atau lebih dari 1,2 miliar jiwa. Selebihnya adalah suku-suku minoritas.

Suku Han sendiri berasal dari Dinasti Han yang baru muncul di abad ke-3 SM. Berarti sebelum suku Han, terdapat orang China awal. Konsep baku tentang siapa orang China sesungguhnya terus mengalami perdebatan. Tidak sedikit sejarawan menyebut bahwa nenek moyang orang China hidup di sekitar Sungai Kuning lalu beranak pinak sampai ke Sungai Yang-tze. Dalam buku ini,

Wicaksono menukil penelitian Wu Xinzhi, Profesor dari Akademi Ilmu Pengetahuan China. Wu menjelaskan bahwa spesies Homo Erectus yang menyebar ke dataran Afrika tidak punah, tetapi berevolusi lalu menetap di China.

Ketika sampai ke lembah kuning, mereka menemukan Sungai Kuning. Sungai ini ekstrim, arus jeramnya lebat bergerak hebat. Sehingga mustahil diarumi. Tetapi, sungai ini membawa kesuburan. Mereka yang menetap di pinggiran sungai kuning -yang kemudian disebut pemukim- membangun tempat tinggal di sepanjang aliran sungai.

Faktor kesuburan endapan tanah sungai membuat populasi bertambah dan menyebar. Para sejarawan China menyebut Sungai Kuning sebagai "Ibu kebudayaan China". Hanya saja sang ibu ini bukanlah ibu yang penyayang dan lembut. Ibu ini seringkali meluapkan kemarahan berupa banjir bandang yang dahsyat. Akibatnya, banyak pemukim menjadi korban.

Dinasti Zhou Pemulai Peradaban

Berdasarkan catatan sejarah dalam Gulungan Bambu maupun Kitab Sejarah, periode kenegaraan dimulai di masa Dinasti Xia. Wicaksono mengambil pendapat Jared Diamond dalam bukunya Guns, Germs, and Steel, menjelaskan bahwa sistem politik China mengikuti tahapan perkembangan sosial-politik sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat lain. Dinasti Xia didirikan oleh seorang tokoh legendaris bernama Yu yang Agung.

Meski begitu, keberadaannya masih sulit dibuktikan. Cerita tentang Dinasti Xia ditemukan dalam catatan sejarah dari zaman Zhou dan Han. Untuk menyelidiki asal usul tersebut, pemerintah RRC mensponsori pembentukan tim penelitian sejarah yang bertajuk "Proyek Kronologi Xia-Shang-Zhou" untuk menemukan secara akurat kronologi keberadaan masa pra-sejarah China.

Setelah Xia, muncul Shang lalu Zhou. Era Zhou meninggalkan banyak jejak sejarah. Salah seorang arkeolog menemukan sebuah lubang berisi tidak kurang dari 17 artefak, yang sebagian besar adalah cangkang kerang dan tulang belikat sapi yang dihiasi guratan *Jiaguwen* (aksara yang berisi ramalan-ramalan).

Para sejarawan menerjemahkan isinya dengan cukup akurat. Catatan ini berisi temuan-temuan sejarah. Jiaguwen berisi huruf *Jinwen,* dan memberikan para sejarawan sebuah catatan penting. Para sejarawan meyakini Dinasti Shang merupakan awal mula sistem sosial yang lebih kompleks di China dan sistem pemerintahan terstruktur dan sistematis dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Pada masa Dinasti Shang, praktek peramalan merupakan kegiatan umum. Tulang belikat sapi atau cangkang penyu yang dipanaskan menghasilkan retakan yang diterjemahkan sebagai huruf dan di sinilah huruf-huruf awal China bermula.

Dalam kitab Zuozhuan dan Shanhaijing yang ditulis di sekitar abad ke-5 hingga ke-3 SM, disebutkan terdapat "Empat Hewan Mulia" atau "Empat Simbol" yang menggambarkan empat arah mata angin: Naga di Timur, Harimau di Barat, Kura-Kura di Utara, dan Burung Phoenix di Selatan. Kemudian, wilayah China sesuai

kosmologi Chinanya dikelilingi empat suku: Di di Utara, Yi di Timur, Man di Selatan, dan Rong di Barat.

Sulit membayangkan China tidak sebagai sebuah negara wilayahnya yang sangat luas, tetapi diperintah oleh satu entitas terpusat. Sebagai pedoman, negeri Zhou memiliki sekumpulan aturan yang disebut *Zhouli* atau "Ritus Negeri Zhou", yakni salah satu teks ritual kuno dalam Konfusianisme. Kitab ini mengatur hampir semua aspek kehidupan. Yang menarik dari kitab ini adalah "Tiga Kepatuhan" dan "Empat Kebijaksanaan", yang mengatur tentang tiga kepatuhan wanita dan empat prinsip moral dan kewajiban tak tertulis yang harus dipatuhi wanita.

Kitab Zhouli ini ditulis di masa Konfusianisme. Konfusianisme adalah ajaran yang dicetuskan oleh Kong Zhongni atau Guru Kong yang juga dikenal sebagai Kongzi. Nama Kongzi dilatinkan oleh Matteo Ricci, seorang misionaris Yesuit berkebangsaan Italia.

Konghucu hidup di masa Dinasti Zhou Timur. Ajaran ini hidup dalam struktur masyarakat Konghucu. Di dalamnya cendekiawan dan kaum terpelajar menempati urutan teratas. Sebab itu, mereka mengabdikan diri untuk kepentingan orang banyak karena dianggap sebagai teladan dan menjadi penasehat yang bijaksana kerajaan. Sehingga, untuk mendirikan pemerintahan yang ideal, pengikut ajaran Konghucu menempati posisi penting dalam pemerintahan. Di periode ini juga, berkembang ajaran Taoisme.

Ajaran ini didirikan oleh Lao Tzu yang hidup sezaman dengan Guru Kong atau Konghucu. Ajaran ini adalah aliran kepercayaan China Kuno terhadap dualisme Yin dan Yang. Perpaduan keduanya dipercaya dapat

menciptakan harmoni. Simbol Taoisme adalah perlambangan kehidupan yang mengalir.

Periode Dinasti Zhou Timur adalah masa-masa penuh gejolak. Negara-negara bagian saling bergumul untuk mengungguli satu sama lain. Di tengahnya ada bangsa Jin, yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah inti peradaban China Kuno (Sungai Kuning). Para bangsawan negeri Jin memperkuat diri mereka sendiri dan saling bersaing satu sama lain.

Hingga akhirnya tersisa empat bangsawan terkuat, yaitu klan Zhi, Zhao, Wei, dan Han. Dari keempatnya, klan Zhi paling dominan dan memiliki ambisi berkuasa. Ketiga klan lainnya membereskan klan Zhi lalu bersatu untuk menjadi negara bagian yang independen. Pembagian negara bagian yang disetujui ini menandai berakhirnya periode Musim Semi dan Musim Gugur, dan pada gilirannya membawa China dalam periode "Negara Berkembang."

Di utara, ada negara Qin. Qin menaklukkan negara-negara di bagian utara. Qin lalu mendirikan dinasti-dinasti baru yang menggantikan Dinasti Zhou pada tahun 221 SM. Ying Sheng diangkat menjadi penguasa tertinggi. Di masa inilah gelar raja tidak lagi digunakan. Era kekaisaran bermula. Huandi menjadi kaisar pertama, yang lebih terkenal dengan nama Qinshihuang.

Dalam upayanya mempersatukan China yang terbelah, Qinshihuang telah membunuh ratusan ribu orang persis apa yang pernah dilakukan para pendahulunya. Meski begitu, Qinshihuang sebenarnya adalah orang yang takut mati. Karena itu, ia merekrut berbagai orang yang dapat memberinya cara untuk mencapai keabadian.

Ada yang menyarankan agar Qinshihuang mencari obat keabadian di negeri para dewa yang terdapat di seberang lautan. Maka Xu Fu menjaminkan keabadian tersebut dengan syarat tumbal sejumlah tiga ribu pasang muda-mudi terbaik yang dijadikan persembahan bagi dewa. Qin menyanggupinya, Xu Fu pun berlayar ke negeri seberang tanpa pernah kembali. Tiga ribu pasang muda mudi tadi konon dipercaya sebagai nenek moyang orang Jepang modern.

Cara terakhir adalah memanggil para ahli Nujum yang menganjurkan agar Qinshihuang menelan Pil Merkuri yang terbuat dari air raksa. Sejak dulu, orang China percaya bahwa bila seseorang menelan unsur ini, organ tubuhnya akan berubah menjadi logam dan tidak akan pernah rusak dan pada gilirannya orang tersebut akan memiliki tubuh kuat dan memiliki umur panjang.

Tetapi, Qinshihuang bernasib naas. Keabadian yang diimpikannya tidak kunjung tiba. Keracunan dalam waktu lama merusak saraf-saraf Qin hingga merenggut nyawanya. Saat wafat, ia dimakamkan bersama ribuan prajurit tembikar (Terakota).

Kebesaran Dinasti Han dan Keemasan Dinasti Tang

Sebagai peradaban besar, China sejak lama mengembangkan budaya tulis menulis sejak dua ribu tahun sebelum masehi. Penelusuran sejarah tertulis China membawa kesimpulan sejarah bahwa awal mula sejarah China terdapat di atas tulang dan cangkang. Dokumen sejarah ini disebut dengan "Dokumen Agung". Sayangnya pembakaran massif karya-karya kuno terjadi di era Qinshihuang. Di periode Dinasti Han, upaya menyusun kembali sejarah dilakukan oleh Kaisar Wu. Adalah Sima

Qian yang dipercayakan menyusun kembali sejarah China.

Dalam upaya menyusun kitab sejarah China, ia tersandung masalah dengan sang kaisar. Ia harus dikebiri akibat sanggahannya yang dianggap oleh sang kaisar sebagai penghinaan. Di masa itu, seseorang yang menghina kaisar adalah pelanggaran berat, sehingga ganjarannya adalah hukuman mati. Seseorang bisa saja lolos dari jerat hukuman mati, jika seseorang itu punya cukup uang untuk menebus dirinya sendiri.

Saat itu, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah menerima kebiri. Hukuman itu tidak membuatnya menyerah atas tanggungjawab berat itu. Sima tetap melanjutkan petualangannya berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dan mengumpulkan catatan-catatan, baik dari penuturan lisan maupun saksi sejarah yang masih hidup.

Dari petualangannya, lahirlah mahakarya *Shijji,* sebuah kitab sejarah. Menariknya, kitab sejarah ini berbentuk novel yang menyajikan dialog-dialog dan cerita-cerita kehidupan manusia. Awalnya, kitab ini tidak terpublikasikan. Baru setelah Sima Qian wafat, keturunan Kaisar Wu menyebarkannya. Sebagai sebuah mahakarya, kitab sejarah ini menjadi referensi utama para sejarawan di masa-masa berikutnya.

Selain kitab sejarah, Dinasti Han adalah periode gemilang. Salah satunya adalah Sutera. Pada masa Dinasti Han, sutera menjadi komoditi paling dicari oleh pedagang-pedagang. Pada masa itu pulalah, nama Jalur Sutera mengemuka. Jalur ini nantinya menjadi pusat ekonomi baru bagi kekaisaran. Sayangnya, pergolakan di akhir masa Han Timur, wilayah ini lepas dari kekuasaan

China lalu kembali ke pangkuan China di era Dinasti Tang dan menjadi permanen pada masa Dinasti Qing.

Setelah Jalur Sutera, kertas menjadi penemuan penting di China. Jauh sebelum Eropa mengenal kertas, China telah menjadikan kertas sebagai alat surat menyurat istana. Kertas ditemukan oleh Cai Lun, seorang kasim di masa Kaisar Ming. Selain itu semua, setidaknya terdapat penemuan besar China yang diakui dunia, yakni kompas, bubuk mesiu, dan percetakan.

Pasca Dinasti Han, penguasa berikutnya adalah Tang. Jalan unifikasi China kembali dirintis oleh Li Shimin setelah memenangkan pertarungan dengan dua rivalnya di Hebei dan Henan. Li Shimin diangkat sebagai kaisar baru oleh ayahnya. Ia lalu dikenal dengan Kaisar Taizong dari Tang. Masa kepemimpinannya dikatakan sebagai era keemasan. China di masanya dipimpin oleh seorang penguasa yang tidak hanya bijak dan cakap, tetapi juga pandai memanfaatkan bakat seseorang dalam pemerintahan.

Kaisar Taizong tidak kekurangan orang berbakat dari penjuru negeri yang siap mengabdi untuk pemerintahan. Karena itu, sang kaisar menghidupkan sistem "Ujian Kekaisaran". Tidak berhenti sampai disitu, Dinasti Tang berfokus pada wilayah perbatasan-perbatasan di barat yang selama ini lepas dari kendali kekuasaannya.

Wilayah China di masa Tang membentang sampai ke perbatasan Pakistan-India modern dan juga ke wilayah Kazakhstan sekarang. Di masa Tang pula, Jalur Sutera tidak menjadi jalur ekonomi biasa, tetapi berhasil menjadi alat politik yang digunakan untuk menghubungkan China dengan Khalifahan Abbasiyah di Baghdad dan sekaligus menjadikan Islam sebagai sekutu utama Dinasti Tang.

Persentuhannya dengan pedagang-pedagang Arab nantinya membawa pengaruh agama lain terutama Islam di sistem kekaisaran. Bahkan, di masa ini sepupu jauh Nabi Muhammad Saw.: Sa'ad Abi Waqqas, mengunjungi China lewat laut dan diterima baik oleh kaisar dan memerintahkan dibangun masjid pertama China di kota Guangzhou.

Dalam banyak hal, Dinasti Tang adalah pengulangan Dinasti Han. Salah satunya adalah peran perempuan di balik kekuasaan. Jika Dinasti Han punya Lu sebagai permaisuri, maka Dinasti Han memiliki Wu Zetian, yang merupakan kaisar pertama perempuan dalam kekaisaran China. Naiknya Wu Zetian ke tampuk kekuasaan adalah tonggak sejarah China. Sebab, sebagaimana peraturan dinasti-dinasti sebelum-sebelumnya, kaum perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik: di dalam rumah, mengurusi suami, dan membesarkan anak.

Wu Zetian mendobrak sistem tersebut. Ia bertahta atas nama kaumnya dan memegang kekuasaan langsung dalam genggamannya tanpa dikendalikan oleh orang lain di balik kelambu tirai tahta. Sejak kecil, tanda-tanda kepemimpinan sudah terlihat. Ketika Wu lahir, ayahnya mengenakan pakaian laki-laki padanya.

Seorang peramal yang diundang oleh kaisar menyempatkan diri menyambangi kediaman keluarga Wu. Ayah Wu pun meminta sang peramal meramal anak-anaknya. Sang peramal menyebutkan bahwa suatu saat dua orang anaknya akan menjadi pejabat tinggi. Ketika melihat Wu yang masih bayi, sang peramal tertegun cukup lama dan mengamati bayi itu.

Bayi ini memiliki mata naga dan dahi phoenix. Sang peramal mengatakan, bayi ini memiliki ciri-ciri kaisar. Jika

bayi ini perempuan, kelak ia akan menjadi seorang kaisar. Ramalan itu pun terbukti. Wu Zetian naik ke tampuk kekaisaran.

Sebagai seorang wanita, Wu Zetian menyadari bahwa posisi kaumnya tidak otomatis beranjak meskipun ia telah menjadi kaisar. Para pejabatnya bahkan mencibirnya diam-diam dengan sebutan "ayam betina yang berkokok". Tetapi Wu Zetian berhasil membuktikan semuanya. Selama masa kepemimpinannya, China relatif stabil, aman dan makmur.

Wu juga mereformasi istana. Ia memerintahkan semua dayang istana belajar membaca dan mempelajari literatur-literatur klasik. Selain itu, ia mengizinkan kaum wanita bangsawan untuk ikut hadir dalam acara ritual kekaisaran yang dulu hanya menjadi hak khusus bagi para pejabat dan bangsawan pria saja.

Tidak hanya di dalam istana, Wu aktif mengkampanyekan emansipasti perempuan di tengah masyarakat China yang sangat patriarki. Sebagai contoh, Wu mempromosikan kitab *Daodejing* sebagai bahan pelajaran wajib bagi para kandidat yang akan mengikuti ujian kekaisaran, karena ia merasa kitab inilah yang paling representatif berbicara keluhuran perempuan.

Di masa pemerintahan Kaisar Xuanzong, Dinasti Tang dianggap sebagai puncak kebudayaan klasik China. Sang kaisar sendiri adalah seorang sastrawan dengan kompetensi yang cukup brilian. Kaisar bahkan memiliki kemampuan menulis puisi dan kaligrafi yang tidak kalah mengesankan dibanding para pujangga yang sezaman dengannya.

Dinasti Tang juga menjadi masa dimana seni lukis mendapatkan bentuknya yang definitif. Dua pelukis

terkenal yang hidup di masa ini: Han Gan dan Dai Song, menciptakan masing-masing lukisan dengan ciri khasnya masing-masing. Lukisan Han misalnya tentang seekor kuda milik Kaisar Xuanzong bahkan sampai disebut sebagai lukisan kuda terbaik sepanjang sejarah China. Lukisan milik Han Gan ini bisa dijumpai di Museum Seni Metropolitan di New York, Amerika Serikat.

Begitu juga dengan lukisan Dai Song. Ia menggabar sapi. Salah satu lukisannya yang terkenal adalah "Lukisan Pertarungan Sapi". Lukisan ini menggambarkan dua ekor sapi jantan yang tengah bertarung dalam gerak yang hidup, dimana seekor sapi tengah menanduk sapi lainnya yang ada di depannya. Lukisan Dai Song ini dibawa lari ke Taiwan pasca Chiang Kai-sek mengalami kekalahan di perangnya melawan Mao Zedong dan saat ini disimpan oleh Museum Istana Kekaisaran di Taipei.

Setelah seni lukis, era Tang juga masyhur dengan cerita perjalanan Biksu Tom Sam-cong ke barat mencari kitab suci yang dikawal Sun Go-Kong, sang raja kera sakti, bersama Ti Pat-kay: siluman babi sakti, dan Sah Ceng: siluman air yang bertobat. Kendati banyak yang menganggapnya cerita fiktif, tetapi kisah itu benar-benar terjadi. Bahwa seorang biksu bernama Xuanzang melakukan perjalanan jauh ke India demi mencari kitab suci agama Buddha.

Renaisans China, Kekuasaan Mongol, hingga Deng Xiaoping

Ketika China mencapai era keemasan di periode Dinasti Tang, maka puncak renaisans China dimulai di era Dinasti Song. Hal ini dipengaruhi oleh pendahulunya. Sehingga, era Dinasti Song sebetulnya lebih kepada

memetik kegemilangan era sebelumnya. Salah satunya adalah munculnya uang kertas. Saat itu, pemerintahan menemukan cara efektif untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar.

Cara itu adalah uang kertas. Orang China menyebutnya *Jiaozi*, bahkan dianggap sebagai uang kertas pertama di dunia. Uang kertas ini dikenalkan ke Eropa oleh Marco Polo ketika ia mengunjungi China dan membawa pulang konsep dan pengetahuan moneter tersebut ke Eropa. Setelah konsep percetakan ditemukan, para cendekiawan menemukan mesin cetak portable, sehingga mereka menuangkan ide-ide tentang apapun ke dalam buku. Misalnya, ide tentang pertanian ke dalam banyak buku. Ide tentang birokrasi ke dalam kitab, serta kurikulum ala Konghucu ditulis ke dalam kurikulum pendidikan.

Di masa Dinasti Song, era lain muncul, yang bisa dikatakan sebagai era yang berbeda dari era sebelumnya, yang menguasai China cukup lama. Era itu adalah Kebangkitan Mongol. Bangsa Mongol nantinya akan menjadi penguasa China dan mendirikan Dinasti Yuan. Bangsa Mongol adalah suku nomaden yang hidup di luar teritori China. Mereka ini menempati padang rumput yang luas di tepi Sungai Onon, yang merupakan sungai yang terbentang dari Rusia menuju Republik Mongolia saat ini.

Di tepi sungai inilah, lahir Borjigin Temujin atau yang akrab kita sebut Genghis Khan. Genghis hidup dari pertarungan ke pertarungan. Sejak masih kecil pun, ia sudah harus menanggung kerasnya kehidupan akibat peperangan. Hingga ia dewasa, Genghis telah terlibat dalam peperangan. Saat menjabat kaisar, ia memiliki

empat orang anak laki-laki, yakni Jochi, Chagatai, Ogodei, dan Tolui. Saat Genghis wafat, konflik membesar di internal keluarganya, terutama terkait perebutan tahta.

Ogedei wafat setelah memerintah selama 12 tahun. Sebelum mangkat, ia memberikan tahtanya pada Guyuk, putranya sendiri. Tetapi karena Jochi sedari awal tidak menyetujui pengangkatan Ogodei sebagai penerus Genghis, maka ia mengobarkan perlawanan kepada Guyuk. Namun, *Kurultai* (dewan penasehat kaisar) sepakat mengangkat Mongke sebagai Khan yang baru. Mongke bersama adiknya Kublai, memimpin perang dalam penaklukan China. Hanya saja, dalam operasi merebut China, sang kakak meninggal dalam pertempuran. Praktis, pasukan perang dipimpin oleh Kublai.

Setelah menumpas perlawanan penguasa Song, Kublai naik sebagai kaisar baru dari keturunan Khan. Bangsa Mongol yang menduduki China kemudian mengadopsi sistem pemerintahan China, termasuk gelar kaisar. Sehingga, pemerintahan Mongol menjadi kekaisaran dan Kublai mendirikan Dinasti Yuan sekaligus menjadi kaisar pertama.

Di masa kepemimpinannya, Kublai memindahkan ibukota China ke Beijing. Ia memberikan gelar anumerta kepada Genghis Khan dengan nama Kaisar Taizu (pendiri Dinasti Song), dan ia sendiri sebagai Kaisar Shizu (pendiri Dinasti Yuan). Menariknya, Kublai akomodatif dalam pemerintahannya. Terbukti saat ia mengangkat seorang muslim sebagai gubernur pertama provinsi Yunnan. Ia adalah Syamsuddin Omar Al-Bukhari, yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad Saw. atau leluhur dari Syekh Jumadil Qubro.

Selain itu, keluarga Syamsuddin berturut-turut menjadi gubernur Yunnan. Salah satu keturunannya nantinya akan menjadi kasim istana yang dikenal dengan Ma He atau Zeng He atau yang lebih dikenal dengan sebutan Laksamana Cheng Ho yang hidup di masa Dinasti Ming.

Dari periode Ming ke periode Qing, China telah mengalami begitu banyak peperangan dan penaklukan. Bibit akhir era kekaisaran muncul ketika Qianlong, kaisar terkenal dari Dinasti Qing wafat. Akibatnya, era kekaisaran melemah, terlebih ketika masuknya bangsa Eropa ke daratan China. Hingga di penghujung abad ke-19, China benar-benar dianggap sebelah mata oleh bangsa asing. Rakyat hidup ditindas oleh pemerintahannya sendiri, sementara pemerintahan Qing semakin lemah tak berdaya menghadapi tekanan eksternal dari berbagai sudut.

Di masa itu, negara asing yang ingin menguasai China tak hanya Eropa, tapi Jepang. Kendati mereka sebenarnya adalah bangsa serumpun, tetapi dipisahkan oleh jurang politik yang sangat lebar.

Akibat ketidakpuasan rakyat, pemberontakan merajalela di hampir semua wilayah kekuasaan Dinasti Qing. Seperti di era-era sebelumnya, Dinasti Qing mengulang kehancuran para pendahulunya. Tetapi, sebagaimana dikatakan Luo Guazhong, sastrawan terkemuka China di era Dinasti Ming, mengatakan "Apa yang lama terpecah akan bersatu. Apa yang lama bersatu akan terpecah juga".

Seperti gayung bersambut, perpecahan China menemukan kembali perekatnya setelah Sun Yat-sen muncul. Sun Yat-sen hadir mempersatukan China menjadi negara nasionalis. Ia dikenal sebagai Bapak Pendiri

Republik China. "Tiga Prinsip Kerakyatan" ajarannya, yakni nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, menjadi filosofi penyatuan China. Sun mendirikan partai nasionalis China yang kemudian dikenal dengan nama *Guomindang* atau Kuomintang.

Seperti takdir, persatuan China bertahan sebentar, terlebih setelah Chiang Kai-sek mengambil alih kepemimpinan KMT setelah Sun Yat-sen meninggal. Mulanya, partai KMT solid sampai ke bawah kendati infiltrasi ideologi komunisme merangsek ke elit tokoh China. Hanya saja, perbedaan cara pandang membangun konsep negara China mengakibatkan polarisasi yang kuat. Pun konteks Perang Dingin menjadi faktor penting polarisasi tersebut. Perseteruan yang semakin menguat mengakibatkan perpecahan tak terelakkan. Maka, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang disponsori Uni Soviet mengobarkan pemberontakan.

Mao Zedong bersama Tentara Merah menduduki Beijing dan mengalahkan Partai KMT di berbagai tempat hingga akhirnya Mao memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat China pada tanggal 1 Oktober 1949. Peristiwa ini mengakibatkan Chiang Kai-sek kabur ke Taiwan.

Di dalam lingkaran kekuasaan Mao, terdapat sosok yang nantinya membawa China bertransformasi menjadi negara dengan konsep "One State, Two System". Ia adalah Deng Xiaoping. Pada dasarnya, Deng Xiaoping adalah seorang pragmatis. Ucapannya yang terkenal sebelum Revolusi Kebudayaan, "Tidak Peduli Kucing itu Hitam atau Putih, yang Penting Bisa Menangkap Tikus".

Setelah menjabat pemimpin militer tertinggi China, Deng pun mengumumkan kebijakan politiknya, yakni

"Mencari Kebenaran dari Kenyataan". Ia menjelaskan bahwa partai dan pemerintah harus mengedepankan metode ilmiah yang terukur dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Kebijakan yang dicetuskannya juga sebenarnya meneruskan kebijakan mendiang Zhou Enlai yang secara bertahap menerapkan "Empat Modernisasi", yakni modernisasi di bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan, dan pertahanan nasional.

Di tangan Deng, China menjadi negara terbuka. Hal itu ia buktikan dengan membangun hubungan diplomatik dengan negara maju pemilik modal. Selain itu, Sang Kamerad mengunjungi Jepang yang sebelumnya renggang di masa transisi. Secara perlahan, Deng mendapatkan investasi asing dari negara yang pada awalnya menjadi musuh, yakni Amerika Serikat. Keterbukaan China di era Deng berbeda dengan *Perestroika* yang digagas Mikhail Gorbachev pada tahun 80-an, yang membuka kebebasan sebebas-bebasnya tanpa mempertimbangkan haluan ideologi negara, yang pada gilirannya mengakibatkan kolapsnya Uni Soviet.

Dalam konteks ini, di sinilah letak kecerdasan Deng Xiaoping. Ia mengadopsi pasar dan keterbukaan ekonomi, tetapi tetap memegang teguh nilai dan prinsip sosialisme. Sederhananya, Deng menerapkan kebijakan terbuka keluar, tapi tertutup ke dalam sebagaimana analogi kucing hitam dan putih yang menjadi slogannya.

"Tidak Peduli Kucing itu Hitam atau Putih, yang Penting Bisa Menangkap Tikus". Bahwa untuk maju, China tidak penting memakai kapitalisme atau sosialisme, yang penting tujuannya bisa membawa China menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Belakangan, prinsip ini

dikatakan oleh Deng sebagai “Sosialisme China”. Demikianlah.

Referensi

Abdurrahman Wahid. (2010). *Membaca Sejarah Nusantara* (M. I. Aziz (ed.)). LKIS Yogyakarta.

As'ad Said Ali. (2012). *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. LP3ES.

Fared Zakaria. (2015). *The Post American World*. Benteng Pustaka.

Francis Fukuyama. (2016). *The End History And The Last Man Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal* (M. H. Amrullah (trans.); IV). Qalam.

Francis Fukuyama. (2016). *The Great Disruption Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial* (Terjemahan). Penerbit Qalam.

Gita Wirjawan. (2025). *What It Takes Asia Tenggara: Dari Tepi Menuju Kesadaran Inti Global* (E. A. Rahmadi (ed.)). Penerbit Endgame Publishing.

Hasyim Wahid. (1999). *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. LKiS.

Jared Diamond. (2017). *Collapse: Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia* (D. W. P. Tyas (trans.); II). Kepustakaan Populer Gramedia.

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, K. (2018). *Masa Depan Dunia*. Bandar Publishing.

Klaus Schwab. (2019). *Revolusi Industri Keempat* (A. Taringan (ed.)). PT. Gramedia Pustaka Utama.

Michael Wicaksono. (2021). *Memahami China Sejarah Peradaban Dan Politik Negeri Tirai Bambu*. Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Pramoedya Ananta Toer. (2002). *Arus Balik* (Cetakan ke). Hasta Mitra.

Samuel Huntingtion. (2012). *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia* (M. S. Ismail (trans.); XII). Qalam.

Slamet Muljana. (2012). *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. LKiS.

Slavoj Zizek. (2020). *Pan(dem)ik Covid-19 Mengguncang Dunia* (Terjemahan). Penerbit Independen.

Tjio Tjiang Feng. (2007). *Seni Perang Sun Tzu dan 36 Strategi* (II). Visimedia.

Wahyudi Djaja. (2012). *Sejarah Eropa Dari Eropa Kuno Hingga Modern*. Penerbit Ombak.

Wang Gungwu. (2025). *Why The World Looks Like The World Today?* End Game.

William Sandys Wright Vaux. (2025). *Sejarah Persia Kuno Dari Periode Awal Hingga Ditaklukkan Arab* (Terjemahan). IRCiSoD.

Yudi Latif. (2011). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (I. S. Ibrahim (ed.)). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Yuval Noah Harari. (2018). *Homo Deus Masa Depan Umat Manusia* (N. Wiyati (ed.); Y. Musthofa (trans.); Cetakan 5). PT Pustaka Alvabet.

Yuval Noah Harari. (2019). *Money: Hikayat Uang Dan Lahirnya Kaum Rebahan*. CV. Global Indo Kreatif.

Profil Penulis

Muhammad Suryadi R adalah pria kelahiran Barru. Anak muda yang akrab disapa Adi ini lahir di Palanro pada tanggal 08 Juli 1993. Sekarang berdomisili di Ujunge Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Menamatkan Pendidikan Sarjana (S1) di STAI DDI (sekarang IAI DDI) Mangkoso tahun 2016 dan menyelesaikan Studi Magisternya di Pascasarjana IAIN Parepare pada tahun 2026. Ia adalah alumni Pendidikan Agama Islam, dari S1 dan S2, hingga takdir membawanya menjadi seorang guru tanpa tanda jasa -dari pukul 07.30-12.05. Tetapi sesungguhnya, ia sangat tidak berbakat jadi seorang guru. Sebab peminatannya melenceng jauh dari bidang studi yang diajarkannya: PAI, justru bacaan dan kajiannya lebih getol ke HI (Hubungan Internasional).

Alumni PMII dan kader Ansor yang satu ini pernah diamanahi tanggung jawab sebagai Koordinator GUSDURian pertama di Barru. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Kebudayaan di Karang Taruna Barru. Menjadi pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Barru sebagai Sekertaris Umum. Juga diamanahkan mengurusi administrasi dan tata kelola komunitas literasi dan sastra di Takanitra (Perpustakaan Komunitas Iqra). Di samping itu, memimpin lembaga riset independen sebagai Direktur Eksekutif di Parametric Development Center yang berpusat di Makssar. Terakhir, dipercaya sebagai Tim Reviewer salah satu Jurnal di Institut Agama Islam (IAI) DDI Sidrap.